iNOVASI UNTUK NEGERi
infoindonesia
https://infoindonesia.id

EDISI #34 AGUSTUS 2023

PECAH KONGSI RELAWAN JOKOWI

BUMN KARYA BIKIN RUGI NEGARA

APBN JANGAN BUAT BAYAR UTANG

SUMSEL JADI LUMBUNG PANGAN NEGARA

PILIH CAPRES YANG SEDIKIT JELEKNYA

PJ GUBERNUR DKI HARUS MINTA NASEHAT MANTAN GUBERNUR

JOKOWI HARUS GANTI PARTAI

BANYAK NOLAK JADI CAWAPRESNYA, ANIES BASWEDAN MASIH JOMBLO

PELUANG TERBUKA INDONESIA MASUK OECD

ARTIS REBUTAN NYALEG, KEMAMPUAN PAS-PASAN

MOELDOKO DIPUKUL TELAK AHY

IKN NUSANTARA PROYEK TERBESAR DI DUNIA

Rp75.000,-

info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERi

IKLAN BACK COVER
RP 75.000.000
IKLAN DISPLAY/HAL
RP 50.000.000
IKLAN ADVERTORIAL/HAL
RP 65.000.000
CENTER SPREAD
RP 80.000.000

INFO PASANG IKLAN
ZULFAHMI
+62 813 8019 6507

Kami Hadir Memberikan info Tersebut

- **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**
- **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**
- **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**
- **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**

infoindonesia.id @info_indonesia.id @_infoindoneisa redaksi@infoindonesia.id

Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
●TELP 021-791 96781 ●FAX 021-791 96786

iNOVASI UNTUK NEGERi
info indonesia

78 TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

EDISI BULAN AGUSTUS 2023

DAFTAR ISI

7
INFO UTAMA
Jokowi ditawari kursi Ketua Umum Partai Gerindra Kalau Prabowo Subianto Jadi Presiden 2024, ini sebagai Jaminan Prabowo akan menyelesaikan Program pembangunan Presiden Jokowi.

22
INFO SUMSEL
Majunya sektor pertanian di Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru rupanya menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut jika Sumsel merupakan salah satu provinsi ujung tombak penyangga pangan di Tanah Air.

38
INFO PEMILU
Bola panas usulan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden 35 tahun tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi atau judicial review Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur batas minimal usia capres-cawapres tengah disidangkan di MK.

42
INFO PILKADA
Nama-nama bakal calon gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada 2024 kini mulai menarik perhatian. Sejumlah kepala daerah yang masih aktif menjabat dikabarkan bakal maju menjadi orang nomor satu di Daerah Nyiur Melambai itu.

50

INFO NASIONAL

Polusi udara Jakarta tengah jadi sorotan. Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta masuk dalam kategori mengkhawatirkan dan tidak sehat bagi kelompok sensitif.

74

INFO MUBA

Upaya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menanggulangi kemiskinan tidak main-main. Penjabat Bupati Muba, Apriyadi Mahmud, tahun ini meluncurkan tujuh program inovasi pengentasan kemiskinan guna menyejahterakan Masyarakat Bumi Serasan Sekate.

87

INFO KHUSUS

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tak henti-hentinya diterpa angin. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu terus-menerus dihadapkan dengan masalah.

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

30 INFO DPR

34 INFO MPR

70 INFO EKONOMI

76 INFO ISTANA

86 KAJI

80

INFO SELEBRITI

Sejumlah artis muda Indonesia menyatakan akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. Mereka ingin berebut kursi sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:
Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @1Infoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

INFO REDAKSI

HAMPIR

Kian mendekat. Tak sampai enam bulan sejak peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan, kita akan menyelenggarakan perhelatan politik Pemilihan Umum 2024. Sebegitu besarnya perhelatan itu karena melibatkan hampir 205 juta warga pemegang hak pilih. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2024 mencapai 204.807.222 jiwa.

Lebih dari sekadar angka, pemegang hak pilih itu akan menentukan suksesi (pergantian) kepemimpinan nasional. Melalui konfigurasi dukungan suara untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Bukan saja memilih Presiden, Pemilu 2024 juga akan memilih para wakil rakyat di parlemen tingkat lokal DPRD kabupaten, kota, dan provinsi, serta DPR RI di tingkat nasional. Termasuk memilih para senator yang akan duduk di Dewan Perwakilan Daerah dengan alokasi empat wakil dari setiap provinsi yang kini berjumlah 38.

Nah, pada 2024, pemilihan langsung merupakan yang kelima kali sejak 2004. Begitu banyak pengalaman berharga yang idealnya membuat kita semakin matang dalam berdemokrasi. Beriringan dengan perjalanan siklus politik lima tahunan itu senantiasa terjadi perubahan dan kesinambungan yang merupakan keniscayaan dalam kehidupan.

Perubahan dan kesinambungan itulah tampaknya menjadi slogan atau tagline yang menjadi ide utama untuk memikat dukungan dari hampir 205 juta pemilih. Namun, yang menjadi perhatian, hendaknya kita melihat perubahan dan kesinambungan sebagai dua sisi berbeda dari koin atau format yang sama. Tiada perubahan tanpa membawa kesinambungan masa lalu yang melekat dengan waktu. Begitu juga tiada kesinambungan tanpa perubahan, karena secara alamiah itulah yang niscaya.

Dalam perjalanan politik bangsa ini, sejak perubahan Indonesia melalui Reformasi 1998, kesinambungan masa Orde Baru dan Orde Lama tetap terlihat. Bahkan kesinambungan sebelum Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pun masih terbawa. Toh Indonesia pun tetap berubah dalam kesinambungan itu.

Jadi, bagaimana dengan Pemilu 2024 menjelang peringatan 80 tahun Indonesia merdeka? Yang melekat dengan Pemilu adalah dua hal berbeda yang memerlukan pemahaman mendalam bagi bangsa ini. Dua hal itu adalah persaingan (competition) dan permusuhan (rivalry).

Persaingan adalah proses untuk menunjukkan prestasi konkret dengan meraih kemenangan. Pemenang tak mempermalukan yang kalah. Yang kalah mengakui kemenangan pesaing. Sedangkan permusuhan adalah proses meraih kemenangan yang melekat dengan kebencian. Yang menang maupun kalah sama-sama saling membenci.

Jika kita sulit membedakan persaingan dan permusuhan. Juga jika tak dapat memilahnya dalam berpolitik, bangsa ini menjadi taruhannya. Permusuhan hanya melemahkan daya saing kita di antara bangsa-bangsa. Meskipun hampir 80 tahun merdeka.●

PENDIRI: Usman Rizal **DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM:** Usman Rizal
PEMIMPIN PERUSAHAAN: Zulfahmi Jamba **PEMIMPIN REDAKSI:** Gunawan Effendi **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:** Rahmad Romli **REDAKTUR PELAKSANA:** Rusdiyono **REDAKTUR :** Rio Taufiq Adam, Melati Tagore, Irma Yani, Rusdiyono, Nina Erlina, Ega Tri Gustina **REPORTER:** Achmad Tirta Wahyuda, Anugrah Dany, Rifky Ilmi, Budi Prasetya, Ahmad Yani, Yuni Watiana, Mario Ananta, Rahmad KR, Iwan Fals, Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina Iskandar, Jifran, Boyke Parningotan Hutapea (Bekasi), Dian Taresa (Kalimantan Tengah), Zaki (Kalimantan Timur), Basri (Kalimantan Utara), Lalu Suparman Ambakti (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar Usman (Kepulauan Bangka Belitung) **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achiles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali
KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS:** RM Solehin, Zul Jamba **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar **BANK ACCOUNT:** A/N : PT. Wahana Multimedia, BCA : No Rek : 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur

JOKOWI HARUS GANTI PARTAI

Jokowi ditawari kursi Ketua Umum Partai Gerindra Kalau Prabowo Subianto Jadi Presiden 2024, ini sebagai Jaminan Prabowo akan menyelesaikan Program pembangunan Presiden Jokowi. Mungkinkah?

Presiden Jokowi disebut-sebut akan menjadi suksesor Prabowo Subianto sebagai Ketum Partai Gerindra berkat gestur dukungannya atas pencapresan mantan Danjen Kopassus ke-15 itu sejauh ini. Namun, itu dengan catatan, Prabowo berhasil memenangi Pilpres 2024.

Selama ini, isu dukungan Jokowi kepada Prabowo selalu ditampik oleh para elite PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, misalnya, menyebut kapasitas Presiden Jokowi hanyalah memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan dengan baik.

"Tidak ada pernyataan Bapak Jokowi memilih Prabowo sebagai calon presiden itu. Berita itu tidak benar," kata Hasto di Padang, 4 Juli 2023.

Dia melanjutkan, Jokowi sebagai Presiden memastikan kepemimpinan Indonesia kedepannya berjalan dengan baik. PDIP dalam Rakernas ketiga juga telah menegaskan kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Indonesia digantikan oleh Ganjar Pranowo dan itu akan dikawal.

"Kami dari PDI Perjuangan sudah memutuskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan Ganjar Pranowo. Kami dukung dari sikap Pak Jokowi,'" ucapnya.

Hasto juga mengatakan, tugas pengurus PDIP saat ini adalah menjalankan arahan yang disampaikan Jokowi saat Rakernas 3. Arahan yang sangat baik dan kontrutif itu akan dikawal. "Ini adalah kapasitas Jokowi sebagai Kader PDI Perjuangan," katanya.

Dia juga menyampaikan, PDIP sampai saat ini masih membuka diri untuk berkoalisi. Namun, dengan ketentuan partai tersebut harus mengikuti keputusan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres pada pemilu 2024.

"Dinamika politik harus dicermati dan melihat bagaimana keinginan dari rakyat. Kami dari PDI Perjuangan membuka ruang bagi partai politik yang ingin berkoalisi, termasuk Gerindra " katanya.

Terakhir, dia menyampaikan, PDIP masih menunggu dan mencermati seluruh dinamika politik yang terjadi, termasuk nama-nama cawapres pendamping Ganjar Pranowo." Kami masih menunggu dan membuka ruang," ujarnya.

Kini, yang menjadi pertanyaan, apakah Jokowi tidak khawatir dengan statusnya sebagai kader PDIP jika akhirnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Bukankah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa kali mengingatkan Jokowi soal statusnya sebagai petugas partai?

Secara cepat, tentu jawabannya adalah khawatir. Namun, bagaimana jika Jokowi sudah memiliki kapal penyelamat? Belakangan ini tengah beredar isu menarik. Setelah dirumorkan dapat menjadi suksesor Megawati, Jokowi justru disebut akan menggantikan posisi Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Jika Prabowo menang di Pilpres 2024, bukan tidak mungkin Jokowi yang menggantikan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra,

sekaligus Ketua Dewan Pembina," ungkap pengamat politik Igor Dirgantara, 7 Juli 2023.

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengatakan, jika Prabowo ingin terpilih menjadi Presiden, dirinya harus memberikan posisi Jokowi sebagai Ketua umum Partai Gerindra.

"Saya lihat saat ini adalah pertarungan king maker ya, Ganjar king makernya Megawati, Anies king makernya Surya Paloh. Jika Jokowi ingin menjadi king maker Prabowo, maka Prabowo harus serahkan tampuk kekuasaan Gerindra kepada Jokowi," katanya, Kamis, 3 Agustus 2023.

Menurut dosen Universitas Sahid ini, tidak ada cara selain Jokowi diposisikan sebagai Ketua Umum Gerindra jika ingin Prabowo menang sebagai Presiden 2024 mendatang.

> **Saya lihat saat ini adalah pertarungan king maker ya, Ganjar king makernya Megawati, Anies king makernya Surya Paloh. Jika Jokowi ingin menjadi king maker Prabowo, maka Prabowo harus serahkan tampuk kekuasaan Gerindra kepada Jokowi**

"Prabowo tidak hanya berharap pada putusan MK yang kemudian memberikan angin segar kepada Gibran untuk menjadi pendampingnya dalam Pilpres 2024 mendatang," ucapnya.

Kata Saiful, jika Jokowi diberikan posisi sebagai Ketua Umum Gerindra, maka sudah dapat dipastikan Prabowo akan menjadi calon Presiden yang akan memenangkan kontestasi.

"Terlebih lagi dengan elektabilitas Prabowo yang semakin kuat, dengan didukung oleh king maker Jokowi yang diposisikan sebagai ketua umum partai, maka akan sangat menguntungkan Prabowo," ujar Saiful Anam.

Kalkulasi Jokowi

Jika isu itu benar adanya, manuver politik yang dilakukan Jokowi dapat dijelaskan melalui skema reward and punishment. Robert Seidman dalam bukunya The State Law and Development, menjelaskan bahwa motivasi seseorang untuk melanggar aturan sebenarnya adalah kalkulasi matematis. Ketika si pelanggar menghitung

keuntungan dari ketidakpatuhannya lebih besar dari kepatuhannya, ia akan menilai tindakannya sebagai pilihan rasional.

Pada konteks Jokowi, sebagai kader PDIP, tentu ia dapat dikategorikan sebagai pelanggar apabila lebih mendukung Prabowo ketimbang Ganjar. Setidaknya ada dua keuntungan yang dapat dipetakan.

Pertama, mengutip tulisan Wahyudi Soeriaatmadja yang berjudul Jokowi leaning towards endorsing populist party chairman for Indonesia president: Analysts di The Straits Times, Jokowi merasa lebih nyaman dan aman.

Soeriaatmadja menyebut karir politik anggota keluarga Jokowi akan lebih aman jika mendukung Prabowo, daripada mendukung Ganjar yang berada di bawah bayang-bayang PDIP dan Megawati.

Selain itu, laporan Tempo juga menyebutkan hubungan Jokowi dan Megawati retak setelah deklarasi Ganjar sebagai bacapres PDIP. Jokowi disebut tidak dilibatkan dalam penentuan waktu deklarasi, serta masukannya soal cawapres tidak digubris Megawati.

Kedua, peluang menjadi Ketua Umum Partai Gerindra terbilang jauh lebih besar ketimbang menjadi Ketua Umum PDIP. Sebagai partai yang lekat dengan trah Soekarno, Jokowi akan

mendapat berbagai gelombang hantaman untuk menjadi suksesor Megawati.

Keuntungan kedua ini juga berkorelasi kuat dengan keuntungan pertama. Dengan menjadi Ketua Umum Partai Gerindra, dapat dikatakan Jokowi dapat menjamin karier politik keluarganya. Apalagi, anak bungsunya, Kaesang Pangarep, disebut akan maju di Pemilihan Wali Kota Depok 2024.

Selain keuntungan untuk Jokowi, deal ini bisa dikatakan juga sangat menguntungkan Prabowo. Keuntungan itu adalah mendapatkan suksesor. Tanpa diragukan lagi ketokohan Jokowi sangat luar biasa. Selalu menang pemilu, pengalaman memimpin yang luas, sangat populer, tingkat kepuasan masyarakat tinggi, dan memiliki pendukung yang militan.

Sebagaimana diketahui, usia Prabowo sudah tidak muda lagi. Mantan Danjen Kopassus kelahiran 17 Oktober 1951 itu telah menginjak usia 71 tahun. Ini hanyalah soal waktu sampai Prabowo harus mencari suksesornya.

Lahir pada 21 Juni 1961 atau masih berusia 62 tahun, Jokowi terbilang masih memiliki energi yang panjang. Dengan segala modal politik dan pengalamannya, Jokowi dapat menjadi Ketua Umum Partai Gerindra yang menjanjikan.

Selain soal usia, faktor penting lainnya adalah situasi Prabowo yang tidak sama dengan Megawati. Berbeda dengan Megawati yang anak-anaknya terjun di politik, anak satu-satunya Prabowo adalah seorang desainer. Sekalipun nantinya terjun ke politik, tentu sulit membayangkan Didit Prabowo untuk bisa langsung memimpin partai sebesar Gerindra.

Amankan Karir Politik Keluarga

Pengamat politik Djayadi Hanan mengungkapkan analisisnya soal dukungan Presiden Jokowi ke capres yang akan maju di 2024. Peneliti Harvard Kennedy School ini menyebut dukungan Jokowi condong ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto daripada ke Ganjar Pranowo yang merupakan capres PDIP.

Djayadi menilai Jokowi lebih nyaman memberikan dukungan ke Prabowo yang merupakan ketum partai dibanding Ganjar yang hanya petugas partai.

"Prabowo bukan hanya calon (presiden), tetapi juga ketua umum partai. Wajar jika Jokowi lebih nyaman memberikan dukungan untuk Prabowo. Ganjar hanya petugas partai. Kalau mau komitmen-sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan-harus bicara dengan Megawati," kata Djayadi Hanan dilasir The Straits Times, 27 Juni 2023.

Djayadi pun menyinggung pernyataan Mega yang menyebut Ganjar "petugas partai belaka" yang bertugas menjalankan program dan ideologi partai, dan ditugaskan untuk menjadi calon presiden.

Terlebih lagi, menurut Djayadi, Prabowo berkomitmen penuh mendukung karir politik anggota keluarga Jokowi. Diketahui ada tiga anggota keluarga Jokowi yang kini terjun ke politik.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kini menjabat Wali Kota Solo. Lalu, sang menantu, Bobby Nasution, sebagai Wali Kota Medan. Kemudian, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akan terjun dan menyatakan siap maju di Pemilihan Wali Kota Depok 2024.

Djayadi lantas memberikan sejumlah momen kedekatan Prabowo dengan keluarga Jokowi. Salah satunya pertemuan Prabowo dengan putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Prabowo disebut memberikan sinyal ke Gibran untuk bisa maju ke jabatan yang lebih tinggi.

Dyajadi juga menyinggung putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang menunjukkan rasa simpati ke Prabowo. Kaesang terlihat mengenakan kaos bergambar wajah Prabowo saat berkunjung ke festival budaya Indonesia di Ansan, Korea Selatan.

Ketika ditanya tentang kaos itu di postingan media sosial, Kaesang berkata kalau dirinya penggemar Prabowo. Menurut Dyajadi, ini adalah kedua kalinya Kaesang menarik perhatian media karena mengenakan kaos seperti itu.

Djayadi pun membeberkan momen kedekatan Jokowi dan Prabowo yang kompak hadir di laga timnas Indonesia vs Argentina. Jokowi dan Prabowo tampak duduk bersebelahan. Karena itu lah, Djayadi menilai karir politik anggota keluarga Jokowi akan lebih aman jika dia memihak Prabowo.

Djayadi juga mengatakan bahwa Jokowi mungkin tidak memberikan sinyal yang blak-blakan tentang dukungannya untuk Prabowo, tetapi publik akan memahami dengan sendirinya.

Analis politik Adi Prayitno menyampaikan hal yang sama dengan Dyajadi Hanan. Dia menyebut dalam beberapa kesempatan Jokowi memang telah menunjukkan jika ia nyaman dengan Prabowo. Fakta tersebut menurut Adi tidak dapat diabaikan.

"Jokowi melakukan tarian waltz dengan Prabowo. Dia telah menunjukkan dalam berbagai kesempatan bahwa dia nyaman dengan Prabowo. Kita tidak bisa mengabaikan fakta ini. Kalau Jokowi tidak dianggap baik, tidak dianggap penting oleh PDIP terkait (keputusan seputar) Pilpres 2024, waltz ini mungkin akan berlanjut," ujarnya.

Menurut Adi, hubungan antara Jokowi dengan Prabowo bukan sekadar antara presiden dengan menterinya. Dia melihat ada yang lebih spesial dalam hubungan kedua tokoh negara tersebut.

Hal tersebut terlihat dari Jokowi yang lebih seringnya Jokowi mengajak Prabowo menemaninya saat senggang, bahkan ikut meresmikan rumah sakit.

Adi mengatakan Jokowi sangat sering mengajak Prabowo bertemu hanya untuk sekadar makan bersama.

Dalam dunia politik, sambung dia, keakraban yang dimiliki oleh sosok pemimpin bisa menjadi sinyal atau kode kepada publik. Apalagi, 2023 sudah masuk dalam tahun politik menjelang pilpres mendatang.

"Karena di antara begitu banyak menteri, Prabowo lah yang paling sering diajak bicara. Prabowo lah yang sering diajak makan bareng, Prabowo lah yang sering diajak ke mana-mana," ujar Adi.

Menurut Adi, hal itulah yang membuat pandangan publik berspekulasi bahwa Prabowo telah mendapatkan dukungan dari Jokowi. Bahkan, pada saat Hari Lahir ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Solo pada 23 Juni 2023, Prabowo hadir dengan menggandeng Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming.

Adi menganggap, hal itu semakin menegaskan kode dukungan dari Jokowi kepada Prabowo melalui Gibran dalam acara PMII tersebut. "Jadi hubungan Jokowi dengan Prabowo ini sangat spesial," ucap Adi.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, mengatakan, Presiden Jokowi belakangan ini terlihat lebih besar memberikan porsi dukungannya kepada Prabowo.

"Saya rasa, porsi yang banyak muncul sekarang memang kelihatan gestur Pak Jokowi lebih banyak memberikan dukungan ke Prabowo," kata Ari Nurcahyo kepada wartawan, Kamis, 27 Juli 2023.

Porsi besar dukungan yang diperlihatkan Presiden Jokowi kepada Prabowo belakangan ini memang menjadi perhatian publik. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan kerja yang dilakukan Presiden Jokowi bersama dengan Prabowo ke Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Selain belakangan sering mengajak Prabowo dalam rangka kunjungan kenegaraan, Presiden Jokowi kerap memanggil Prabowo ke Istana Negara. Melihat kedekatan antara Presiden Jokowi dan Prabowo, hal itu menampilkan kepada masyarakat bagaimana mesranya hubungan kedua tokoh politik itu yang pada Pilpres 2019 bertarung sengit.

Karenanya, Ari meyakini, Prabowo saat ini telah bertransformasi menjadi salah satu capres potensial untuk memimpin Indonesia ke depan. Tak sekadar potensial, Prabowo juga memiliki komitmen untuk melanjutkan kerja-kerja pemerintahan Presiden Jokowi. "Pak Prabowo yang dulu kompetitor, sekarang bergabung dan punya komitmen untuk melanjutkan program Pak Jokowi," ujarnya.

Sementara, analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai kalau manuver-manuver yang dilakukan Jokowi selama ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah langkah untuk membuat sebuah momentum. Apa yang dilakukan Jokowi selama ini tentu akan menguntungkan Prabowo Subianto dan akhirnya meningkatkan elektabilitas ketua Partai Gerindra tersebut.

Pengamat Politik Djayadi Hanan

Tak hanya soal kedekatannya dengan Prabowo Subianto, langkah Jokowi saat memilih Budi Arie jadi menteri hingga kunjungan Budiman Sudjatmiko ke rumah Menteri Pertahanan juga jadi manuver orang nomor satu di republik ini.

"Kemudian bagaimana dengan Pak Prabowo, inikan KIJ, Koalisi Instruksi Jokowi. Jadi terserah Jokowi saja. Jadi begini kita lihat manuver Pak Jokowi belakangan ini kalau dalam disertasi saya, disebut creating momentum," kata Hensat dalam diskusi daring di PKS TV bertajuk Indonesia Leaders Talk: Jadi Siapa Wakil Anies? dikutip Minggu, 30 Juli 2023.

"Dia (Jokowi) sedang memper-

> **Jokowi melakukan tarian waltz dengan Prabowo. Dia telah menunjukkan dalam berbagai kesempatan bahwa dia nyaman dengan Prabowo. Kita tidak bisa mengabaikan fakta ini.**

siapkan momentum untuk Pak Prabowo. Dimulai dari pak Effendi Simbolon, kemudian Budi Arie jadi menteri. Hingga Budiman Sudjatmiko mengunjungi Pak Prabowo," sambungnya.

Hensat juga menilai bahwa kunjungan Budiman Sudjatmiko ke rumah Prabowo Subianto beberapa waktu lalu mungkin atas arahan 'Istana'. Menurutnya, tidak mungkin Budiman Sudjatmiko datang sendiri mengetok pintu Prabowo.

"Kenapa saya katakan mungkin dari Istana? Karena pertemuan itu yang menyambut satu partai, seorang Budiman Sudjatmiko datang berkunjung ke rumah Prabowo Subianto. Yang menyambut itu pengurus Partai Gerindra lengkap, Ketua dan Sekjen. Jadi sangat tidak mungkin kalau tidak ada arahan," terangnya. ●

PRABOWO DAPAT RESTU, BARISAN JOKOWI MENDEKAT

Prabowo Subianto kini menikmati tingginya angka elektabilitas dan banyaknya dukungan dari partai politik di barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.

Pada 13 Agustus 2023, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas oleh Partai Gerindra dan PKB pada Agustus 2022. PAN dan Golkar pun mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024-2029 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hadir dalam acara tersebut.

Sebelum Partai Golkar dan PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi yang pertama berkoalisi dengan Partai Gerindra. KKIR diteken kedua partai politik pada satu tahun yang lalu.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade bersyukur Partai Golkar, PAN, serta PBB ikut bergabung dengan Partai Gerindra dan PKB dalam koalisi partai pengusung Prabowo Subianto sebagai capres Pilpres 2024. Dia menyebut, semua partai koalisi akan segera membahas rencana strategi pemenangan Prabowo.

"Setelah ini (usai Golkar dan PAN deklarasikan dukungan), kita akan lanjutkan langkah konsolidasi seluruh partai anggota koalisi ini untuk bergerak cepat memenangkan Pak Prabowo," kata Andre.

Koalisi pengusung Prabowo yang bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), awalnya dibentuk oleh Partai Gerindra bersama PKB. Akhir bulan lalu, PBB ikut bergabung.

Andre menjelaskan, konsolidasi partai-partai anggota KKIR akan dilakukan di semua tingkatan pengurus partai, mulai dari konsolidasi di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan daerah (DPD), hingga dewan pimpinan cabang (DPC). Hasil konsolidasi itu akan ditindaklanjuti dengan sejumlah kegia-

tan teknis seperti menggelar pertemuan bersama ataupun membuat sekretariat bersama (sekber).

Andre menambahkan, partai anggota koalisi juga akan membahas kemungkinan safari politik Prabowo ke kantor DPD dan DPC setiap partai. Sementara rencana pemenangan dibahas, penentuan kursi cawapres juga akan tetap berjalan.

"Sembari konsolidasi partai-partai koalisi berjalan, kita juga akan membahas bersama-sama penentuan cawapres," katanya.

Andre mengatakan, walau syarat pencalonan Prabowo sudah cukup dengan lima partai tersebut, Gerindra masih membuka pintu buat partai lain untuk bergabung.

"Tentunya pintu kerja sama politik tetap terbuka bagi partai manapun yang belum menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Karena Prabowo berulang kali menegaskan bahwa politik yang dijalani adalah politik persatuan yang damai, santun, dan sejuk," kata Andre.

Andre menyebut dalam waktu dekat, partai baru, yakni Partai Gelora, kemungkinan juga akan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo. Selain itu, ada juga sinyal dari partai nonparlemen lainnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga ingin mendukung Prabowo.

"Ini momentum untuk melanjutkan keberhasilan dari Pak Jokowi dan kita butuh sosok yang mengerti kondisi sekarang ini dan tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan ke depan. Dan itu ada pada sosok Pak Prabowo," ujar Andre.

Hal sen- ada

disampaikan Partai Golkar soal langkah lanjutan yang akan dilakukan partai berlogo pohon beringin itu untuk memenangkan Prabowo. "Kita sedang konsepkan kerja lanjutnya untuk ke tingkat akar rumput," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Syaiful Huda, mengatakan, bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam KKIR tentu akan memperbesar peluang Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun, dia mengakui bahwa keterlibatan Golkar dan PAN masih sangat awal, sehingga butuh pembahasan terkait detail kerja sama supaya KKIR benar-benar solid.

"Kalau dari piagam kerja sama yang kita tandatangani saat ini hanya menyebutkan bahwa Gerindra-PKB menerima Golkar-PAN sebagai rekan koalisi. Belum ada detail-detail terkait hak dan kewajiban para pihak termasuk bagaimana pola pengambilan keputusan penentuan capres-cawapres yang akan diusung," kata Huda.

Menurut Huda, semua partai anggota KKIR benar-benar harus menjadikan target memenangkan Pilpres 2024 sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk ketika menentukan cawapres. Hal ini penting dilakukan supaya pengalaman kelam masa lalu tidak terulang, yakni Prabowo kalah berturut-turut dalam Pilpres 2014 dan 2019.

"Jadi pertimbangannya harus benar-benar peluang menang. Tidak sekadar jumlah kursi di parlemen, pasokan logistik, atau sekadar hasil survei. Tetapi benar-benar keseimbangan dari figur yang diusung, kekuatan logistik, hingga basis tradisional dukungan capres-cawapres yang akan diusung," ujar Huda.

Huda menegaskan, PKB tetap akan mengusung ketua umumnya, Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Prabowo. Tekad itu berlandaskan pada hasil Muktamar PKB di Bali beberapa waktu lalu.

"PKB telah berijtihad untuk mengusung Gus Imin dalam Pilpres 2024. Ijtihad ini didasari pada efek positif yang akan ditimbulkan bagi kemenangan PKB dan program unggulan untuk bangsa jika Gus Imin benar-benar maju serta menang dalam Pilpres 2024," katanya.

Presiden Joko Widodo menyatakan, deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto sebagai capres di 2024 merupakan urusan dari para partai politik.

"Ya, itu urusannya partai-partai lah. Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14

Agustus 2023.

Karena itu, menurut dia, tak perlu ada komunikasi dari para partai politik tersebut dengan dirinya dalam memutuskan arah dukungannya. Jokowi pun menegaskan, hal itu merupakan kerja sama dari partai politik tersebut yang tak ada kaitannya dengan dirinya.

"Ndak, ndak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerja sama. Saya bukan ketua partai. Saya Presiden," kata Jokowi.

Meskipun begitu, Jokowi menegaskan, posisi menteri di kabinet Indonesia Maju akan tetap aman meskipun partai politik koalisinya memberikan dukungan kepada capres yang berbeda.

Politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai keputusan partai beringin mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024 merupakan langkah yang bagus dan tidak ada masalah.

"Kalau Golkar sudah menentukan sikap, saya kira bagus, enggak ada masalah," kata Luhut.

Menurut Luhut, dengan keputusan itu, maka Partai Golkar tidak bisa mencalonkan kader partainya sebagai bakal capres maupun bakal cawapres. Sehingga, Partai Golkar harus berkonsentrasi di pemilu legislatif.

Menurut Luhut, hal itu akan mendorong kekompakan dalam tubuh Partai Golkar, sehingga partai itu bisa fokus mempertahankan atau meningkatkan jumlah perolehan kursi parlemen.

Direktur Eksekutif IndoStrategic, Ahmad Khoirul Umam

Sinyal Dukungan

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan, menilai mayoritas pemilih dari Partai Golkar lebih cenderung mendukung Prabowo Subianto dibandingkan Ganjar Pranowo. Hal tersebut sebagaimana yang terekam dalam survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga survei LSI Denny JA periode 3-15 Juli 2023.

"LSI Denny JA menunjukkan bahwa pemilih partai, pemilih Golkar, itu lebih cenderung memilih Pak Prabowo dibanding Pak Ganjar dan Pak Anies," kata Kacung.

Adapun dari data survei LSI Denny JA, para pemilih yang berasal dari partai berlambang beringin itu memberikan dukungan kepada Prabowo sebesar 62,9 persen. Sementara itu, dukungan yang diberikan kepada Ganjar berada di angka sebesar 35,3 persen.

Menurut Kacung, banyaknya pemilih Golkar yang mulai memberikan isyarat dukungan kepada Prabowo itu karena adanya kesamaan serta historis yang sudah terjalin di antara Golkar dan Prabowo.

"Jika saya lihat kesamaan, historis, antara Pak Prabowo dengan Golkar itu, memang lebih memungkinkan, para pemilih Golkar untuk lebih memilih Pak Prabowo dibandingkan dengan yang lain," ucap dia.

Kacung juga menyampaikan, elektabilitas kokoh Prabowo menjadi daya tarik partai politik pengusung menjelang Pilpres 2024. "Sekarang trennya naik, jadi itu juga yang membuat daya tarik bagi partai-partai yang lain untuk gabung ke Pak Prabowo," tutur dia.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran, Ari Ganjar Herdiansyah, menilai sosok Prabowo menjadi satu-satunya harapan Partai Golkar untuk menghindari perpecahan. Prabowo di anggap mampu memperjelas arah partai di Pilpres 2024, sekaligus menghindari perpecahan di internal partai beringin.

Menurut Ari, kedekatan dengan Menteri Pertahanan ini mampu memperjelas arah dan tujuan Golkar. Selain itu, juga bisa menyelamatkan Golkar dari ancaman permasalahan internal yang bisa lebih merusak.

Ari melihat, Golkar yang saat ini sedang dilanda masalah dan badai di tubuh partai dituntut untuk terus maju mengikuti kontestasi politik Indonesia di 2024. Prabowo menjadi angin segar bagi kader Partai Golkar lantaran membuat tujuan partai semakin jelas.

Ari Ganjar mengatakan, karena adanya permasalahan di internal membuat Golkar lebih memilih Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Merapat ke kubu Prabowo juga membuat Golkar memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilpres 2024.

Relawan Jokowi

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic), Ahmad Khoirul Umam, mengomentari PSI yang diperkirakan akan merapat untuk mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Menurut Khoirul, hal itu tidak lain karena adanya arahan dari Presiden Jokowi. Karena itu, PSI akhirnya berani bersikap menerima Prabowo.

"Sikap dan keputusan politik PSI yang semula mendukung Ganjar dan kini cenderung mendukung Prabowo, besar kemungkinan atas sepengetahuan dan restu politik Jokowi," kata Khoirul.

Khoirul menilai, pergerakan yang dilakukan oleh PSI tidak terlepas dari banyaknya jaringan relawan Jokowi pada Pilpres 2019, yang kini berbalik mendukung pencalonan Prabowo.

Dia menyebut, langkah politik yang diambil PSI semakin menguatkan bahwa jaringan politik Jokowi kian solid mendukung Prabowo pada Pilpres 2024.

"Sikap PSI ini mempertegas bahwa sel-sel politik di lingkaran Jokowi semakin solid berkumpul ke kubu Prabowo," ucap dosen Universitas Paramadina tersebut.

Menurut Khoirul, semakin solidnya dukungan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar Presiden Jokowi terhadap Prabowo, kian mengisyaratkan sebagai bentuk perlawanan secara terbuka kepada mesin politik Ganjar Pranowo yang sudah diusung terlebih dahulu diusung PDIP.

Ancaman PDIP

Pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menilai dukungan Partai Golkar, PAN, dan PKB kepada Prabowo Subianto mengubah peta koalisi Pemilu 2024. Selama ini, Partai Golkar identik dengan PDIP, yang mengusung bakal capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.

Dengan dukungan dari Partai Golkar, PAN, dan PKB untuk Partai Gerindra tersebut, menurut dia, maka perubahan yang terjadi akan signifikan. Koalisi yang mengusung Prabowo sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024 saat ini mencapai 46 persen kursi di parlemen.

Dengan kondisi tersebut, PDIP harus benar-benar mengoptimalkan penunjukan tokoh sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. Merapatnya tiga partai ke Gerindra itu akan menjadikan kontestasi Pemilu 2024 lebih berimbang.

"Tapi, memang di sisi lain, menurut saya, pertarungan makin berimbang karena sampai saat ini Anies Baswedan juga masih belum clear. Anies baru didorong oleh Partai NasDem," katanya.

Dia menambahkan, langkah politik Partai Golkar dengan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto itu merupakan kejutan besar, mengingat sebelumnya partai berlambang pohon beringin itu masih mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.

"Iya (ini kejutan). Kalau sekarang, Airlangga sudah menyadari bahwa dia dengan Partai Gerindra dan secara perolehan suara (Pemilu) 2019, Partai Gerindra lebih baik dari Partai Golkar," jelasnya.

Peta koalisi politik saat ini, menurut Wawan, sudah berubah dan tidak lagi sesuai dengan koalisi yang ada dalam pemerintahan saat ini. Koalisi yang terjadi menggambarkan apa yang akan ada pada pemerintahan ke depan usai Pemilu 2024.

"Artinya, koalisi sekarang sudah tidak dihitung lagi. Itu menunjukkan bahwa apa bedanya ketika Partai NasDem mencalonkan Anies," ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, menilai keputusan PAN dan Golkar merapat ke Partai Gerindra untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto karena merasa PDIP terlalu arogan.

Najmuddin menyebut sering telontar dari elite PDIP sikap terlalu percaya diri karena sudah memiliki 20 persen kursi. Sehingga, dapat mengusung pasangan capres tanpa berkoalisi dengan partai lain.

"Megawati terlalu percaya diri dengan PT yang ia miliki yakni 20 persen. Dan pola komunikasi elite-elite PDIP terlalu arogan, sehingga terkesan meremehkan rekan koalisinya," kata Najmuddin, Senin, 14 Agustus 2023.

Fakta tersebut menurut Najmuddin terbaca oleh Prabowo. Sehingga Menteri Pertahanan itu berhasil membujuk PAN dan Golkar bersedia bergabung mendukungnya. Ada lagi partai non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga baru-baru ini mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Masuknya PAN dan Golkar membuat sebagian partai pendukung pemerintahan Joko Widodo kini bersama Prabowo.

Najmuddin menilai situasi ini dapat menyebabkan kerisauan buat Jokowi. Di satu sisi, Jokowi ingin partai pendukungnya bersama-sama mendukung capres PDIP, Ganjar Pranowo.

"Jokowi sekarang berada dalam kegalauan, di satu sisi beliau petugas PDIP, di sisi lain potensi Ganjar untuk menang tipis," ujar Najmuddin.

Najmuddin menilai Jokowi memang tidak terlalu total mendukung Ganjar karena Megawati dan PDIP terlalu mengeksklusifkan diri. Sehingga membuat tidak nyaman partai lain untuk bergabung.

Sedangkan, Jokowi berkeinginan capres yang ia dukung berhasil menang karena ada banyak kepentingan politik yang harus dia amankan pasca-lengser 2024 nanti. Sehingga, Najmuddin menilai Jokowi bermain dua kaki antara Ganjar dan Prabowo. Sehingga Jokowi tidak bereaksi ketika PAN dan Golkar mendukung Prabowo.

"Saya melihat Jokowi mengalami kegalauan dari sikap parpol pendukung yang beralih untuk mendukung Prabowo. Menurut saya ini juga indikasi pimpinan tiga parpol akan menarik kadernya di kursi kabinet. Ini berbahaya buat Jokowi," sambungnya.●

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan

PECAH KONGSI RELAWAN JOKOWI

Dinamika politik menuju Pilpres 2024 diwarnai dengan terbelahnya suara dukungan pendukung Presiden Jokowi. Elemen pendukung Jokowi, termasuk relawan, pecah kongsi soal dukungan ke dua bakal capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli, tak menafikan kondisi tersebut. Dia menyinggung hal itu karena diduga ada strategi pemecah belah dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Guntur menuturkan upaya itu agar pendukung Jokowi mendukung Prabowo sebagai capres di 2024. Mantan Danjen Kopassus itu diduga melakukan upaya 'adu domba' ke pendukung Jokowi.

Dia mengaku teringat dengan potongan pidato Prabowo soal strategi perang yang sempat heboh dan viral beberapa tahun lalu. "Masih ingat kan dulu Prabowo pernah pidato soal strategi perang, rampoklah tetanggamu yang kebakaran/kesusahan," kata Guntur, Senin, 7 Agustus 2023.

Guntur menyoroti pecah belah Prabowo itu dengan sengaja menciptakan kegaduhan di kubu lawan. Kata dia, dengan cara itu, Prabowo bisa menguasai lalu menang. Menurut dia, strategi Prabowo itu dipakai jauh sebelum datang ke markas PSI, 2 Agustus 2023.

Ia heran dengan sikap politik PSI yang mesra dengan Prabowo. Padahal, PSI sejak Oktober 2022 sudah menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Dia juga menyinggung berubah haluan sikap eks relawan Ganjar Pranowo yaitu Immanuel Ebenezer alias Noel yang kini mendukung Prabowo. Lalu, ia juga menyoroti sinyal dua politikus senior PDIP yaitu Budiman Sudjatmiko dan Effendi Simbolon yang melempar kode mendukung Prabowo nyapres. Padahal, PDIP sudah jelas mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar jadi bakal capres.

"Jauh sebelum itu, rekrut Noel, Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon dan lain-lain. Kemudian, baru PSI," se-

but Guntur.

Sebelumnya, usai pertemuan Prabowo dengan PSI, Guntur Romli yang juga menjabat sebagai ketua Ganjarian Spartan, relawan pemenangan Ganjar untuk Pilpres 2024, menyatakan keluar dari partai.

"Saya menyampaikan suatu hal berat bagi saya, terkait relasi saya dan kawan kawan saya dan PSI saya anggap rumah politik saya. Mulai hari ini saya keluar dari PSI sebagai anggota dan kader Partai PSI," kata Guntur Romli.

Sikap Guntur, kemudian diikuti oleh kader PSI lain yang memiliki afiliasi dukungan kepada Ganjar. Mereka adalah Dwi Kundoyo dan Estugraha yang mundur dari keanggotaan partai dan proses pendaftaran calon legislatif untuk menuju kursi DPRD DKI Jakarta.

"PSI saya anggap sudah main mata dengan Prabowo Subianto. Kehadiran Prabowo ke DPP PSI yang disambut hangat, buat saya sudah mencederai semangat dan pandangan perjuangan saya selama ini," kata Dwi Kundoyo.

> **Kalau dilihat dari sepak terjang para pendiri Cokro, kayaknya sering deh. Saya dan teman-teman Cokro sering mengkritik PDIP. Perdebatan saya sama Trimedya Panjaitan ada di ILC dan itu viral sejak lama.**

Selain di tubuh PSI, para pembawa acara Cokro TV juga mulai saling mengkritik satu sama lain. Sebelumnya, Ade Armando keluar dan membantah bahwa telah mendukung Prabowo. Hal itu kemudian dibantah oleh Eko Kuntadhi, salah seorang pendiri Cokro TV.

Eko menilai alasan Ade tak bisa mengkritik PDIP di Cokro TV terlalu mengada-ada. Eko memberi contoh dalam sejumlah acara talkshow di televisi, dirinya kerap melontarkan kritik kepada kader-kader PDIP.

"Kalau dilihat dari sepak terjang para pendiri Cokro, kayaknya sering deh. Saya dan teman-teman Cokro sering mengkritik PDIP. Perdebatan saya sama Trimedya Panjaitan ada di ILC dan itu viral sejak lama," kata Eko dikutip dari Tirto, Senin, 7 Agustus 2023.

Dirinya menegaskan bahwa kanal Youtube-nya tidak akan membuka kesempatan untuk mendukung Prabowo Subianto, sebagaimana yang dilakukan oleh Ade Armando ataupun PSI. "Jadi bukan tidak boleh mengkritik. Karena sejak Cokro didirikan dulu kami adalah kelompok yang nggak setuju dengan orang seperti Prabowo menjadi presiden," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Joko Widodo, Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan, telah terjadi pertemuan antar relawan Jokowi pada pertengahan Juli lalu di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan. "Saya hadir, ada Budi Arie (Ketum Projo), Immanuel Ebenezer (Ketum Jokowi Mania), dan tokoh relawan Jokowi lainnya," kata Andi.

Andi mengaku bahwa dia membawa organ relawannya untuk ikut mendukung Ganjar bersama PDIP. Namun, dia tak menampik bahwa ada organisasi relawan Jokowi lain yang mendukung Prabowo.

"Perbedaan menurut saya adalah hal yang luar biasa dalam demokrasi. Saat ini memang ada organ relawan yang menyatakan diri mendukung Ganjar termasuk saya dan ada juga yang mendukung Prabowo," ujarnya.

Mereka menyadari bahwa ada perbedaan di antara para relawan soal dukungan di Pilpres 2024. Meski berbeda, Andi Gani dan ketua relawan lainnya sepakat untuk bersatu di tengah perbedaan yang ada.

"Tidak ada friksi karena semua pimpinan relawan Joko Widodo telah dewasa dalam menghadapi perbedaan," klaimnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan bahwa fenomena dukungan atau penolakan relawan Jokowi kepada Prabowo adalah hal biasa. Namun, dia menegaskan bahwa tak bisa memaksa orang untuk ikut memilih Prabowo dan memilih untuk menghargai setiap perbedaan.

"Kami tidak bisa memaksa orang untuk senang dengan Pak Prabowo," kata Habiburokhman.

Sementara itu, PDIP tidak ambil pusing terkait manuver relawan Jokowi yang mengarahkan dukungan ke Prabowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan bahwa partainya masih memiliki komunikasi yang intens dengan Jokowi dalam membahas soal capres dan dukungan kepada Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Kawendra Lukistan, menepis narasi Guntur soal Prabowo adu domba hingga pemecah belah pendukung Jokowi. Pihaknya selalu mengimplementasikan politik praktis dengan cara benar.

"Yang jelas, kami di Gerindra tidak pernah diajarkan berjuang menggunakan cara-cara yang tidak baik," tutur Kawendra.

Dia bilang Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan fokus bekerja membantu Presiden Jokowi secara optimal. Bagi Kawendra, masyarakat saat ini semakin hari paham karakter Prabowo yang berjuang secara tulus ikhlas untuk bangsa dan negara. Sejumlah pendukung Jokowi yang 'merapat' ke Prabowo karena tergerak jadi bagian dari perjuangan.

"Bila kemudian ada yang tergerak untuk menjadi bagian dari perjuangan, tentu kami sambut dengan tangan terbuka dan senyuman," ujarnya.

Kendali Jokowi

Peneliti senior dari Populi Center, Usep S Ahyar, menuding ketidaktegasan Jokowi soal pilihan capres menjadi penyebab timbulnya friksi di antara para relawannya. Hingga akhirnya mereka terbelah antara memilih Ganjar atau Prabowo.

Jokowi yang selalu menampilkan gestur mendukung Prabowo, tapi tetap satu arahan dengan PDIP menimbulkan banyak persepsi di antara pendukungnya. Sehingga memilih Ganjar atau Prabowo adalah dua hal yang sama yaitu menjadi barisan dalam Jokowi.

"Pak Jokowi itu banyak ditafsir melalui sikapnya. Kalau sikapnya ke PDIP sudah jelas karena dia kader dan telah memberinya tiket sejak di Solo hingga maju Pilpres dua putaran. Akan tetapi dengan Pak Prabowo dia juga sering mengumbar kemesraan, bahkan dalam kegiatan non pertahanan, Prabowo juga sering diajak Jokowi," kata Usep.

Usep melihat bahwa dalam permainan politik ini bukan hanya dikendalikan oleh Jokowi. Namun, Prabowo dan Ganjar yang juga ikut berdansa dengan gaya-gaya tarik ulur politik Jokowi. Bahkan, Prabowo yang diberi kesempatan oleh Jokowi kemudian langsung memanfaatkan keadaan. Dia langsung berkunjung ke Kantor DPP PSI, walaupun dalam kunjungan tersebut tidak menghasilkan dukungan atau deklarasi Prabowo sebagai capres.

"Saya kira itu kecerdasan dari Pak Prabowo. Bahkan, Pak Prabowo juga mendekati anak Pak Jokowi, kemudian memanfaatkan kedekatan dan mengkapitalisasi kedekatan dengan Pak Jokowi," ujarnya.

Dia menyebut PDIP harus waspada dengan fenomena keretakan relasi di internal relawan Jokowi yang kemudian banyak menyorot ke Prabowo. Menurutnya, apabila PDIP tidak solid, tidak dapat ditutupi ada banyak orang yang dahulu mendukung Jokowi akan beralih ke Prabowo.

"Agar tidak terjadi split ticket, harus ada konsolidasi partai politik. Kalau konsolidasi partai politik kurang bagus, maka ada banyak kader dan pendukungnya yang bocor," ujarnya.

Prabowo Subianto diketahui sering melakukan pertemuan dengan relawan, bahkan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dinilai menjadi sebuah sinyal dukungan kuat jelang Pilpres 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin,

diterimanya Prabowo di lingkup relawan Jokowi dan Gibran mengisyaratkan dukungan penuh bagi Menteri Pertahanan tersebut.

"Ini adalah bentuk sinyal dukungan restu Jokowi kepada Prabowo," kata Ujang, Jumat, 11 Agustus 2023.

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar Jakarta ini, keakraban dan kebersamaan yang diperlihatkan relawan Jokowi dan Gibran kala bertemu dengan Prabowo menandakan hal positif menuju Pilpres 2024.

Ia juga meyakini Prabowo terus didorong oleh keluarga besar Presiden Jokowi untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia selanjutnya. "Saya melihat soal Prabowo joget dengan relawan Gibran dan Jokowi ya ini merupakan bentuk keakraban dan dukungan Jokowi dan keluarga Jokowi kepada Prabowo," tutur Ujang.

Masyarakat menilai kedekatan ini mencirikan adanya sinyal dukungan yang kuat. Hal itu perlahan-lahan berimbas pada elektabilitas Prabowo.

Ujang meyakini intensnya pertemuan Prabowo dengan relawan Jokowi dan Gibran, serta Prabowo dengan Gibran di beberapa kesempatan, semakin menguatkan adanya restu Presiden Jokowi kepada Prabowo jelang kontestasi Pilpres mendatang.

Pernyataan Presiden Jokowi yang membolehkan Gibran Rakabuming menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024 juga memunculkan spekulasi politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, berpandangan, sikap Jokowi tersebut menandakan dirinya semakin cenderung mendukung Prabowo Subianto. Pasalnya, beberapa waktu belakangan Prabowo semakin akrab hingga sempat satu mobil bareng Wali Kota Surakarta itu.

"Gibran menjadi penanda terkuat dukungan Jokowi pada Prabowo, ikut terlibat dalam agenda politik Prabowo, dan tidak pernah menyatakan Jokowi mendukung Ganjar. Ini cukup jelas jika PDIP sebenarnya sedang dibuat lunglai oleh Jokowi," kata Dedi.

Di sisi lain, sikap Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga tak menyoal kedekatan Prabowo dengan Gibran yang satu mobil bareng, semakin tegas menunjukkan bahwa PDIP sudah siap berseberangan dengan Jokowi pada Pilpres 2024.

"Tidak ada pilihan, PDIP sebenarnya sudah siap akan dikhianati Jokowi," kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Terlebih, Jokowi sendiri tidak menggubris teguran PDIP ihwal kedekatannya dengan Menteri Pertahanan tersebut. "Karena sejak awal banyak agenda teguran PDIP yang diabaikan Jokowi. Misalnya soal relawan, Jokowi tetap berhubungan dan bermanuver, dan hari ini banyak diketahui jika Jokowi cenderung mengarah ke Prabowo," terangnya.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan, salah satu isu yang bisa memengaruhi kekuatan PDIP dengan Ganjar Pranowo adalah dukungan dari Joko Widodo.

Jamiluddin menyinggung isu dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto dengan menduetkan Gibran Rakabuming. Jika duet Prabowo-Gibran terwujud, maka akan berdampak buruk kepada PDIP.

"Karena itu, kalau Jokowi memberi dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran, maka suara PDIP akan turun drastis," kata Jamiluddin Ritonga.

Merosotnya elektabilitas PDIP bisa terjadi karena berkaca pada kemenangan PDIP pada 2014 dan 2019, banyak dibantu oleh suara pendukung Jokowi. Dalam situasi demikian, ada kemungkinan elektabilitas Ganjar akan turun, bahkan bisa kalah.

"Sebab, pendukung Jokowi dan Gibran akan menjauhi Ganjar dan PDIP," tutupnya.●

Mantan politisi PSI, Guntur Romli

MENCARI CAWAPRES TERBAIK

Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 sudah semakin dekat. Penentuan para calon wakil presiden masih belum pasti, meskipun sudah mendekati waktu pendaftaran, yakni Oktober 2023.

Di tengah sengitnya kompetisi di antara para calon presiden (capres), faktor cawapres dipandang dapat meningkatkan perolehan suara dalam pemilu. Mengapa penentuan cawapres terlihat lebih rumit dan lamban? Sosok cawapres seperti apakah yang kita butuhkan sebagai pemilih?

Pemilihan cawapres menjadi kompleks karena beberapa kondisi, di antaranya banyaknya veto players yang berpengaruh dan ikut terlibat dalam menentukan siapa yang akan diusung setiap partai di koalisi.

Jumlah veto players dalam setiap koalisi yang banyak memengaruhi lamanya waktu pengambilan keputusan terkait cawapres. Veto player yang banyak itu tentu juga mempunyai kepentingan politik (political interest) yang beragam, sehingga penentuan cawapres menjadi rumit. Padahal, dari sisi politik dan ekonomi, proses yang lama tersebut menciptakan ketidakpastian, tidak hanya bagi pemilih dan kandidat, tetapi juga prospek investasi ke depan.

Dibandingkan dengan cawapres, veto player dalam penentuan capres lebih sedikit. Misalnya, veto player dalam penentuan capres dari PDIP (Ganjar Pranowo) adalah Megawati Soekarnoputri. Untuk capres dari Gerindra (Prabowo Subianto), veto player adalah Prabowo Subianto sendiri. Sementara, untuk capres Anies Baswedan, para veto players-nya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Surya Paloh, dan Salim Segaf Al-Jufri.

Selain veto players, persyaratan pencalonan para calon anggota legislatif (caleg) untuk 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional, juga menyumbang kerumitan. Persyaratan yang tinggi tersebut membuat partai-partai saling mengunci, dan ketergantungan ke partai lain menjadi tinggi. Pada akhirnya, koalisi tidak lagi dibentuk karena kesamaan platform dan program, tetapi hanya untuk memenuhi ambang batas pencalonan.

Oleh:Arya Fernandes
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS

Pola penentuan

Kekuatan politik (dukungan partai) dan elektoral para cawapres yang relatif sama dan lebih berimbang di antara nama-nama yang ada (Sandiaga Uno, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Andika Perkasa), juga menyulitkan bagi koalisi yang ada untuk menentukan pilihan.

Dalam kasus pemilu presiden di Indonesia, pimpinan partai masih menjadi veto player untuk menentukan cawapres dibandingkan dengan capres. Hal itu, misalnya, tampak dari kesepakatan partai-partai di menit akhir menjelang pendaftaran saat memutuskan Ma'ruf Amin sebagai cawapres Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Jauh sebelumnya, hal yang sama juga terjadi dalam pemilu-pemilu di Amerika Serikat, di mana pemilihan wapres awalnya juga sangat bergantung pada pimpinan partai. Pada Pemilu 1940, saat Presiden Franklin Delano Roosevelt mencalonkan diri untuk periode ketiga, ia memilih Henry Wallace, Menteri Pertanian, sebagai cawapres menggantikan John Nance Garner yang tidak dia sukai (Sigelman dan Wahlbeck, 1997).

Dengan popularitas yang tinggi, hingga kini Roosevelt adalah satu-satunya presiden AS yang menjabat lebih dari dua periode. Dalam perkembangannya, Barrack Obama, misalnya, membentuk sendiri tim untuk memilih Joe Biden sebagai cawapresnya. Inovasi yang hampir serupa dilakukan oleh koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS, dengan memberikan kesempatan kepada capres untuk menentukan cawapres. Namun, tampaknya dalam proses penentuannya faktor ketua umum partai koalisi masih terlihat dominan.

Model pasangan

Hukum besi pencarian tiket cawapres biasanya mempertimbangkan balancing the ticket, baik perimbangan dari sisi geografi, demografi, usia, maupun ideologi. Model-model ini, misalnya, tidak hanya terjadi di AS yang juga menganut sistem presidensial, tetapi juga diadopsi di Indonesia dalam kombinasi model pencalo-

nan pada pilpres dan pilkada.

Namun, belakangan studi Sigelman dan Wahlbeck (1997) yang meneliti model pencalonan wakil presiden sejak Pemilu 1940 sampai 1996 menemukan tiga faktor yang signifikan memengaruhi penentuan cawapres. Tiga faktor itu adalah jumlah pemilih pada negara bagian asal cawapres, keberimbangan usia cawapres, dan apakah cawapres pernah jadi kompetitor dalam konvensi di partai.

Tiga faktor di atas lebih signifikan dalam menjelaskan pola penentuan cawapres dibandingkan keberimbangan geografi (Utara, Selatan, Barat), dan ideologi (konservatif atau liberal).

Di Indonesia model-model keberimbangan politik dalam menentukan cawapres juga dilakukan, meskipun dalam pemilu terakhir pendekatannya mulai berubah. Faktor kekuatan politik petahana memengaruhi pendekatan yang dipilih dalam penentuan cawapres (Jefferson & Fernandes, 2023).

Pada periode pertama kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi mempertimbangkan faktor keberimbangan secara geografi dengan memilih Jusuf Kalla yang berasal dari luar Pulau Jawa sebagai cawapres. Sementara pada periode kedua (baik SBY atau Jokowi), saat presiden petahana sudah kuat, ada kecenderungan petahana tak lagi mempertimbangkan faktor keberimbangan secara geografi, tetapi lebih mengedepankan aspek stabilitas politik dan ekonomi.

Pada periode kedua, Presiden SBY memilih Boediono yang sama-sama berasal dari Pulau Jawa. Sementara Presiden Jokowi memilih Ma'ruf Amin yang juga berasal dari Pulau Jawa sebagai cawapres untuk mendapatkan suara dari pemilih Nadhlatul Ulama.

Model lain, yaitu keberimbangan dari sisi demografi, juga terjadi saat Prabowo memilih Sandiaga Uno yang lebih muda darinya sebagai cawapres untuk mendapatkan dukungan dari pemilih muda.

Model lain, yaitu keberimbangan dari sisi demografi, juga terjadi saat Prabowo memilih Sandiaga Uno yang lebih muda darinya sebagai cawapres untuk mendapatkan dukungan dari pemilih muda.

Apakah model-model kombinasi tersebut masih relevan menjelaskan politik Indonesia ke depan? Level kompetisi akan memengaruhi apakah partai-partai masih mengadopsi model keberimbangan. Dalam kompetisi yang ketat seperti saat ini, keberimbangan geografi (Jawa dan luar Jawa), ideologi (Islamis dan nasionalis), serta sipil-militer, sepertinya tidak menjadi pertimbangan utama.

Dalam kondisi sekarang, faktor jumlah pemilih pada provinsi besar di Pulau Jawa dan basis politik cawapres akan menjadi penentu, selain faktor lain seperti usia. Dengan kompetisi yang ketat, partai atau kandidat akan melirik cawapres yang kuat di tiga provinsi utama di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) serta merepresentasikan keberimbangan dari sisi usia.

Dengan jumlah pemilih muda di bawah 40 tahun diprediksi akan mencapai 60 persen (CSIS, 2023), faktor cawapres yang dapat mengambil suara dari pemilih muda juga akan diperhitungkan.

Dalam situasi politik yang kompetitif dan multipartai, partai atau kandidat dapat menggunakan sejumlah pendekatan untuk mengidentifikasi penentuan cawapres. Basis penentuan tentunya beranjak pada aspek peluang kemenangan, stabilitas politik, wajah kabinet, dan daya tarik bagi pemilih.

Pertama, faktor stabilitas politik internal. Koalisi partai tentu perlu mempertimbangkan apakah penentuan cawapres akan menciptakan instabilitas internal atau tidak. Memilih cawapres yang tidak berpotensi mendapatkan penolakan internal tentu baik untuk menjaga soliditas koalisi.

Kedua, pertimbangan risiko politik. Bagi partai-partai di koalisi pemerintahan, pemilihan cawapres tentu akan memengaruhi hubungan partai dengan Jokowi. Sementara bagi koalisi non-pemerintahan, penentuan cawapres perlu mempertimbangkan apakah cawapres punya potensi risiko secara hukum.

Ketiga, faktor keunggulan kompetitif. Dalam kompetisi yang ketat, cawapres yang dapat memberikan nilai tambah bagi peluang kemenangan kandidat tentu akan mendapatkan prioritas dicalonkan, terutama kandidat yang kuat di tiga provinsi besar di Pulau Jawa.

Usulan

Dengan situasi dan tantangan ke depan yang semakin kompleks, koalisi partai perlu memikirkan secara serius siapa yang akan menjadi cawapres.

Faktor potensi kemenangan tentu akan jadi prioritas, tetapi hal yang penting lainnya adalah kemampuan bekerja sama dan pengalaman. Cawapres yang memiliki pengalaman di sektor ekonomi dan isu-isu strategis lainnya tentu bisa diperhitungkan mengingat situasi ekonomi ke depan yang masih belum sepenuhnya stabil.

Sementara untuk mengatasi problem kompleksitas penentuan cawapres karena tingginya ketidakpastian politik, perlu dipertimbangkan beberapa usulan strategis ke depan. Di antaranya, memberikan kewenangan bagi capres untuk dapat menentukan sendiri cawapresnya.

Dengan wewenang tersebut, capres dapat menentukan kebutuhan prioritas, memilih nama yang dapat bekerja sama bila terpilih, dan dapat mewujudkan agenda politiknya secara bersama.

Tentu akan ada trade off dalam proses penentuan cawapres, tetapi dengan adanya kewenangan bagi capres, capres lebih punya otoritas politik yang kuat.

Usulan kedua, terkait perlunya menurunkan syarat pencalonan presiden/wakil presiden dalam Pemilu 2029 ke angka 15 persen perolehan kursi di DPR. Hal tersebut memungkinkan partai lebih fleksibel menentukan mitra koalisinya berdasarkan platform dan potensi munculnya banyak calon menjadi terbuka, sehingga pemilih lebih banyak opsi pilihan.●

SUMSEL JADI LUMBUNG PANGAN NEGARA

Majunya sektor pertanian di Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru rupanya menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut jika Sumsel merupakan salah satu provinsi ujung tombak penyangga pangan di Tanah Air.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melibatkan Sumsel dalam gerakan nasional dalam menghadapi El nino yang diprediksi akan menyebabkan krisis pangan dunia.

"Sumsel sudah menjamin 2.000 ton beras untuk Indonesia. Ini sangat kita apresiasi dan kita harap Sumsel tidak hanya menjadi provinsi yang nyaman pangan di daerahnya, tapi juga penyangga pangan nasional," kata Syahrul saat meninjau Tanam Perdana Padi Gemas El Nino di Desa Pelabuhan Dalam, Kabupaten Ogan Ilir.

Tidak hanya itu, dia juga menantang Sumsel untuk menambah lahan tanam seluas 150 ribu hektare. "Saya optimis Sumsel mampu menambah 150 ribu hektare lahan tanam ini. Apalagi Sumsel ini tidak kekurangan dalam hal pertanian," terangnya.

Mentan menyatakan, Sumsel sudah memberi jaminan untuk berkontribusi dalam menghadapi dampak El nino.

"Kurang lebih 150 ribu hektare lahan di Sumsel ini bisa jadi eksisting yang akan menghasilkan pangan dan jadi lumbung bagi negara ini. Saya yakin Sumsel dapat menjadi pahlawan dalam hal pangan," bebernya.

Di sisi lain, Mentan menyebut jika sejauh ini stok beras di Tanah Air masih sangat aman dan terkendali.

"Untuk stok beras nasional saat ini sangat baik. Apalagi ke depan masih ada 800 ribu hektare sawah yang siap panen. Tapi kita tidak boleh juga terlalu percaya diri dan mengupayakan cadangan pangan dalam menghadapi El nino," paparnya.

Sebelumnya, Gubernur Herman Deru mengatakan, jika Sumsel sangat siap untuk menambah lahan tambah pangan seluas 150 ribu hektare untuk menghadapi dampak El nino.

"Kesanggupan ini tentu tidak han-

ya datang dari pemerintah, tapi juga semua unsur termasuk para petani. Sumsel tentu yakin ini akan berhasil. Kementan juga terus mendukung dengan berbagai hal, mulai dari bibit, alsintan dan lainnya. Kita harapkan ini dapat mengubah pola pikir petani, sehingga tidak selalu mengharapkan bantuan," ujarnya.

Diketahui, luas lahan baku sawah di Sumsel memiliki total 470.602 hektare. Rinciannya sawah irigasi seluas 75.798 hekatre, sawah tadah hujan 52.912 hektare, sawah pasang surut 214.454 hektare, dan sawah lebak 127.438 hektare.

Nilai Tukar Petani Naik

Meningkatnya produksi pertanian ternyata beriringan pula dengan naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Sumatera Selatan pada Juli 2023 naik 1,95 persen dibandingkan NTP bulan lalu, yaitu dari 103,60 menjadi 105,62.

Kurang lebih 150 ribu hektar lahan di Sumsel ini bisa jadi eksisting yang akan menghasilkan pangan dan jadi lumbung bagi negara ini.

Kepala BPS Sumsel, Wahyu Yulianto, mengatakan kenaikan NTP Juli 2023 dipengaruhi oleh kenaikan NTP yang cukup besar pada subsektor hortikultura yakni 2,12 persen dan Perkebunan 2,82 persen.

Sedangkan, NTP yang mengalami penurunan yaitu pada subsektor tanaman pangan sebesar 0,61 persen, peternakan 0,49 persen, perikanan 0,24 persen, perikanan tangkap 0,18 persen, dan perikanan budidaya 0,29 persen.

Sedangkan, untuk Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Sumatera Selatan Juli 2023 sebesar 105,15 atau naik 2,16 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Selain data NTP Juli, BPS Sumsel juga merilis data Impor migas Juni 2023 senilai USD0,96 juta, atau turun 83,25 persen dibandingkan Mei 2023, dan turun 45,64 persen dibandingkan Juni 2022.

Lalu, impor non migas Juni 2023 senilai USD45,01 juta, atau turun 49,06 persen dibandingkan Mei 2023, dan turun 51,56 persen dibandingkan Juni 2022.

Tiga negara pemasok barang impor terbesar Januari-Juni 2023 adalah Tiongkok USD154,35 juta (43,41 persen), Malaysia USD26,28 juta (7,39 persen), dan Thailand USD25,67 juta (7,22 persen). Nilai impor dari ASEAN pada Januari-Juni 2023 sebesar USD101,63 juta (28,58 persen) dan Uni Eropa USD40,56 juta (11,41 persen).

Neraca perdagangan Sumatera Selatan Juni 2023 juga mengalami surplus USD502,48 juta yang berasal dari sektor non migas USD458,93 juta, dan sektor migas sebesar USD43,55 juta.●

HERMAN DERU RAIH PENGHARGAAN ADHIKARYA NARAYA PEMBANGUNAN PERTANIAN

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kembali mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo berupa penghargaan Adhikarya Naraya Pembangunan Pertanian.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Herman Deru yang diwakili oleh Wakil Gubernur Mawardi Yahya di Istana Wakil Presiden, Senin, 14 Agustus 2023.

Penghargaan Adhikarya Naraya Pembangunan Pertanian yang diberikan kepada Herman Deru tersebut merupakan apresiasi atas kontribusi dan keberhasilan dalam mendukung strategi pencapaian peningkatan produksi pertanian.

Sumatera Selatan di bawah Kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya masuk lima besar terbaik se-Indonesia dalam bidang pembangunan pertanian sebagaimana yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian.

"Saat ini Sumatera Selatan masuk lima besar. Kami optimistis pada tahun selanjutnya Sumsel berada di posisi tiga besar se-Indonesia," kata Mawardi didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Bambang Pramono.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pujian kepada semua kepala daerah, termasuk Gubernur Sumsel yang telah sukses dalam pembangunan pertanian dan pelepasan ekspor komoditas pertanian.

Menurut Wapres, sektor pertanian pada tataran makro telah tumbuh positif secara konsisten. Produk beras pada 2022 mencapai 31,5 juta ton dan ekspor pertanian pada tahun yang sama berkisar Rp658 triliun.

Hal itu juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, di mana Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat meningkat yang merupakan cerminan kesejahteraan petani yang terus membaik.

Wapres juga memberikan tiga catatan untuk sektor pertanian. Pertama, meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian sebelum masa pandemi. Kedua, perlu upaya terintegrasi dari pusat hingga daerah untuk peningkatan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan. Ketiga, terus lakukan pendamping UMKM sektor pertanian agar dapat naik kelas untuk ekspor produk, akses pasar langsung, serta peningkatan kualitas produk dan konsisten produksi.

"Selamat dan sukses atas penghargaan yang telah diterima. Terima kasih atas dedikasi dan jerih payah bapak ibu sekalian. Jangan berhenti dan teruslah berkarya untuk kemajuan Indonesia agar Negara Republik Indonesia dapat terus dipandang besar di mata dunia. Terima kasih atas sumbangsih nya-

tanya untuk Indonesia," tutur Ma'ruf Amin.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo juga mengapresiasi langkah Gubernur Herman Deru yang begitu perhatian terhadap majunya sektor pertanian. "Pak Herman Deru merupakan gubernur yang sangat perform dan hebat memajukan sektor pertanian," ucap Syahrul.

Mentan menegaskan, kehadirannya di Sumsel dalam rangka kepentingan negara, atas nama Presiden Jokowi untuk meminta Gubernur Sumsel dan stakeholder terus memikirkan kepentingan bangsa. Terutama dalam mengatasi ancaman musim kemarau yang dipastikan akan berdampak pada Indonesia.

Mentan menambahkan dalam rakor bersama Gubernur Herman Deru, pihaknya sudah melakukan komitmen agar Sumsel menjadi booster kepentingan nasional.

"Alhamdulilah kami sudah mendapatkan komitmen, satu minggu ini akan kami rancangkan dan agenda aksi secara bertahap. Kami yakin Sumsel memiliki kemampuan," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyebut, prediksi kemarau tahun ini cukup panas, berbeda dengan dua tahun belakangan, sehingga khusus Sumsel di 10 kabupaten ada kewaspadaan ekstra terhadap antisipasi Karhutla.

"Dari tahun ke tahun kita siaga Karhutla. Alhamdulillah kita bisa terhindar dari dampak karhutla, bahkan masih ada daerah yang turun hujan, buktinya ada peningkatan produksi yang luar biasa. Bahkan 2022 kita surplus beras 743.014 ton," paparnya.

Herman Deru juga mengaku pihaknya sudah diingatkan Mentan bahwa Sumsel menjadi penyangga pangan nasional.

"Nah, rumusnya sudah diberikan Pak Menteri, antara lain menghadapi El Nino ini kita perbanyak fungsi embung untuk menjaga ketersediaan air dalam menjaga kelembapan tanah. Melibatkan kerja sama sama dengan pihak terkait. Mudah-mudahan bisa mencapai target yang diinginkan Pak Mentan surplus 1 juta ton beras," katanya.●

Festival Anjungan Dan Pekan Adat

DESTINASI WISATA BARU SUMATERA SELATAN

Berbagai kegiatan dan festival terus dikembangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan ekonomi dari sektor usaha kecil dan pariwisata. Salah satunya dengan menggelar Festival Anjungan dan Pekan Adat di Anjungan Dekranasda Jakabaring Palembang.

Kegiatan ini mendapat apresiasi yang cukup tinggi karena pelaksanaannya terus mengalami perbaikan dan mampu menarik minat masyarakat.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meminta Pekan Adat dan Festival Anjungan dapat lebih meningkatkan promosi usaha. Sehingga akan lebih menarik minat para pengunjung untuk datang ke Sumsel.

Herman Deru mengaku, dirinya merasa takjub melihat areal anjungan yang memiliki infrastruktur lengkap, sehingga layak menjadi lokasi berbagai event dan akan lebih dikenal oleh masyarakat secara luas.

"Ini adalah pagar saat modernisasi dan untuk menjaga dari budaya asing yang masuk. Dekranasda Sumsel dan segenap OPD yang membidangi menyadari semua bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu untuk generasi ke depan agar mereka mengenal bagaimana adat, kuliner dan budaya yang ada di Sumsel," ujarnya.

Herman Deru juga menugaskan secara khusus Dinas Budaya dan Pariwisata provinsi dan kabupaten/kota agar anjungan yang sudah ada dijadikan destinasi bagi setiap wisatawan.

"Selain bangunan yang megah dengan hiasan karya seni. Anjungan ini akan menjadi role model rumah adat berikutnya. Jangan sampai diklaim orang lain. Meskipun kita dari rumpun Melayu, tapi harus ada identitas tersendiri dengan didaftarkan hak cipta atau kekayaan intelektual di Kemenkumham, termasuk juga kuliner," terangnya.

Herman Deru juga mengingatkan, dalam pelaksanaan pekan adat ini agar para ketua adat kabupaten/kota untuk segera dibenahi kepengurusannya.

"Jadi untuk diaktivasi kembali sampai tingkat desa. Kita ketahui bahwa kepengurusan lembaga adat ini bukan hanya mengurus identitas organisasi tertentu, tapi juga untuk penahan agar tidak terpengaruh budaya lain," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Sumsel, Febrita Lustia HD, mengatakan, melalui kegiatan festival diharapkan masyarakat dengan mudah mempelajari adat istiadat asli Sumsel. Hal itu sekaligus menghidupkan kembali ciri khas Sumsel dengan menampilkan kearifan lokal melalui rumah adat dan anjungan.

"Kami mengharapkan semua pihak terlibat memelihara anjungan ini agar tetap terpelihara untuk diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka tahu adat dan budaya di Sumsel ini beragam," ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Aufa Syahrizal menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk memelihara kebudayaan yang ada di Sumsel. Selain itu juga untuk menjaga nilai budaya serta sejarah yang ada di kabupaten/kota di Bumi Sriwijaya.

"Kegiatan Festival Anjungan Sumsel dan Pekan Adat ke-4 dilaksanakan pada 3-5 Agustus 2023 di kawasan Anjungan Sumsel Dekranasda Jakabaring Palembang," ungkapnya.

Festival Anjungan Sumsel dan Pekan Adat ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti lomba anjungan kabupaten/kota, lomba kuliner daerah, prosesi arak-arakan, pertunjukan dan Bincang Adat Tepung Tawar, pertunjukan dan bincang adat Sedekah Serabi dan parade teater, serta parade musik daerah.

Kemudian penampilan musik Batang Hari Sembilan, kesenian Dulmuluk, pertunjukan Wayang Palembang, serta FGD seni bela diri tradisi Kuntau dan pembelajaran Aksara Ulu.

Festival Anjungan dan Pekan Adat ke-4 Tahun 2023 di Anjungan Dekranasda Jakabaring Palembang ditutup Asisten Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumsel, Edward Candra.

Edward menegaskan, pengembangan wisata dan budaya memerlukan sentuhan. "Budaya yang berada di anjungan merupakan miniatur. Kalau kita lihat seluruh kabupaten/kota ada rumah adat. Hal ini bukti bahwa Sumsel mempunyai adat istiadat yang beragam dan perlu dipelihara," katanya.

Penutupan festival juga dibagikan berbagai hadiah bagi pemenang masing-masing pemenang kategori Anjungan/Rumah Adat. Juara pertama adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Juara kedua, Kabupaten Lahat. Juara ketiga adalah Kabupaten Muara Enim. Juara keempat adalah Kabupaten OKI. Juara kelima adalah Kabupaten Musi Rawas. Juara keenam adalah Kabupaten OKU Selatan.

Sementara, untuk Kategori Anjungan Terfavorit yakni Kabupaten Ogan Ilir. Kemudikan kategori kuliner dimenangkan Kabupaten Musi Banyuasin. Posisi kedua Kabupaten Empat Lawang. Juara ketiga adalah Kota Pagaralam. Juara keempat yakni Kabupaten Muratara. Juara kelima adalah Kabupaten Banyuasin.●

JADI CONTOH PEMBANGUNAN INSTALASI SANITASI MODERN

Sumatera Selatan menjadi satu dari lima provinsi yang mendapat percontohan pembangunan instalasi modern untuk mengatasi masalah sanitasi di masyarakat. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) modern merupakan hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan Australia.

Guna mengetahui progres pembangunannya, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, melakukan kunjungan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, ke lokasi IPAL di Sungai Selayur, Kota Palembang.

Kunjungan bersama itu untuk mendengarkan penjelasan dari Dinas PUPR Kota Palembang/Balai PPW Sumsel/CPMU Palembang City Sanitation Project (PCSP) dilanjutkan dengan pengambilan sampel air limbah.

Usai melakukan peninjauan, Herman Deru sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat serta Pemerintah Australia yang sudah begitu perhatian dengan sanitasi di Kota Palembang.

Menurutnya, kerja sama ini bukan hanya soal konstruksi, namun berkaitan erat dengan hubungan baik kedua negara. Sedangkan, bagi daerah tentu menjadi beban yang positif agar Pemprov dan Pemkot dapat berbuat yang lebih baik ke depannya.

Herman Deru mengatakan, keberadaan IPAL ini akan mengedukasi masyarakat secara terus menerus untuk hidup sehat, bersih dan bebas stunting.

"Investasi ini begitu besar, Pemprov dan Pemkot punya tanggung jawab soal sambungannya. Makanya rekan media kita harap ikut berperan mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya sanitasi dan kesehatan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, proyek IPAL akan mengolah limbah-limbah dari rumah tangga, perkantoran, komersial seperti restoran dan lainnya melalui sistem pipa. Dia mengungkapkan, IPAL Sei Selayur ini hanya satu dari sanitasi modern di Indonesia, selain di Kota Makasar, Jakarta,

Pekanbaru, dan Jambi.

"Ini gunanya untuk mengajak kita untuk ke depannya memperbaiki lingkungan, memelihara lingkungan. Setelah diolah airnya jauh lebih jernih dari sungai dimanapun, bahkan PH nya saja 6.9 dan yang tersisa hanya bakteri ecoli serta tidak ada baunya," jelasnya.

Dalam pembangunan IPAL di Palembang, kata Basuki, pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur.

Tak main-main, investasi yang ditanamkan untuk IPAL ini mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Australia memberikan hibah sebesar Rp600 miliar dan APBN dari Kementerian PUPR sendiri menganggarkan Rp640 miliar untuk pipa distribusi, transmisi arteri dan tersiernya.

"Kemudian untuk pembebasan lahan seluas 5,8 hektare dan juga sambungan rumahnya menggunakan APBD dari Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan," jelasnya.

Ia mengatakan investasi yang tak sedikit ini hendaknya dapat dimanfaatkan masyarakat dengan maksimal. Untuk itu, ia meminta Pemprov dan Pemkot serta untuk bersama-sama mensosialisasikan ini ke masyarakat.

"Terima kasih untuk Australia yang telah memberikan hibah ini. Juga Pak Gubernur dan Wali Kota Palembang yang telah bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan ini mempererat hubungan ekonomi strategis kedua negara," jelasnya.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, mengatakan proyek setara AUSD160 juta yang didanai Australia dan Indonesia ini akan menyediakan 8.000 sambungan rumah dan memberikan manfaat bagi 40.000 orang pada tahap awal. Setelah tahap selanjutnya selesai, 21.700 sambungan rumah akan dibuat dan memberikan manfaat bagi 100.000 orang.

"Kami sangat senang menyampaikan bahwa pembangunan instalasi pengolahan air limbah telah berjalan baik sejak dimulai bulan November 2022 dan saat ini telah selesai," ujarnya.

Menurutnya ini adalah pencapaian yang luar biasa. Akses terhadap sanitasi yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Palembang dan akan membantu memperbaiki lingkungan sekitar.

"Ini luar biasa sekali. Saya melihat dengan mata saya sendiri contoh konkret dalam program pembangunan kerja sama Indonesia-Australia yang dapat membantu kesehatan di Palembang," jelasnya.

Menurutnya keberhasilan penyelesaian proyek ini mencerminkan kemitraan yang kuat antara Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang.

"Bersama kita telah menunjukkan bahwa kita dapat membangun infrastruktur sanitasi modern untuk melayani masyarakat. Australia menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek ini selama tiga tahun terakhir," jelasnya.

Tak hanya meninjau IPAL di Sei Selayur, rombongan Menteri PUPR dan Gubernur Herman Deru juga meninjau progres pembangunan fly over di Simpang Angkatan 66 dan berlanjut meninjau proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di kawasan Keramasan Kertapati.•

MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN DIGUGAT MAHASISWA KE MK

Seorang mahasiswa bernama Andi Redani Suryanata menggugat ketentuan syarat calon anggota DPR, DPRD, dan DPD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta MK membatasi masa jabatan anggota dewan maksimal dua periode seperti presiden.

Andi menggugat Pasal 240 ayat 1 dan Pasal 258 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat 1 mengatur sejumlah syarat bagi seseorang untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan, pasal 258 ayat 1 mengatur soal syarat calon anggota DPD.

Andi menilai, bunyi kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, Andi dalam petitumnya meminta MK mengubah bunyi kedua pasal tersebut menjadi: "Syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya memegang jabatan paling lama 2 (dua) periode dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama".

Dalam berkas gugatannya, Andi menyebut, tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota dewan membuka peluang para legislator itu untuk menyalahgunakan kekuasaan, seperti korupsi dan nepotisme. Tidak adanya pembatasan masa jabatan diyakini pula akan menghambat regenerasi kepemimpinan.

Seharusnya, masa jabatan anggota dewan dibatasi maksimal dua periode alias 10 tahun, seperti masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.

"Hal ini supaya periode kerja anggota legislatif sama pentingnya dengan periode kerja presiden/wakil Presiden (eksekutif) agar mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan," kata Andi dalam berkas gugatannya yang tertera di situs resmi MK, dikutip Selasa, 8 Agustus 2023.

Andi juga menyebut, tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota dewan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesempatan setara menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Padahal, kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk menjadi anggota dewan diatur dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

"Sejatinya jika terdapat pembatasan periodisasi dua periode, maka hak-hak konstitusional dan nilai keadilan dapat diberikan, yang pada akhirnya generasi baru dengan tenaga dan pikiran baru dapat mengisi jabatan-jabatan lembaga legislatif ke depannya," kata Andi.

Gugatan yang dilayangkan Andi ini belum teregister secara resmi di MK.

Permohonan dia baru dicatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) per 6 Agustus 2023 dengan nomor 87/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023.

Dalam gugatan ini, Andi menunjuk tiga kuasa hukum dari kantor hukum Leo & Partners. Salah satunya adalah Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, pengacara yang pernah menggugat ihwal pencopotan sepihak mantan hakim konstitusi Aswanto.

Gugatan yang dilayangkan oleh Andi Redani Suryanata tersebut tentu saja membuat para politisi yang duduk di Senayan kepanasan. Mereka ramai-ramai menyatakan gugatan tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak diatur dalam konstitusi, berbeda dengan jabatan di eksekutif.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan, masa jabatan anggota DPR sebaiknya tidak perlu dibatasi. Menurutnya, jabatan legislatif berbeda dengan jabatan eksekutif yang memiliki tugas fungsi dan wewenang menggunakan dan mengeksekusi anggaran.

"Sedangkan, parlemen tidak berfungsi seperti lembaga eksekutif. Dengan demikian, tentu tidak perlu ada limitasi dan di negara mana pun juga tidak ada pembatasan masa jabatan legislatif tersebut," kata Guspardi, Kamis, 10 Agustus 2023.

Pemerintah dan DPR sudah sepakat Pemilu 2024 masih menggunakan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Artinya, tidak ada pembatasan masa jabatan anggota dewan.

Guspardi menekankan, jabatan anggota DPR dan DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang diperoleh melalui mekanisme pemilu yang dipilih langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki hak untuk menentukan seseorang terpilih lagi atau tidak.

"Jika alasannya pembatasan masa jabatan anggota DPR itu lantaran DPR dianggap tidak memiliki kinerja yang baik, maka masyarakat bisa menghukumnya dengan tidak memilih yang bersangkutan pada pemilihan legislatif berikutnya," ucapnya.

Meski begitu, dirinya tetap menghormati gugatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di MK yang merupakan hak dari pada warga bangsa melakukan judicial review terhadap UU yang dibuat DPR bersama pemerintah.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menguji dan melakukan kajian terhadap apa yang dia-

Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman

jukan oleh masyarakat.

Anggota DPR, Putu Supadma Rudana, menilai, adanya gugatan terhadap UU Pemilu ke MK terkait masa jabatan anggota dewan menjadi maksimal dua periode merupakan opsi yang menarik. Namun, hal tersebut perlu dikaji kembali secara menyeluruh. Sebab, selama ini setiap warga negara berhak menjadi calon legislatif dan belum ada aturan yang mengatur tentang berapa kali maksimal anggota DPR bisa mencalonkan diri.

"Menurut saya sudah baik saat ini, dan jika ke depannya ada perubahan, saya harap semuanya harus menggunakan satu mekanisme yang tepat," kata Putu Rudana.

Putu mengatakan, jika nantinya wacana tersebut disetujui dan kemudian diatur dalam sebuah undang-undang, perlu memperhatikan kembali kesempatan bagi perempuan dan anak muda di parlemen. Sebab, keterwakilan perempuan dan anak muda dinilai penting dalam parlemen.

"Tentu wacana ini baik, tetapi kita harus menunggu undang-undang atau konstitusi yang menangani ini," ujar politikus dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Terakhir, Putu mengatakan jika wacana tersebut diatur dalam undang-undang, semua harus mematuhinya. "Memang kesempatan seluas-luasnya untuk setiap warga negara untuk bisa maju, untuk hadir dalam politik juga penting, tetapi kembali lagi, jika aturannya ada maka semua akan mengikuti," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, tidak sepakat dengan adanya gugatan itu karena anggota legislatif memiliki fungsi dalam pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif. Dengan begitu, makin lamanya jabatan anggota legislative, maka diyakini akan makin baik dalam melakukan fungsinya.

"Justru kalau pejabat legislatif lebih lama maka dia akan semakin andal dalam melakukan pengawasan," kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas membandingkan dengan

Amerika Serikat yang juga memiliki sistem kenegaraan seperti Indonesia. Kata dia, di Amerika Serikat, tidak diberlakukan adanya batasan masa jabatan anggota legislatif, sama halnya dengan di beberapa negara di Eropa.

"Di negara negara Amerika Latin yang diktator memang ada pembatasan masa jabatan anggota legislative, mungkin tujuannya agar sulit melakukan pengawasan terhadap eksekutif," kata dia.

Habiburokhman lantas membandingkan antara jabatan dan kekuasaan legislatif dengan eksekutif yang memang harus dibatasi. "Jabatan Eksekutif memang perlu dibatasi dua kali, karena kekuasaannya yang demikian besar dalam mengelola pemerintahan," kata Habiburokhman.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus

Sedangkan untuk anggota legislatif tugas dan kewenangannya adalah untuk mengawasi eksekutif. "Sementara jabatan legislatif di banyak negara tidak dibatasi karena memang fokusnya di bidang pengawasan," ujar dia.

Atas hal itu, Habiburokhman memandang kalau penggugat tidak memahami soal perbedaan masa jabatan antara eksekutif dengan legislatif. Dia juga menyebut bahwasanya gugatan serupa pernah terjadi pada 2020. Namun, saat itu gugatan tersebut ditolak oleh MK.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, tak masalah adanya gugatan ke MK dan mempersilakan MK untuk menguji gugatan tersebut.

Wakil Ketua MPR RI itu menyebut, dalam undang-undang tak mengatur perihal periodisasi masa jabat anggota legislatif. "Undang-undang juga tidak mempersyaratkan itu (periodisasi anggota DPR). Jadi biar diuji saja," ujar Jazilul.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar, juga menegaskan sejauh ini memang belum ada aturan yang mengatur pembatasan jabatan anggota DPR. Ia menilai, belum ada urgensi untuk membatasi masa jabatan para anggota dewan.

"Memang belum ada aturannya untuk membatasi masa jabatan anggota DPR. Kalau saya pribadi melihat memang belum ada urgensinya juga. Ini kan open legal policy juga. Produk hukum pemerintah bersama DPR," kata Renanda.

Renanda menuturkan, kinerja anggota DPR terbatas dan berbeda dengan kepala negara. Oleh sebab itu, tidak masalah jika masa jabatan anggota DPR tidak dibatasi seperti kepala negara yang maksimal dua periode.

"Berbeda dengan jabatan presiden yang perlu dibatasi mengingat kepala negara menguasai seluruh instrumen negara. Jika tidak dibatasi, maka berpotensi abuse of power. Kewenangan DPR hanya ada tiga. Pertama terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan," ucap Renanda.

Lebih jauh, Renanda juga mengatakan setiap anggota parpol yang maju menjadi anggota dewan juga sudah menandatangi pakta integritas. Oleh karenanya, ia menilai sejauh ini belum ada urgensi masa jabatan anggota DPR dibatasi.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai sah-sah saja jika ada masyarakat yang ingin mengajukan gugatan ke MK. Sebab itu adalah bagian dari hak konstitusi mereka.

"Pertama, memang hak dijamin konstitusi, rakyat boleh mempergunakan kedaulatanannya untuk meminta kedaulatan hukum dan itu dijamin konstitusi," kata HNW.

HNW menjelaskan sudah ada banyak gugatan serupa di MK. Mulai dari pembatasan jabatan ketua partai, gugatan agar batas syarat usia capres dan cawapres diturunkan, hingga gugatan perpanjangan masa jabatan presiden.

> **Saya pikir setuju atau tidak setuju menjadi kurang relevan. Prinsip dasar dari jabatan yang merupakan hasil dari pemilihan itu memang harus dibatasi periodesisasinya dan maksimal term officenya.**

"Ada juga gugatan masa jabatan presiden jadi tiga periode, ada juga gugat presiden dua periode kemudian jadi cawapres dan semuanya diterima oleh MK. Ada juga gugatan presidential threshold 0 persen dan sebagainya. Jadi secara norma adalah hak warga," ucap pria yang duduk di DPR sejak 2004 ini.

HNW mengingatkan agar hakim MK memutus gugatan ini dengan bijak dan konsisten. Apalagi memang belum ada aturan soal pembatasan masa

jabatan anggota dewan.

"Saya ingatkan agar MK betul-betul sebagai lembaga tertinggi dalam penegakan hukum, MK mengadilkan sengketa semacam ini agar betul-betul berlaku adil dan konsisten," ucap HNW.

Regenerasi Elite Politik

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan persoalan anggota dewan yang bisa terpilih beberapa kali sebagai anggota dewan harusnya merupakan tanggung jawab partai politik. Sebab, parpol memiliki peran untuk melakukan kaderisasi dan mencalonkan kadernya dalam pemilu calon anggota legislatif.

"Partainya mencalonkan orang yang itu-itu saja, enggak membuka ruang kepada kader baru untuk dicalonkan, sehingga proses pergantian itu tidak terjadi," kata Ninis, sapaan akrabnya, Jumat, 11 Agustus 2023.

Pun jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, pemilih hanya bisa memilih calon-calon anggota legislatif yang disajikan oleh partai politik. Sehingga bakal mengakibatkan akan terpilih anggota parpol yang itu-itu saja.

Hal ini juga berkaitan dengan putusan MK tentang sistem pemilu proporsional terbuka yang berkenaan juga dengan kepentingan partai politik.

"Jadi, MK bilang parpol ini kalau mencalonkan orang harus punya indikator dulu, sehingga, misalnya kemarin ada argumentasi kalau terbuka, dia pragmatis. Nah, MK tuh (menekankan) parpol ini harus membenahi internalnya," tutur Ninis.

Sementara, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai, jabatan hasil dari pemilihan memang perlu dibatasi periodenya.

"Saya pikir setuju atau tidak setuju menjadi kurang relevan. Prinsip dasar dari jabatan yang merupakan hasil dari pemilihan itu memang harus dibatasi periode-sisasinya dan maksimal term officenya. Apakah lima tahun kali dua atau empat tahun kali dua atau jumlah lain," kata Zaenur.

Menurutnya, filosofi dari pembatasan masa jabatan itu ada dua. Pertama, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, bentuknya bisa berupa korupsi. Kalau kekuasaan yang tidak dibatasi, maka cenderung akan korup.

Kedua, untuk sirkulasi kepemimpinan. Artinya, memberi kesempatan juga untuk generasi-generasi yang lain atau untuk orang-orang yang lain agar ada pergantian orang yang menduduki jabatan, sehingga tidak itu-itu saja selama puluhan tahun.

Untuk masa jabatan DPR, praktiknya memang berbeda-beda di berbagai negara. Memang banyak negara yang tak membatasi masa jabatan untuk DPR.

"Kalau ini digugat untuk konteks Indonesia ya kita serahkan kepada MK. Bagaimana MK akan memutus itu. Apakah korupsinya akan berkurang, enggak juga. Kalau saya melihatnya kalau untuk DPR itu lebih kepada rotasi kepemimpinan. Karena kalau DPR itu enggak pegang anggaran dia hanya fungsi kontrol monitor dan legislasi," jelasnya.

Memang pembatasan jabatan di DPR tak menjamin kasus korupsi di sana hilang, tetapi paling tidak bisa menjadi salah satu faktor pendorong untuk memerangi korupsi.

"Karena masa jabatan yang terbatas maksimal dua periode, maka jejaring yang dibangun hanya dua periode itu. Tapi ya memang yang pertama lazim di dunia itu memang yang untuk eksekutif (yang dibatasi). Kalau ditanya setuju nggak setuju, ya setuju setuju saja sih, tapi saya pikir bukan setuju nggak setujunya, apa argumentasinya dan apa urgensinya," pungkasnya.●

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati

ISU TUNDA PEMILU MUNCUL LAGI

MPR Kembali Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mengusulkan amendemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Amendemen terbatas tersebut bertujuan untuk memasukkan usulan penundaan pemilu di masa darurat.

Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mengatakan, usulan tersebut berkaca pada pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap seluruh sektor di Indonesia. Apalagi, konstitusi saat ini belum mengatur penundaan pemilu pada masa-masa seperti itu.

"Kalau kita mengacu pada UUD yang sekarang, katakanlah akibat kedaruratan itu pemilu enggak mungkin dilaksanakan. Nah, kalau kita mengacu pada UUD yang sekarang ini kan enggak ada aturannya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023.

Jika hal tersebut tak diatur, maka akan muncul potensi pembangkangan masyarakat di tengah masa-masa darurat seperti itu. Sebab, tidak mungkin memaksakan pelaksanaan pemilu di tengah kegentingan, seperti pandemi dan gempa besar.

Adapun usulan amendemen tersebut akan disampaikan di Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2023. Harapannya, lewat kajian dan pembahasan dengan banyak kalangan itu, MPR akan mendapatkan kewenangan tersebut lewat amendemen terbatas.

"Kami berharap MPR itu punya kewenangan, artinya tempat memutuskan mencari jalan keluarnya itu harus ada di MPR. Termasuk misalnya kewenangan untuk 'oke kita tunda', menyatakan itu ditunda, tetapi itu beberapa bulan dan segala macam," ujar Arsul.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa usulan amendemen terbatas terhadap UUD 1945 bukan untuk menunda Pemilu 2024. MPR tetap berkomitmen terhadap pelaksanaan kontestasi nasional 14 Februari 2024.

"Bahwa amendemennya itu nanti setelah MPR hasil Pemilu (2024), itu soal lain. Tapi ini lho harus ada yang kita pikirkan, gagasan itu harus kita lempar dari sekarang. Supaya orang itu tidak curiga, ini jangan-jangan mau menunda pemilu lagi, makanya kita

tegaskan dulu di sidang tahunan posisi MPR itu pemilu yang 14 Februari itu harus on time," tegasnya.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, juga mengatakan, rencana amendemen UUD 1945 akan dibahas setelah Pemilu 2024.

"Sangat tergantung pada kesepakatan kami, partai politik yang ada. Untuk sementara, kesepakatan adalah kami bahas nanti setelah pemilu," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, setelah pertemuan antara pimpinan MPR dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023.

Bamsoet mengaku khawatir jika amendemen UUD dibahas dalam waktu dekat menjelang Pemilu 2024, akan memicu timbulnya kecurigaan terkait dengan dicantumkannya pasal perpanjangan masa jabatan presiden dalam proses amendemen UUD.

> **Karena kalau sekarang, takutnya bukan apa, dicurigai untuk perpanjang masa jabatan presiden, untuk apa lagi? Penundaan pemilu dan seterusnya**

"Karena kalau sekarang, takutnya bukan apa, dicurigai untuk perpanjang masa jabatan presiden, untuk apa lagi? Penundaan pemilu dan seterusnya," ujarnya.

Jika timbul polemik dengan wacana amendemen UUD, kata dia, malah akan menimbulkan hal-hal yang akan kontraproduktif dengan kondisi saat ini yang sedang menjelang Pemilu 2024. "Kami berkesimpulan bahwa membahas amendemen UUD nanti pascapemilu," ujar Bamsoet.

Bamsoet menegaskan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi tidak membahas mengenai amendemen UUD. Kedatangan para pimpinan MPR untuk menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan guna menyampaikan persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023.

"Tak ada. Kami enggak menyampaikan, kami hanya menyampaikan bahwa Pak Arsul (Wakil Ketua MPR) menyampaikan, ya, itu domainnya MPR, domainnya partai-partai politik yang ada di parlemen," kata dia.

Bamsoet mengakui, pada 8 Agustus 2023, MPR memang membahas kemungkinan amendemen UUD, di antaranya mengenai pentingnya keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, diputuskan bahwa amendemen UUD tidak akan diusulkan dalam waktu dekat menjelang Pemilu 2024.

"Yang pasti kemarin kami bicara soal pentingnya PPHN untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Pertanyaan kemudian apakah pembahasan ini dilakukan sebelum pemilu atau setelah pemilu, kami sepakat kemarin untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara yang tinggal satu langkah lagi, yaitu pembentukan panitia ad hoc di sidang paripurna MPR, kami tunda selesai pemilu," kata Bamsoet.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menjelaskan, penundaan pemilu saat masa darurat masih berupa usulan materi yang bergulir di pimpinan MPR. Ia mengaku, bukan merupakan usulan resmi MPR untuk melakukan amendemen terbatas terhadap UUD 1945.

"(Menunda pemilu pada masa darurat) kalau hanya dengan undang-undang kan tidak bisa, karena ketentuan pemilu lima tahun sekali adanya di UUD, tidak bisa dikalahkan UU. Kalau melalui perppu, juga tidak bisa menganulir ketentuan konstitusi, apalagi legitimasi politiknya juga sangat rendah," ujar Hidayat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945. Dijelaskan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Selanjutnya dalam Pasal 22E Ayat 2, dijelaskan bahwa pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Termasuk memilih presiden dan wakil presiden yang harus dilakukan setiap lima tahun sekali.

"Satu hal yang kaitannya dengan ajakan untuk memikirkan dan melakukan kajian antisipatif terhadap kondisi darurat bila kembali terjadi. Kemarin kita dilanda pandemi Covid-19 dan alhamdulillah Covid selesai sebelum pemilu. Tapi, kalau hal kedaruratan sejenis itu terjadi sampai jelang pemilu, bagaimana mengatasinya secara konstitusional, sementara aturan konstitusionalnya belum ada," terangnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa usulan materi tersebut tak berkaitan dengan penundaan Pemilu 2024. Seluruh pimpinan MPR dalam rapat 8 Agustus 2023, seluruh fraksi

sudah berkomitmen terhadap pelaksanaan kontestasi pada 14 Februari mendatang.

"Tidak diundurkan, tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pimpinan MPR juga sepakat amendemen UUD tidak dilaksanakan sebelum Pemilu 2024," ujar wakil ketua Majelis Syura PKS itu.

Dampak Serius

Peneliti riset politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, tak sependapat dengan rencana MPR itu. Siti Zuhro menilai akan ada dampak serius jika memaksakan amendemen terbatas UUD 1945 menjelang pemilu.

"Akan sangat serius dampaknya melakukan amendemen Konstitusi di tengah tahapan pemilu yang memerlukan kepastian dan kondisi yang mantap," ujar Siti Zuhro, Kamis, 10 Agustus 2023.

Siti Zuhro mengatakan, usulan amendemen terbatas ini rawan disusupi kepentingan politik tertentu. Meskipun MPR berdalih jika usulan amendemen terbatas ini bukan untuk penundaan Pemilu 2024, tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi.

"Prinsipnya tidak perlu ada amendemen konstitusi karena tak tertutup kemungkinan akan ada tarikan politik yang justru tidak menguntungkan negara," ujarnya.

Selain itu, amendemen pemilu juga rawan terjadi resistansi dan perdebatan. Hal ini, kata Siti Zuhro, jika dipaksakan akan menuai polemik di masyarakat. "Tentunya hal ini bisa berpengaruh terhadap stabilitas dan keamanan Indonesia," ujarnya.

Karenanya, jika MPR ingin tetap memaksakan amendemen terbatas maka semestinya dilakukan setelah Pemilu 2024 selesai. Selain itu, proses amendemen terbatas juga harus dilakukan dengan persiapan yang matang oleh banyak ahli dan akademisi.

"Seyogiyanya amendemen Konstitusi dilakukan setelah Pemilu 2024 dengan persiapan materi yang cukup dan ahli-ahli dari berbagai bidang yang juga cukup yang ikut membahas secara serius. Artinya, tidak hanya dibahas oleh politisi," ujarnya.

Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid, menilai, rencana amendemen konstitusi UUD 1945 oleh MPR bukan hal aneh. Fahri juga menyarankan amendemen konstitusi UUD lebih baik dilakukan setelah proses Pemilu 2024 rampung.

"Rencana amendemen konstitusi UUD Tahun 1945 adalah sesuatu yang normal dan lazim saja, tidak ada yang luar biasa. Itu seperti academic discourse yang harus dilihat secara objektif," kata Fahri.

Fahri juga mendorong amandemen konstitusi tak dilakukan oleh anggota MPR yang menjabat saat ini. Kalau pun amendemen dilakukan, maka mestinya dilakukan oleh anggota MPR hasil Pemilu 2024.

"Agar pandangan serta pikiran-pikiran konstitusionalisme benar-benar muncul tanpa ada agenda jangka pendek, serta pragmatis, amendemen harus ideal dengan memandang bahwa kebutuhan perubahan (amendemen) UUD 1945 bertujuan untuk bernegara dalam jangka waktu yang panjang," ujar Fahri.

Fahri mengamati urgensi amandemen konstitusi salah satunya karena persoalan besar yang belum ada jalan keluarnya dari konstitusi saat ini. Yaitu jika terjadi sebuah keadaan yang membuat kesinambungan kepemimpinan negara terhenti. Misalnya, karena adanya bencana alam, pandemi, pemberontakan dan kerusuhan atau krisis keuangan.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo

"Maka keadaan-keadaan demikian mungkin saja dapat diatasi oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan menyatakan keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945," ujar Fahri.

Presiden dinilai Fahri masih dapat mengatasi hal tersebut. Namun, bagaimana sekiranya apabila terjadi situasi di mana Presiden dan Wakil Presiden, berikut triumvirat (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan) beserta jajaran yang lain lumpuh? Siapa yang punya kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?

"Dengan demikian, saya berpenda-

pat UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan jika situasi seperti itu benar-benar terjadi," ujar Fahri.

Fahri menyebut salah satu materi amandemen kelima adalah terkait hal itu. Secara akademis, lembaga MPR yang diisi oleh anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya adalah produk pemilihan umum bisa sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Atas dasar itu, sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan serta kewajiban hukum untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi keadaan bahaya tersebut.

"Itulah keniscayaan konstitusional yang dapat dilakukan dengan instrumen amendemen kelima UUD 1945," ucap Fahri.

Selain itu, Fahri berpendapat, dalam melakukan amendemen terhadap UUD 1945 memang dibutuhkan sikap kehati-hatian tinggi. Sebab, materi perubahannya dapat membuka kotak pandora, misalnya isu masa jabatan Presiden.

"Yang paling esensial dalam amandemen ini terkait isu organ konstitusional seperti MPR diatribusikan dengan kewenangan mengatasi keadaan darurat negara, kemudian penguatan DPD RI serta perlu diadopsinya pengaturan terkait PPHN sebagai dokumen otoritatif arah berbangsa dan bernegara, selebihnya harus dibatasi secara tegas," ujar Fahri.

Dalam UUD 1945, diatur lima syarat untuk melakukan perubahan konstitusi. Di Pasal 37 Ayat 1 UUD 1945 dijelaskan, usul perubahan pasal-pasal dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Diketahui, saat ini terdapat 711 anggota MPR.

"Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya," bunyi Pasal 37 Ayat 2 1945.

Selanjutnya, dalam Pasal 37 Ayat 3 dijelaskan, untuk mengubah pasal-pasal UUD sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Artinya harus ada sekira 474 anggota MPR yang hadir dalam sidang tersebut.

Lalu di Pasal 37 Ayat 4 diatur, putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD 1945 dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen plus satu anggota MPR. Artinya harus ada 356 anggota MPR yang setuju terhadap perubahan tersebut.

"Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan," bunyi Pasal 37 Ayat 5 UUD 1945.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai, tidak ada urgensinya pembahasan wacana amendemen UUD 1945. Sebab, amendemen atau perubahan konstitusi harus dimulai dari keinginan masyarakat Indonesia.

Dia khawatir, amendemen UUD 1945 tersebut hanya menjadi keinginan para elit politik agar ada payung hukum tertentu untuk merapikan sesuatu yang mereka lindungi. Namun, akan ada efek lain, seperti akan ada pasal-pasal lain yang diusulkan bersamaan.

"Jadi kerannya jangan dibuka sekarang, dalam situasi seperti sekarang tidak baik secara politik untuk mengubah konstitusi, karena banyak sekali agenda yang mungkin akan ikut ke situ. Jadi seperti kotak pandora," katanya.

Sebagai kontrak sosial, perubahan UUD 1945 tidak bisa hanya ditentukan oleh elite-elite politik tanpa keinginan dari masyarakat.

Dia berujar, amendemen UUD biasanya dilakukan ketika terjadi situasi politik tertentu. Seperti pada 1998, di mana rakyat Indonesia membutuhkan perubahan yang besar, maka terwujudlah amendemen 1999-2000.

Namun, saat ini tidak ada peristiwa besar yang akan membutuhkan perubahan ketatanegaraan di level UUD dan amendemen yang diwacanakan MPR tersebut tidak ada urgensinya sama sekali. Terlebih, MPR mengaku wacana amendemen UUD 1945 tidak akan mempengaruhi Pemilu 2024. Sehingga, terkesan isu yang dilempar tersebut hanya agenda seremonial MPR dan lebih banyak unsur politik dibandingkan ketatanegaraan.

"Jika dibilang suatu saat akan ada kedaruratan, sehingga menunda Pemilu, nanti kita selesaikan jalan konstitusinya tetap ada. Ada peraturan hukum ketatanegaraan darurat, misalnya Pasal 12 UUD," katanya.

Jika pun amendemen UUD bisa diwujudkan untuk menunda Pemilu di masa darurat, dia khawatir akan menjadi mesin baru bagi penguasa untuk memuluskan kekuasaannya dan bisa merusak kesucian demokrasi. Terlebih, masa jabatan MPR akan usai pada Oktober 2024. Tidak boleh ada perubahan ketatanegaraan di konstitusi di masa transisi tersebut.●

Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres

DEMI DEMOKRASI ATAU PUTRA JOKOWI

Bola panas usulan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden 35 tahun tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi atau judicial review Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur batas minimal usia capres-cawapres tengah disidangkan di MK.

Uji materi ini diajukan oleh tiga pihak. Pertama, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sejumlah perseorangan dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023. Kedua, Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dengan nomor perkara 51/PUU-XXI/2023. Ketiga, sejumlah kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dengan perkara nomor 55/PUU-XXI/2023.

DPR dan Pemerintah telah menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang digelar MK, Selasa, 1 Agustus 2023. Baik DPR maupun pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menilai dan memutuskan nasib usulan perubahan batas minimal usia capres dan cawapres tersebut.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Habiburokhman selaku perwakilan DPR saat menyampaikan keterangan di persidangan MK, memberikan sinyal bahwa parlemen menyetujui usulan perubahan batas minimum usia capres-cawapres. Salah satu pertimbangannya, Indonesia tengah memasuki bonus demografi.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada rentang 2020 sampai dengan 2030, jumlah usia produktif meningkat mencapai dua kali lipat dari total jumlah usia penduduk Indonesia. Oleh karenanya, penduduk usia produktif ini kemudian hari dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional untuk menjadi pemimpin bangsa, termasuk sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Sementara keterangan dari pemerintah dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar-Lembaga dari Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong. Dia menuturkan, UUD 1945 tidak mengatur secara rinci kriteria batas minimum usia capres-cawapres.

UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Sehingga aturan yang demikian dapat saja berubah sesuai kebutuhan yang berkembang dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Hakim konstitusi, Saldi Isra, menilai, baik DPR maupun pemerintah sama-sama setuju aturan batas minimal usia capres-cawapres diubah. Karena itu, dia menyarankan agar aturan tersebut langsung saja diubah sendiri oleh DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang, tanpa perlu melibatkan MK.

Namun, Sadil juga mempertanyakan urgensi perubahan batas minimal usia capres-cawapres menjadi 35 tahun. Sebab pada Pemilu 2004 dan 2009, batas minimal usia capres-cawapres adalah 35 tahun, kemudian diubah dalam UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi 40 tahun. MK ingin mengetahui apa alasan DPR dan pemerintah dulu menaikkan batas minimum usia capres dan cawapres.

Pengamat dari lembaga Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyampaikan implikasi jika MK mengabulkan permohonan uji materi UU 7/2017 tentang Pemilu. Dia menilai perubahan ketentuan batas usia tersebut akan berpengaruh pada politik nasional, terutama pada level cawapres.

"Sangat mungkin Gibran akan maju di pilpres. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik karena apapun

judulnya Gibran anak presiden, viral, dan jadi magnet politik," ujar Adi dalam keterangannya, Senin, 7 Agustus 2023.

Adi menyebut, jika Gibran maju menjadi cawapres, kondisi ini akan mengubah konstelasi peta cawapres yang ada saat ini. Nama-nama cawapres yang selama ini digadang-gadang pun akan tergusur karena sosok Wali Kota Solo tersebut.

Menurutnya, hal ini juga akan membuat peta koalisi Pilpres yang ada saat ini berubah total. "Andai Gibran maju, koalisi partai akan berubah total," ujarnya.

Hal serupa disampaikan pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, tentang gugatan yang merupakan upaya kelompok pro Jokowi untuk membuka peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di Pemilu 2024.

Gibran selama ini kerap didorong menjadi cawapres tetapi usianya yang masih 35 tahun belum memenuhi ketentuan batas usia minimum capres-cawapres yakni 40 tahun. Jika kondisi ini terjadi, kata Dedi, akan mengubah konstelasi peta politik saat ini.

Menurutnya, bisa saja terjadi peleburan koalisi antara poros Koalisi Perubahan dengan PDIP maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) atau dari partai yang sebelumnya berada di Koalisi Indonesia Bersatu.

"Koalisi akan bisa saja berubah total, di antaranya terbentuknya dua poros besar, bisa saja PDIP mengejutkan melebur dengan koalisi Perubahan, dan KIB melebur ke KKIR. Tetapi jika PDIP melebur ke koalisi lain, besar kemungkinan Ganjar tidak terusung, karena untuk apa PDIP usung tokoh non trah Megawati jika sama-sama tidak mendapat dukungan Jokowi," kata dia.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Andriadi Achmad, berharap MK tidak mengubah ketentuan UU Pemilu soal batas usia capres-cawapres. Apalagi, pengajuan uji materi ini disebut untuk mengakomodasi peluang Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres.

"Menurut hemat saya judicial review batas usia capres-cawapres tidak terlalu mendasar dan penting, apalagi hanya untuk mengakomodir seorang Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.

Andriadi menambahkan, jika uji materi ini sampai dikabulkan akan menimbulkan kontroversial di masyarakat. Apalagi akan dikaitkan dengan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar dari Joko Widodo.

"Kalau dikabulkan MK terlalu berlebihan, jangan karena Om-nya (adik ipar Jokowi) Ketua MK JR yang tidak substansial dikabulkan pasti akan menimbulkan kontroversial," ujarnya.

Dia mengatakan, jika gugatan batas usia capres dan cawapres ini dikabulkan dan Gibran digaet menjadi cawapres salah satu calon juga akan mengubah konstelasi politik yang ada. Karena bisa saja Gibran mendampingi Ganjar maupun Prabowo.

"Namun menurut saya Gibran belum terlalu menjual sebagai cawapres walaupun anak Presiden Jokowi. Jika dikabulkan, peluang perubahan peta politik terbuka lebar. Misal Prabowo-Gibran, Jokowi mendukung penuh, secara otomatis out dari PDIP," ujarnya.

Dia menilai batas minimal usia 40 tahun capres-cawapres sesuai ketentuan UU saat ini sudah cukup ideal. Andriadi menyebutkan, sejarah mencatat Presiden Indonesia saat diangkat seluruhnya berusia di atas 40 tahun.

Mulai dari Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden pada usia 44 tahun, Presiden Soeharto pada usia 45 tahun, Presiden Habibie 62 tahun, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 59 tahun, Presiden Megawati Soekarnoputri saat 54 tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat 55 tahun, dan Presiden Joko Widodo saat 53 tahun.

"Mengingat kematangan seseorang 40 tahun ke atas, termasuk dalam konteks kepemimpinan negara," ujar Andriadi.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti terkait norma batas minimum usia capres dan cawapres. Dia mewanti-wanti agar pengajuan uji materil itu hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu. Padahal, seharusnya pengajuan itu dilakukan atas dasar ingin memajukan demokrasi.

"Dilakukan untuk kepentingan negara dan memajukan demokrasi di Indonesia secara khusus memberikan pemerataan peluang bagi generasi muda. Semoga saja tidak diajukan hanya untuk kepentingan seseorang dan ambisi sekelompok orang saja," ungkapnya.

Dia berpendapat bahwa pengajuan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu akan disetujui oleh lembaga pimpinan Anwar Usman itu.

Dia berpendapat, melihat dari konstruksi pengajuan gugatan tersebut memang untuk kepentingan Gibran Rakabuming agar maju di Pilpres 2024. Apalagi, saat ini santer kabar beredar bahwa Wali Kota Surakarta itu agar menjadi cawapres Prabowo Subianto. Namun, umurnya belum memenuhi sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu. ●

PILIH CAPRES YANG SEDIKIT JELEKNYA

Masyarakat diminta menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 meski tak ada calon yang sempurna. Sebab, ketika pemilih tidak menggunakan hak suara, berarti ia membiarkan orang jahat berkuasa.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebutkan, tidak ada calon pemimpin yang sempurna karena pasti ada kebaikan dan keburukannya masing-masing. "Semua calon pemimpin yang ada itu kalau dicari baiknya pasti ada, dicari jeleknya pasti ada," kata Mahfud dalam pidatonya di acara Forum Diskusi Sentra Gakumdu-Wujudkan Pemilu Bersih di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.

Mahfud meminta masyarakat tidak mengurungkan niat untuk mencoblos hanya karena tidak ada pemimpin yang tanpa keburukan alias sempurna. Dia mendorong masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang keburukan atau kejelekannya paling sedikit.

"Pilihlah yang kejelekannya lebih sedikit karena pemimpin harus ada. Kalau tidak ada, saudara sekalian, maka kita sendiri yang akan rugi," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

"Ada sebagian orang, filsuf politik mengatakan begini, 'pemilu itu bukan mencari pemimpin yang baik, pemilu itu sulit menghadirkan pemimpin yang baik, tapi pemilu itu adalah untuk menghalangi orang yang lebih jahat untuk menjadi pemimpin'," ungkap Mahfud.

Menurut Mahfud, masyarakat harus memilih pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi rakyat. Jangan memilih calon pemimpin yang hanya mendengarkan aspirasi kelompoknya. Apalagi calon pemimpin yang memanfaatkan politik identitas.

Mahfud menyampaikan, pemilu merupakan sarana untuk mencari dan menentukan pemimpin, bukan untuk mencari musuh. Pemimpin yang dicari adalah sosok yang bisa mendengarkan sekaligus menjahit aspirasi masyarakat yang berbeda-beda.

Karena itu, Mahfud meminta pihak yang kalah dalam pemilu agar tidak menjadi kelompok oposisi yang berupaya memecah belah masyarakat. "Mengontrol boleh, mengkritik itu boleh, tapi menimbulkan perpecahan yang menahun memanjang itu dari pemilu sekarang sampai pemilu berikutnya itu tidak boleh," ujarnya.

Mahfud mengatakan pemilu memiliki tujuan untuk mencari pemimpin yang disepakati bersama. Ini karena Indonesia adalah negara demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat.

"Pemilu itu mencari pemimpin bersama, bukan mencari musuh. Mencari pemimpin itu, karena kita negara demokrasi dan kemampuan serta aspirasi masyarakat berbeda-beda, sehingga diperlukan pemimpin yang bisa menjahit semua perbedaan," kata Mahfud.

Dia berharap setelah pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali itu selesai, masyarakat dapat kembali bersatu. Sebab, masyarakat Indonesia sudah memilih pemimpin untuk negaranya. "Kita sudah memilih pemimpin, bukan yang tadinya tidak memilih seperti kita lalu dianggap musuh, lalu menjadi oposisi yang membelah," ujarnya.

Mahfud tak mempersoalkan mengenai kritikan terhadap calon pemimpin tertentu saat pemilu. Kendati demikian, kondisi itu tidak sampai menimbulkan perpecahan berkepanjangan hingga pemilu berikutnya. "Pemimpin harus ada, karena kalau tidak ada, negara itu bubar berarti kita mengkhianati pendiri negara dan mengkhianati perintah konstitusi," jelasnya.

Di sisi lain, jelas Mahfud, ia juga tidak mempermasalahkan apabila ada

masyarakat yang ingin memilih pemimpin berdasarkan identitas politiknya. Identitas politik berkaitan dengan suku agama dan ras seseorang. "Apakah memilih berdasarkan (identitas) itu tidak boleh? Boleh, tapi jangan itu dijadikan alat, apalagi untuk menjatuhkan mendiskriminasi orang lain," tegasnya.

Mahfud juga mengatakan, penggunaan politik identitas dalam pemilu merupakan salah satu pemicu terjadinya pembelahan atau polarisasi masyarakat. Namun, dia menegaskan bahwa politik identitas berbeda dengan identitas politik.

"Saya selalu mengatakan politik identitas itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, politik identitas itu beda dengan identitas politik," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, identitas politik adalah identitas primordial yang melekat pada setiap orang. Misalnya identitas agama di mana ada orang beragama Islam, Kristen, dan Katolik. Lalu identitas suku seperti orang bersuku Madura, Jawa, Bugis, Batak, dan lainnya. Ada pula identitas ras seperti warga Indonesia dari etnis Melayu, Cina, Arab, dan lainnya.

"Apakah memilih berdasarkan identitas itu tidak boleh? Boleh, tetapi jangan itu menjadi hal yang utama, apalagi dijadikan alat untuk mendiskriminasi orang lain," kata Mahfud.

Dia menyebut, penggunaan identitas untuk mendiskriminasi orang lain itu lah yang dinamakan politik identitas. Dia pun memberikan contoh politik identitas adalah ketika masyarakat dari sebuah suku bangsa mendiskriminasikan seseorang dari suka bangsa lainnya dalam kontestasi pemilu di suatu daerah.

"Saya orang Jawa, (saya) sikat orang Batak, sikat orang Bugis. Begitu juga di sana di Bugis di Makassar, saya orang Bugis pokoknya orang pendatang di sini mari kita sikat di dalam politik. Itu namanya politik identitas," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menjelaskan pula bahwa pemicu polarisasi masyarakat bukan hanya penggunaan politik identitas, tapi juga fitnah, kebohongan, dan pencemaran nama baik saat pemilu. Berbagai pemicu terjadinya pembelahan masyarakat itu biasanya dikemas dalam bentuk kabar bohong alias hoaks.

Karena itu, ujar dia, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) harus melakukan menegakkan hukum pidana pemilu terhadap warga maupun kontestan yang memecah belah masyarakat demi memenangkan pemilihan. Mahfud menegaskan, seseorang tidak boleh memecah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengatasnamakan demokrasi.

Mahfud juga menyebut kasus korupsi

marak terjadi jelang gelaran pemilu maupun pilkada. Hal itu disampaikan Mahfud ketika menjelaskan soal maraknya peserta pemilu melakukan politik uang alias praktik jual beli suara pemilih.

"Hasil penelitian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diumumkan beberapa waktu lalu bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada," ungkap Mahfud.

Mahfud menjelaskan, berdasarkan penelitian KPK tersebut, kasus korupsi marak terjadi jelang Pemilu 2004, yakni pada 2003 dan 2004. Kemudian kasus pencurian uang rakyat itu kembali marak terjadi pada 2008 dan 2009 alias jelang Pemilu 2009.

Pola serupa kembali terjadi pada 2013 dan 2014 yang merupakan tahun-tahun jelang Pemilu 2014. "Mudah-mudahan ini menurun tahun 2023 dan 2024 (jelang Pemilu 2024)," kata Mahfud.

Dia menambahkan, pola serupa juga tampak ketika menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Saat pilkada belum dilaksanakan secara serentak, kasus korupsi selalu terjadi di daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada.

"Berarti pemilu ini selalu diiringi dengan terjadinya upaya melakukan korupsi atas keuangan negara. Di situ lah penangkapan-penangkapan banyak terjadi menjelang pemilu," terangnya.

Mahfud menjelaskan pula bahwa politik uang merupakan salah satu penyakit pemilu. Praktik jual beli suara pemilih itu terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya dalam berbagai bentuk. ●

Pilkada Sulut 2024

ELLY LASUT TANTANG STEVEN KANDOUW

Nama-nama bakal calon gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada 2024 kini mulai menarik perhatian. Sejumlah kepala daerah yang masih aktif menjabat dikabarkan bakal maju menjadi orang nomor satu di Daerah Nyiur Melambai itu.

Saat ini, sudah mengemuka nama-nama yang dianggap potensial menjadi calon gubernur Sulawesi Utara. Mereka di antaranya Wakil Gubernur Steven Kandouw; Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut; Ketua TP PKK Sulut, Rita Maya Dondokambey Tamuntuan; Mantan Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu; Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap; Wali Kota Manado, Andrei Angouw; mantan Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, dan mantan Wali Kota Manado, Vicky Lumentut.

Elly Engelbert Lasut menjadi nama yang sering disebut dan dari beberapa hasil survei menunjukkan popularitasnya yang tinggi di kalangan publik.

Namun, banyak yang berpendapat bahwa pemenang dalam Pilgub Sulut 2024 sangat bergantung pada hasil dari Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Ada beberapa faktor yang dianggap penting dalam memprediksi hasil Pilgub Sulut 2024.

Pertama, Partai Demokrat perlu memperoleh setidaknya 20 persen suara atau minimal sembilan kursi di DPRD Sulut. Hal ini merupakan persyaratan agar Partai Demokrat yang dipimpin oleh Elly Engelbert Lasut di Sulut dapat mengusulkan calon gubernur dari partai mereka sendiri.

Namun, jika partai ini tidak berhasil memperoleh sembilan kursi di DPRD Sulut, peluang Elly Engelbert Lasut untuk maju dalam Pilgub agak terhambat. Karena dalam situasi ini, partai tersebut harus membentuk koalisi dengan partai lain.

Kemungkinan lain adalah partai-partai lain memilih untuk berkoalisi dengan PDIP. Hal ini dapat membuka peluang bagi seorang calon gubernur dari PDIP untuk bersaing tanpa adanya calon dari partai lain.

Faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah hasil Pilpres 2024. Jika PDIP berhasil memenangkan Pilpres, Elly Engelbert Lasut akan menghadapi tantangan, terutama jika Partai Demokrat tidak memperoleh sembilan kursi di DPRD Sulut.

Namun, jika hasil Pilpres tidak dimenangkan oleh PDIP, maka partai-partai lain akan lebih berani dalam mendukung Elly Engelbert Lasut atau membentuk koalisi dengannya.

Terkait PDIP, nama Wakil Gubernur Steven Kandouw telah disebut oleh Gubernur Olly Dondokambey sebagai calon yang lay-

ak untuk meneruskan estafet kepemimpinan.

Olly Dondokambey bersama PDIP diyakini akan habis-habisan memenangkan mantan Ketua DPRD Sulut untuk meneruskan tongkat estafet sebagai Gubernur Sulut selanjutnya.

Meski demikian, Steven bakal mendapat batu sandungan dari kompetitornya, seperti Elly Engelbert Lasut yang dianggap sebagai lawan berat karena bupati dua periode Kepulauan Talaud ini memiliki basis militan dan pendukung fanatik.

Namun, apabila diberikan tugas oleh PDIP, spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi pendamping Steven Kandouw, mantan Ketua DPRD Sulawesi Utara, telah menarik perhatian.

Dalam hal ini, pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik Manuel Tumbelaka, menyampaikan beberapa pilihan yang mungkin. Dia mengungkapkan beberapa opsi yang mungkin untuk menjadi 'pendamping' Steven Kandouw.

Pertama, dari kalangan internal partai, terdapat beberapa kader potensial yang bisa dianggap. Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dan Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap, adalah beberapa nama yang muncul.

"Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung yang berhasil mengembalikan kejayaan PDIP di Kota Bitung, juga bisa menjadi pilihan," katanya.

Selanjutnya, Tumbelaka menyebutkan opsi lain dari kalangan birokrat. Kepala Dinas Sosial Sulawesi Utara, Rinny Tamuntuan, yang saat ini memegang amanah sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, serta Gammy Asiano Kawatu (AGK), seorang birokrat senior yang baru saja pensiun merupakan opsi yang layak dipertimbangkan.

AGK pernah menjadi kandidat di Pilkada Minahasa Selatan. Meskipun tidak berhasil memenangkan pemilihan, dia meraih kemenangan di putaran pertama.

> **Semoga Pilkada 2024 aman, tenteram, damai terpilih lagi Pak Wagub (Steven Kandouw). Dua periode saya bersama Steven. Steven sangat tahu apa yang saya perbuat dalam kebijakan kebijakan saya.**

Tumbelaka menekankan, baik Rinny Tamuntuan maupun Gammy Kawatu memiliki kekuatan politik dan kemampuan untuk bersinergi dengan Steven Kandouw dalam menjalankan pemerintahan.

Selanjutnya, Tumbelaka mengulas tentang kemungkinan melalui koalisi partai. Meskipun kecil, peluang koalisi tetap terbuka dan jika terjadi, peluang terbesar berada di Partai Golkar.

Dalam hal ini, nama Tetty Paruntu, mantan Bupati Minahasa Selatan yang telah memimpin dua periode, menjadi pilihan utama. Tetty Paruntu memiliki dukungan kuat di Minahasa Selatan dan telah berhasil membawa anaknya ke kursi DPR melalui pemilihan legislatif.

Namun, Tumbelaka menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya dipilih oleh PDIP untuk menjadi pendamping dalam Pilkada Gubernur, akan sangat dipengaruhi oleh hasil Pemilihan Presiden.

Gubernur Sulawesi Utara yang juga Ketua DPD PDIP Sulut, Olly Dondokambey, juga mengirim sinyal bahwa penerusnya di Pilkada 2024 terus mengarah pada Steven Kandouw.

"Semoga Pilkada 2024 aman, tentram, damai terpilih lagi Pak Wagub (Steven Kandouw). Dua periode saya bersama Steven. Steven sangat tahu apa yang saya perbuat dalam kebijakan kebijakan saya," kata dia, Selasa, 25 Juli 2023.

Menurut Olly Dondokambey, masyarakat dapat melihat tentang sosok itu jikalau mereka puas dengan pemerintahannya. Dia menyebut masyarakatlah yang paling tahu siapa yang dapat melanjutkan kinerjanya.

"Kalau masyarakat puas dengan apa yang saya lakukan sebagai gubernur masyarakat sudah bisa melihat, yang bisa melanjutkan dengan baik ya siapa. Masyarakat yang berkeinginan, kalau mereka merasa saya dua periode bagus kebijakan sebagai gubernur tentunya bisa melihat yang paling tahu apa yang kita lakukan dan selama ini baik itu Wakil Gubernur," katanya.●

Pilkada Kaltim 2024

SIAPA BERANI LAWAN ISRAN NOOR

Sejumlah kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur mulai aktif mempersiapkan diri untuk mencari dukungan masyarakat di Benua Etam jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Namun, siapa yang akan menjadi figur utama di Kaltim dalam persaingan sengit antara para calon gubernur potensial yang muncul dalam beberapa waktu terakhir? Lembaga riset dan strategi ARCHI belum lama ini merilis hasil survei terkait Pilgub Kaltim 2024.

CEO ARCHI, Mukhradis Hadi Kusuma Jaya, mengungkapkan enam nama yang diprediksi memiliki peluang besar untuk menjadi kontestan utama dalam Pilgub Kaltim 2024. Mereka nantinya akan bersaing melawan petahana Isran Noor.

"Nama-nama ini memiliki potensi kuat untuk menjadi calon paling berpengaruh dalam Pilgub Kaltim nanti," ujar Mukhradis.

Isran Noor diperkirakan akan mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Kaltim pada 2024. Pria yang dikenal tenang dan berpengalaman ini akan melanjutkan perjuangannya mengingat dukungan yang luas dari masyarakat Kaltim.

"Tahun 2024 akan menjadi tahun yang berbeda bagi masyarakat Kaltim. Selain karena munculnya banyak penantang, Kaltim juga akan menjadi provinsi yang menjadi basis Ibu Kota Nusantara, yang akan menjadi pusat pemerintahan modern Indonesia," terangnya.

Mukhradis mengungkapkan, petahana akan menghadapi banyak lawan, terutama karena elektabilitasnya. Lawan-lawan politik petahana pun semakin bermunculan, terbuka bagi mereka yang bukan hanya figur biasa.

Terdapat enam kandidat kuat yang diprediksi akan maju dalam Pilgub Kaltim 2024. Salah satunya adalah Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Partai Gerindra telah mengumumkan niatnya untuk mengusung Andi Harun sebagai calon gubernur dalam Pilgub Kaltim 2024.

Sekretaris DPD Partai Gerindra, Seno Aji, telah secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Andi Harun sebagai bakal calon gubernur Kaltim. "Tapi kemungkinan Samarinda masih menginginkan beliau," ungkapnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Andi Harun telah menjabat sebagai Wali Kota Samarinda selama satu periode, masih ada potensi untuknya maju dalam Pilkada Samarinda.

Namun, peluang Andi

Harun untuk maju dalam Pilgub Kaltim juga terbuka luas. Hal ini dikarenakan posisinya saat ini sebagai Ketua DPW Partai Gerindra Kaltim.

Dengan latar belakang Andi Harun yang merupakan kader partai dan memiliki pengalaman sebagai wali kota, ia akan menjadi salah satu kontestan potensial dalam pesta demokrasi tersebut.

Nama lain yang ikut populer adalah Rudy Mas'ud. Partai Golkar telah menyiapkan Rudi Mas'ud untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilgub Kaltim 2024.

Dikenal sebagai legislator yang akrab dan suka menolong, Rudy Mas'ud dianggap berpotensi maju sebagai kandidat dari Partai Golkar. Elektabilitasnya juga mengalami peningkatan seiring dengan kegiatan politiknya dalam setahun terakhir.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menegaskan, hanya ada satu nama yang akan diusung sebagai calon gubernur Kaltim dari partai beringin.

Hasanuddin Mas'ud mengakui bahwa sebelumnya terdapat beberapa nama dengan dukungan suara terbanyak. Namun, Partai Golkar tetap bersatu dalam memberikan dukungan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas'ud.

"Pada Pemilihan 2019, suara terbanyak diperoleh oleh Pak Makmur, diikuti oleh Pak Mahyudin yang sudah tidak dalam pertimbangan. Namun, rencana kami ke depan adalah untuk tetap mendukung Ketua kami," katanya.

Hasanuddin Mas'ud mengungkapkan bahwa untuk memperkuat posisi mereka dalam Pilkada 2024, partainya akan membentuk koalisi dengan partai lain.

"Kami pasti akan menjalin koalisi, mengikuti arahan nasional," ujarnya.

Hasanuddin Mas'ud juga memastikan bahwa Partai Golkar memiliki dukungan kuat di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, sehingga mereka yakin dapat memenangkan Pilkada.

"Kami memiliki kekuatan di semua wilayah, tanpa terkecuali," tegasnya.

Mengenai Pilkada di tingkat kabupaten/kota, terkait dengan posisi wali kota dan bupati, Hasanuddin Mas'ud saat ini belum dapat memberikan informasi lebih lanjut. Hal ini karena pembahasan tersebut masih dalam lingkup internal partai.

"Kami akan membahasnya secara internal dalam partai. Saat ini kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut," ujarnya.

Nama lainnya yang potensial maju di Pilgub Kaltim 2024 adalah Hadi Mulyadi yang saat ini menjabat sebagai wakil gubernur petahana. Hadi Mulyadi juga memiliki basis dukungan yang khas. Gaya kepemimpinannya yang santai dan santun telah memenangkan hati publik Kaltim.

Namun, Hadi Mulyadi mengisyaratkan bahwa dirinya ingin Kembali maju Bersama Isran Noor. Pria yang kini menjadi Ketua DPW Gelora Kaltim ini mengatakan ingin lebih dulu fokus di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Kan begini. Ada pemilihan legislatif, baru pilgub. Jadi Pileg dulu dong yang pertama. Saya ikut ke sana dulu karena saya ketua partai. Kewajiban saya untuk membesarkan. Setelah pileg itu hasilnya apa, baru kita mikir," ungkap Hadi.

Ditanya apakah dirinya masih akan kembali maju bersama Isran Noor atau tidak pada 2024 nanti, Hadi enggan memberi jawaban spesifik. "Saya sami'na wa atho'na," ungkapnya singkat.

Hadi juga ditanya perihal apakah mantan politisi PKS itu ada keinginan untuk maju sebagai orang nomor satu di Kaltim.

"Enggak etis kalau saya maju. Enggak ada (keinginan). Kalau beliau (Isran Noor) masih maju, saya enggak punya keinginan. Selama beliau masih mau maju, saya tidak akan. Kalau beliau maju, dan minta dampingi, saya dampingi," ungkapnya.

Pada intinya, Hadi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya akan fokus pada pileg terlebih dahulu. Persiapan itu pun sudah dilakukan sejak dini.

Nama Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, belakangan ini juga muncul sebagai salah satu kandidat yang berpotensi maju dalam Pilgub Kaltim 2024. Dengan pengalaman panjang sebagai politisi, ia memiliki pemahaman mendalam terhadap politik Kaltim.

Ada juga Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, yang telah muncul dalam survei publik. Selain karena kinerjanya yang terkini, jaringan politiknya di Kaltim membuatnya menjadi kandidat yang dihitung dalam opini publik. Terlebih lagi, ia berhasil membagi pemilih di Kaltim.

Selanjutnya adalah Safaruddin yang merupakan seorang legislator dan mantan polisi. Pengaruh Safaruddin dalam mencuri simpati publik cukup besar. Kehadirannya yang dekat dengan masyarakat telah membuatnya muncul sebagai kandidat potensial dalam Pilgub Kaltim 2024.●

Pilkada DKI Jakarta 2024

PERTARUNGAN TOKOH MUDA BEREBUT TAHTA IBU KOTA

Bursa calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mencuatkan nama tokoh muda yang digadang-gadang akan bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di ibu kota.

Dari berbagai lembaga survei, sejumlah tokoh muda bermunculan, mulai dari Gibran Rakabuming, Bima Arya, Emil Dardak, Abdullah Azwar Anas, Ahmad Sahroni, hingga Witjaksono.

Hasil penelitian mengenai big data dan pemantauan media menunjukkan adanya pergeseran dalam paparan data terkait calon gubernur DKI Jakarta sejak Januari hingga Juni 2023.

Menurut Direktur PoliEco Digital Insights Institute, Anthony Leong, penelitian dilakukan untuk menganalisis perubahan data pemilih dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024.

"Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa dalam benak publik, nama calon gubernur DKI Jakarta 2024 yang paling mendominasi adalah Gibran Rakabuming dengan tingkat elektabilitas 31 persen, diikuti Ahmad Sharoni 27 persen. Namun, data yang kami analisis masih terbatas karena percakapan yang dominan masih berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2024," ujar Anthony.

Selain nama-nama yang menjadi "Top of Mind" dalam pemilihan, terdapat beberapa tokoh lain yang masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta 2024. Mereka antara lain Tri Rismaharini, Heru Budi Hartono, Grace Natalie, Ahmad Zaki Iskandar, Fadil Imran, Dudung Abdurachman, Airin Rachmi Diany, dan Erwin Aksa.

"Penelitian big data dan pemantauan media dapat menjadi salah satu referensi penting untuk mengukur elektabilitas dan popularitas dari perspektif digital," ujar pakar digital tersebut.

Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) telah melaporkan hasil survei mereka mengenai penilaian kinerja dan proyeksi Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut hasil survei ini, dalam kelompok tokoh muda, Gibran Rakabuming menduduki peringkat pertama sebagai calon pilihan utama, diikuti oleh Bima Arya dan Emil Dardak yang juga populer di mata responden.

Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif'an, menjelaskan, hasil survei ini didapatkan melalui wawancara tatap muka yang dilakukan pada rentang waktu 11-18 Mei 2023.

"Kami juga melaksanakan simulasi dengan menggunakan kelompok tokoh muda. Dari simulasi ini, di antara tujuh calon gubernur DKI Jakarta yang diuji, Gibran Rakabuming Raka menduduki peringkat teratas, diikuti oleh Bima Arya dan Emil Dardak," ungkap Irfan.

Terkait dengan hasil survei tersebut, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming merespons positif hasil survei ASI yang menempatkannya sebagai tokoh muda dengan peringkat tertinggi dalam daftar cagub DKI Jakarta.

"Saya berterima kasih atas hasil survei dari lembaga ini. Namun, jika berbicara tentang status tokoh muda, saya sudah tidak muda lagi, mengingat saya sudah memiliki dua anak," ujar Gibran.

Gibran juga mengungkapkan, pada saat ini, dia lebih

fokus untuk menyelesaikan tugas sebagai pemimpin di Surakarta dan belum benar-benar memikirkan aspirasi politik yang lebih besar.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, telah mengungkapkan sejumlah kepala daerah yang masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan kader sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Kami mencari kepala daerah yang diyakini mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh Mas Gibran," ujar Gembong.

Menurut PDIP, Gibran adalah salah satu kepala daerah yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan pemerintahan masa lalu di Solo dengan kepemimpinannya saat ini.

"Salah satu hal yang menonjol bagi kami adalah kemampuan Gibran dalam membangun kelanjutan pemerintahan dari masa sebelumnya dan mengadaptasikannya dengan baik dalam kepemimpinan saat ini, dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya," ungkapnya.

Nama Ahmad Sahroni juga ramai diperbincangkan sebagai cagub DKI Jakarta 2024. Partai NasDem akan mengusung Ahmad Sahroni untuk menjadi cagub dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menyinggung soal kemungkinan dirinya maju atau tidak di Pilgub DKI Jakarta saat bersilaturahmi dengan tim pemenangan yang tergabung dalam Ahmad Sahroni Center (ASC) di Sunlake Hotel, Sunter, Jakarta Utara, Minggu, 16 April 2023.

Melalui forum itu, Sahroni ingin membuka ruang interaksi seluas-luasnya sekaligus mempererat solidaritas timnya. Sebab, wakil ketua komisi III DPR itu menganggap ASC seperti keluarga.

Dia pun menginginkan agar ASC ke depan makin lebih solid dan bertambah secara kuantitas maupun kualitas. Sebab, politikus yang dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok itu mengaku tidak mengetahui bagaimana jalannya ke depan, termasuk karier politiknya.

Oleh karena itu, Sahroni bersama tim ASC hanya bisa berupaya mempersiapkan yang terbaik. "Saya tidak tahu arah garis tangan ini akan membawa saya ke mana. Saya hanya bisa lakukan yang terbaik dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT," ujar Sahroni.

Bicara soal keinginan, suami Feby Belinda itu mengaku punya mimpi yang tinggi. Namun, dia masih menunggu arahan ketua umum partainya.

"Kalau bicara keinginan, mimpinya sih jadi presiden. Gubernur (DKI)? Lihat nanti," lanjut Sahroni.

Soal pencalonannya di Pilkada DKI Jakarta 2024, Sahroni sebagai kader menunggu perintah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. "Intinya sebagai kader saya tunggu perintah ketum saya saja," ujarnya.

Selanjutnya, yang juga tidak kalah menyita perhatian adalah nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang ikut mencuat sebagai cagub DKI Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah mempertimbangkan untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat atau Pilgub DKI Jakarta.

Sang ibu, Tjutju Sukaesih, yang akrab dipanggil Maci, telah memberikan dukungan jika anaknya memutuskan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun, Ridwan Kamil menyatakan bahwa dukungan sang ibu hanya merupakan nasihat.

"Kalau Maci mah seorang ibu, pasti selalu memberi nasihat yang paling baik. Poinnya adalah mana yang terbaik. Kalau memang harus di tempat baru, ya pilihan DKI itu jadi sebuah nasihat, bukan berarti tidak ya karena per hari ini masih di Jabar," ungkap Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Menurutnya, jika tidak kembali maju dalam Pilgub Jawa Barat, maka DKI Jakarta akan menjadi pilihan yang lebih rasional. Namun, dia juga berpendapat bahwa saat ini masih terlalu dini untuk mengambil keputusan tersebut. Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa ia akan menunggu hasil dari Pilpres dan Pileg 2024.

"Jika ditanya mengenai pilkada, ini masih terlalu awal. Kita tunggu saja hingga bulan Februari karena persentase kursi partai dalam legislatif belum pasti, apakah bisa maju sendiri atau harus berkoalisi untuk mengusung calon gubernur. Oleh karena itu, masih ada waktu yang cukup panjang," ulasnya.●

Pilkada Sumsel 2024

PESAING PETAHANA MULAI TEBAR PESONA

Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan pada 2024 akan digelar satu tahun mendatang. Namun, bursa calon gubernur yang akan menjadi pesaing petahana, Herman Deru, kini mulai bermunculan. Beberapa nama bahkan sudah memaparkan program kerja jika terpilih sebagai orang nomor satu di Bumi Sriwijaya.

Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan saat ini, telah menyatakan niatnya untuk maju dalam Pilgub Sumsel 2024. Saat ini, masa jabatan Herman Deru dan Wakilnya, Mawardi Yahya, akan berakhir pada 1 Oktober 2023.

"Bismillahirrahmanirrahim, mohon doa dan dukungannya maju lagi (Pilgub)," tegas Herman Deru belum lama ini.

Herman Deru juga mengonfirmasi bahwa Mawardi Yahya akan tetap menjadi calon wakilnya di Pilgub Sumsel 2024. Padahal, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, telah memerintahkan agar Herman Deru maju sebagai calon anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Sumsel II.

Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumsel, Syamsul Bahri, mengatakan, hingga saat ini mereka masih menunggu arahan dari DPP Partai Nasdem soal siapa yang bakal diusung dalam Pilgub Sumsel pada November 2024.

"(Soal pencalonan Herman Deru) sudah di koran, (kalau dukungan parpol) Tergantung dari DPP, bukan soal dukung mendukung tapi ini (kewenangan) DPP, " kata Syamsul, Senin, 7 Agustus 2023.

Menurut Syamsul, keinginan Herman Deru untuk kembali maju pada Pilgub Sumsel 2024, tentunya harus mendapat petunjuk dari pusat, meskipun dia merupakan Ketua DPW Sumsel. Namun, sejauh ini belum ada petunjuk tersebut.

"(Soal pasti didukung) Belum tahu kita tergantung DPP nya, kalau DPPnya take off, take off kita," kata Syamsul.

Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sumsel ini menambahkan, tidak ada kriteria Partai Nasdem mengusung calon kepala daerah di suatu daerah. "Partai inikan diatur DPP rumah tangganya. Tidak ada biasa-biasanya dan kriteria yang penting petunjuk DPP, laksanakan ya laksanakan itu bae kita, " katanya.

Di sisi lain, Mawardi mengatakan bahwa dirinya dan Herman Deru tidak ada masalah, sehingga dia meminta untuk didoakan yang terbaik.

"Nanti Insya Allah mudah-mudahan karena sampai sekarang antara saya dengan Pak Gubernur tidak ada permasalahan-permasalahan, mudah-mudahan kita doakanlah yang terbaik," kata Mawardi Yahya, Rabu, 9 Agustus 2023.

Namun, ketika disinggung apakah maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, Mawardi mengatakan bahwa belum tahu. "Nanti, belum ada rencana itu ya," ujarnya.

Ketika ditanya apakah mencalonkan perlu dana miliaran, Mawardi tidak membantahnya. Namun, dana yang diperlukan tentunya untuk dana operasional.

"Ya sebenarnya segala sesuatu itu pasti membutuhkan dana. Dana paling tidak, dana operasional," ungkapnya.

Bukan hanya soal dana, kata Mawardi, figur juga harus menjadi pilihan. Sebab, masyarakat akan melihat latar belakangnya. "Tapi di balik itu tetap figur bagaimana masyarakat melihat latar belakang kita, citra kita, tentunya itu dulu yang utama bukan semata-mata biaya. Tapi biaya tetap," ujarnya.

Niatan Herman Deru untuk maju Kembali di peri-

ode kedua dipastikan tidak akan mudah. Sebab, Ketua DPD NasDem Sumsel ini bakal mendapatkan persaingan yang cukup berat dari kandidat lainnya.

Beberapa nama yang dikabarkan akan maju di Pilgub Sumsel 2024 sudah cukup dikenal masyarakat. Mereka di antaranya mantan Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra; mantan Wakil Gubernur Sumsel 2013-2018, Ishak Mekki; Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Heri Amalindo; hingga Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe.

Mantan Wali Kota Palembang yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI, Eddy Santana Putra, menyatakan akan maju di Pilgub Sumsel 2024. Ada beberapa alasan mengapa Eddy Santana Putra berniat maju di Pilgub Sumsel 2024, di antaranya ingin membuat Sumsel lebih maju dan berkonsep.

Saat menjadi anggota DPR, Eddy Santana Putra juga banyak menerima masukan dan dukungan. Salah satunya soal pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang hingga kini terkesan mangkrak.

"Kita ingin Pelabuhan Tanjung Carat direalisasikan dengan segera, karena ini menjadi penunjang ekonomi untuk Sumsel. Semua hasil pertanian dan lainnya bisa diserap dengan adanya pelabuhan," terang Eddy.

Kemudian, sektor pariwisata juga menjadi perhatian penting Eddy karena di Sumsel masyarakatnya kurang hiburan.

Kandidat lainnya, Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, dianggap sebagai salah satu kandidat yang cocok untuk ikut dalam pertarungan menjadi orang nomor satu di Sumsel tahun depan.

"Saat ini fokus adalah untuk menjadi anggota DPR RI terlebih dahulu," kata Nanan sapaan SN Prana Putra Sohe.

Nanan merasa bersyukur bahwa namanya telah diajukan dalam proses penjaringan. Baginya, segala kemungkinan bisa terjadi di masa depan. "Namun, tentu kita tidak dapat memprediksi masa depan. Oleh karena itu, fokus saya adalah menjadi anggota DPR RI," ucapnya.

Nama calon gubernur Sumsel lainnya yang tidak asing adalah mantan Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki, yang telah menyampaikan tekadnya untuk berkompetisi dalam Pilgub Sumsel 2024.

"Saya siap untuk maju (Sumsel 1) jika partai menginginkannya. Sebagai kader, kesiapan adalah hal yang penting," tegas Ishak Mekki.

Terkait isu bahwa dirinya masih menjadi salah satu calon potensial dalam Pilgub Sumsel 2024, Ishak Mekki menyatakan rasa bangganya terhadap masyarakat yang telah menjaga suasana politik yang kondusif di Sumsel.

"Saya merasa bangga dengan masyarakat Sumsel. Meskipun intensitas politik semakin meningkat dan situasi semakin panas, namun kondusifitas di Sumsel tetap terjaga," ungkapnya.

Ishak Mekki telah menyatakan optimisme dalam menghadapi Pilgub Sumsel 2024, mengingat semua calon potensial akan bersaing sejak awal.

Sosok lainnya yang sudah mulai memperkenalkan diri sebagai calon gubernur Sumsel 2024 adalah Heri Amalindo yang saat ini menjadi Bupati PALI. Heri bahkan telah membentuk posko pemenangan yang diberi nama Rumah Bersama Heri Amalindo.

Ketua Tim Pemenangan, Firdaus Hasbullah, menjelaskan, mereka sering mendapat pertanyaan mengapa provinsi yang kaya masih memiliki masyarakat yang tidak sejahtera. Tanpa meremehkan pembangunan lima tahun terakhir, mereka prihatin dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, Firdaus berpendapat bahwa Sumsel membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi untuk masa depan.

Firdaus menegaskan, Heri Amalindo memiliki kapasitas untuk meneruskan kejayaan Sumsel seperti yang dicapai oleh Gubernur Alex Noerdin. Pada masa itu, Sumsel menjadi pusat olahraga, budaya, pariwisata, perdagangan, dan industri dan dikenal baik di Indonesia maupun internasional.

Salah satu fokus utama Heri Amalindo adalah mengembalikan program berobat dan sekolah gratis. Apalagi, hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 69 persen masyarakat masih menginginkan program ini.

Selain itu, Heri berencana untuk mengatur ulang regulasi terkait program berobat dan sekolah gratis, sehingga masyarakat miskin dapat tercakup oleh program BPJS tanpa perlu membayar setiap bulan.

Firdaus juga membahas program infrastruktur berkelanjutan, terutama jalan dan jembatan. Heri Amalindo dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang infrastruktur ini. Selain program-program tersebut, Heri Amalindo telah menerima masukan dan saran dari berbagai tokoh Sumsel.

Firdaus menyoroti bahwa Sumsel, meskipun merupakan salah satu provinsi terkaya kelima, namun juga kategori provinsi termiskin kesepuluh di Indonesia. Oleh karena itu, program-program yang berfokus pada sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat mengatasi masalah ini.•

Atasi Buruknya Udara di Jakarta

PJ GUBERNUR DKI HARUS MINTA NASEHAT MANTAN GUBERNUR

Polusi udara Jakarta tengah jadi sorotan. Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta masuk dalam kategori mengkhawatirkan dan tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Pada 13 Agustus 2023, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir, kualitas udara di Jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Saat itu, Indeks Kualitas Udara di Jakarta berada di angka 170 atau berada dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5.

Untuk menangatasi polusi udara di Jakarta, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023. Sejumlah wacana kebijakan pun dibahas untuk mengatasi polusi udara tersebut.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi bersama para menterinya merencanakan sejumlah upaya mengatasi polusi udara di Jakarta, yaitu:

1. Sistem Kerja Hybrid untuk ASN dan Swasta

Presiden Jokowi berencana melakukan hybrid working di DKI Jakarta. Jokowi memberi sinyal total pekerja yang bekerja dari rumah berkisar 25-75 persen. Namun, Kepala Negara menyatakan besaran pekerja yang bekerja dari rumah akan ditentukan dalam rapat terbatas selanjutnya.

"Kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, yakni gabungan antara work from office dan work from home," kata Jokowi.

Di sisi lain, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, akan mengurangi pekerja pemerintah daerah yang datang ke kantor hingga 60 persen. WFH hanya akan dilakukan pada PNS yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti di bagian perencanaan.

"WFH itu 50-60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kami minta kementerian lain juga bisa melakukan bersama WFH," kata Heru.

2. Penerapan 4 in 1

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berencana merevisi kebijakan 3 in 1 dan akan menerapkannya kembali menjadi 4 in 1 untuk mengatasi polusi Jakarta. Artinya, setiap mobil yang melewati Jakarta wajib memiliki empat penumpang,

termasuk supir.

Budi menilai kebijakan tersebut akan mengurangi jumlah mobil di Ibu Kota, khususnya orang-orang yang datang dari kota penyangga DKI Jakarta.

"Katakanlah mereka dari Bekasi, Tangerang, atau Depok. Mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya sehingga jumlah mobil di Jakarta akan menurun," kata Budi.

Kebijakan 3 in 1 pernah diterapkan di Jakarta, namun dihapus pada Mei 2016. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan plat nomor ganjil genap untuk sejumlah jalan di ibu kota.

3. Razia Uji Emisi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan, penyebab utama tingginya polusi udara DKI Jakarta adalah kendaraan. Berdasarkan catatan KLHK, terdapat 24,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta sepanjang 2022.

"Sebanyak 19,2 juga di antaranya adalah sepeda motor," kata Siti Nurbaya.

Siti menjelaskan pengujian emisi kendaraan merupakan langkah penurunan polusi udara di Jakarta yang paling cepat. Oleh karena itu, Siti menjamin peningkatan pengujian emisi kendaraan pribadi akan langsung berdampak pada penurunan polusi udara.

Dia mencatat presentasi kendaraan yang telah melalui uji emisi di DKI Jakarta baru mencapai 10 persen. Di Jakarta Pusat, total kendaraan yang telah melakukan uji emisi hanya 3,86 persen, sedangkan di Jakarta Utara sekitar 10,69 persen.

"Gubernur DKI Jakarta sudah menyampaikan akan segera melakukan pelaksanaan razia uji emisi untuk kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor," kata Siti.

4. Perketat Pengawasan Polusi untuk Industri

Menurut Siti, Presiden Jokowi juga meminta melakukan pengecekan terhadap industri manufaktur sebagai penyumbang polusi udara. Apalagi Jabodetabek juga merupakan daerah industri.

Siti mengatakan, pemerintah akan lebih ketat dalam menerapkan regulasi industri terkait dengan polusi udara.

"Jadi saya sudah mencatat di sini standar-standar yang harus dikeluarkan untuk cerobong industri. Tadi bahkan bapak Presiden tanya spesifik, berapa sih harganya?" ujarnya.

5. Pajak Polusi Udara

Siti mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan formula perhitungan pajak pencemaran lingkungan dalam pajak kendaraan bermotor. Kendaraan dengan emisi yang tinggi akan terkena "pajak denda".

Menurut dia, pajak kendaraan yang akan melonjak setelah memasukkan koefisien tersebut. Oleh sebab itu, perlu sosialisasi yang cukup terkait integrasi koefisien tersebut dalam perhitungan pajak kendaraan bermotor.

Siti mengatakan ketentuan pajak tersebut telah lama memiliki payung hukum. "Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2021 sudah ada Pasal 206 tentang penyelenggaraan perlindungan lingkungan. Secara teknis, pasal tersebut menjelaskan pengenaan pajak pencemaran lingkungan," kata Siti.

Adapun, peraturan turunan terkait pengenaan BME akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, Siti menjelaskan uji emisi akan menjadi syarat wajib dalam proses pemenuhan pajak kendaraan.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengajak masyarakat bergotong-royong. Masyarakat juga perlu bersama-sama menanggulangi polusi udara karena akibatnya juga ditanggung secara bersama.

Selain disebabkan oleh industri, kata dia, polusi yang melanda kota-kota besar juga diakibatkan oleh kendaraan pribadi milik masyarakat. Menurutnya, alih-alih menggunakan kendaraan pribadi, memakai kendaraan umum akan lebih baik.

"Kalau bisa mengandalkan kendaraan umum itu juga akan lebih baik," ujarnya.

Wamenkes mengimbau masyarakat untuk kembali menggalakkan kebiasaan memakai masker, terutama di tempat-tempat yang memiliki kualitas udara buruk.

Dia menyebut, pemerintah secara bersama-sama tengah melakukan evaluasi terkait penyebab polusi. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah atau upaya guna menanggulangi polusi udara secara komprehensif.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Jakarta dan sekitarnya untuk menetapkan status bahaya pada dampak kualitas udara di wilayah-wilayah itu. Hal ini dilakukan agar dapat dilakukan langkah penanganan yang tepat guna mencegah dampak buruk yang meluas, terutama pada kesehatan masyarakat.

Bamsoet pun meminta pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada masyarakat penyebab polusi udara di Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia.

"Serta segera menyusun langkah dan kebijakan jangka menengah dan panjang guna memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan wilayah sekitar," kata Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengatur kendaraan pribadi di jalan, mengaudit industri-industri penghasil emisi, penerapan industri hijau, melakukan reboisasi secara berkala, hingga meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pembakar sampah ilegal.

Pihaknya juga mendorong pemerintah mengingatkan masyarakat, terutama yang berada di ruang publik, untuk kembali menggunakan masker.

Bamsoet menyarankan pakai masker yang memiliki tingkat filtrasi baik. Tak hanya itu, Bamsoet juga mengingatkan untuk rajin mengonsumsi vitamin dan makanan bergizi untuk daya tahan tubuh yang baik.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan, salah satu cara yang paling efektif menghilangkan polusi udara adalah turunnya hujan. Menurutnya, banyak faktor membuat kualitas udara DKI Jakarta buruk, di mana 40 persen di antaranya berasal dari polusi kendaraan.

Menurut Heru, persentase tersebut tidak hanya dihitung dari banyaknya kendaraan milik warga Jakarta. Ini dihitung dari kendaraan yang masuk ke Jakarta dan yang ada di Jakarta.

"Kendaraan itu yang masuk ke Jakarta dan yang ada di Jakarta. Pulang pergi itu. Terus kendaraan yang melintas dari Jawa masuk ke Jakarta ke Sumatera, kira-kira itu," ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro, mengatakan pencemaran udara Jakarta meningkat sejak Juni karena dipengaruhi angin dari wilayah timur. Dia mengatakan sektor transportasi menyumbang emisi terbesar, yakni 44 persen.

"Jadi kalau dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta itu bahan bakar itu adalah sumber emisi, itu adalah dari batu bara 0,42 persen, dari minyak itu 49 persen, dan dari gas itu 51 persen. Kalau dilihat dari sektor-sektornya, maka transportasi itu 44 persen, industri 31 persen industri energi, manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen," kata Sigit.

"Ini lebih didetailkan lagi oleh kajian tersebut bahwa kalau SO2 (sulfur) memang berasal dari PLTU, manufacturing. Jadi manufacturing, pembangkit tenaga listrik dari industri manufacturing 61,96 persen. Kalau yang lainnya NoX, Co PM 10, PM 2,5, black carbon, kemudian organic carbon itu sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor," sambung Sigit.

Sigit juga mengatakan hujan paling berpengaruh untuk menurunkan polusi udara di Jakarta. Sebab, hujan mampu membilas udara yang ada.

"Boleh enggak kita berdoa bersama hujan turun? Kalau angin enggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau yang paling berpengaruh adalah hujan, karena dia akan membilas udara yang ada di Jakarta. Nah, yang paling efektif adalah hujan itu," ujar Sigit.

Sigit mengatakan tak ada solusi instan untuk mengatasi polusi udara yang terjadi. Menurut Sigit, pencemaran udara ini sudah terakumulasi sejak lama. Dia pun mencontohkan fenomena pohon-pohon yang ada di Surabaya yang terbukti menurunkan suhu udara. Menurut Sigit, jika suhu udara dapat dikurangi maka reaksi kimia dapat diperlambat.

"Memang (ruang terbuka hijau) ada pengaruhnya. Tapi seberapa besar saya perlu cari lagi. Tapi kami di KLHK sudah menerbitkan panduan pohon-pohon yang bisa menyerap parameter-parameter pencemar, misalnya ada tanaman apa yang bisa menyerap AO2 segini," kata Sigit.

"Di Surabaya itu ada fenomena terbalik, ada pohon-pohon yang bisa menurunkan relatif satu derajat atau berapa gitu. Artinya kalau cahaya matahari, ke-

mudian suhu, bisa dikurangi, maka reaksi kimianya pun bisa diperlambat, kemudian pohon-pohon menahan debu, dan juga bahan-bahan pencemar ada penelitian yang bisa membuktikan itu," sambungnya.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai, Pemprov DKI Jakarta harus menetapkan status bahaya polusi di Ibu Kota.

"Dengan kondisi udara yang buruk dan suhu udara yang ekstrem, harusnya pemerintah DKI Jakarta menetapkan status berbahaya bagi kesehatan," ujar Nirwono, Senin, 14 Agustus 2023.

Dia mengatakan, Pemprov DKI semestinya mengambil kebijakan yang tegas dan signifikan untuk menangani polusi di Ibu Kota. Nirwono mengusulkan tiga fokus penanganan polusi tinggi di Jakarta. Pertama, soal pengembangan transportasi publik yang terpadu dalam jangka panjang serta ideal untuk masyarakat.

"Kedua, pembatasan kendaraan pribadi ke pusat kota, perluasan ganjil genap se-Jabodetabek berlaku untuk semua kendaraan pribadi, baik mobil dan motor, baik yang BBM fosil maupun listrik," ungkap Nirwono.

Dia juga menyarankan penerapan jalan berbayar elektronik untuk semua kendaraan pribadi, rekayasa lalu lintas dengan menutup u-turn, jalan satu arah pada jam sibuk, dan peniadaan parkir liar ataupun parkir tepi jalan. Pembenahan ulang tata ruang kota di Jabodetabek pun diperlukan dengan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau.

"Pengembangan TOD (transit oriented development) di titik simpul transportasi massal, pembangunan trotoar dan jalur sepeda ke permukiman di sekitar koridor transportasi massal," jelas Nirwono.

Nirwono menambahkan, 75 persen polusi udara disumbang dari sektor transportasi. Pasalnya, saat ini mayoritas warga menggunakan kendaraan pribadi. Pengguna transportasi publik hanya 10 persen.

"Sementara 90 persennya pengguna kendaraan pribadi dengan komposisi pengendara motor 21 juta, dan pengendara mobil 4 juta setiap harinya. Jadi sektor transportasi yang harus dibenahi total, di samping transformasi hijau PLTU atau batu bara di Muara Angke dan sekitar Jakarta ke energi baru terbarukan," tutur Nirwono.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengkritisi upaya pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. Menurut dia, upaya yang dilakukan pemerintah dinilai hanya bergerak di tataran politik.

Hal itu disampaikan menanggapi tidak maksimalnya kebijakan penerapan uji emisi kendaraan, alih-alih menerapkan work from home (WFH) untuk atasi masalah polusi udara. Terlebih mengenai gugatan yang dimenangkan oleh warga pada 16 September 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat men-

genai hak atas udara bersih, yang justru dilawan oleh pemerintah sendiri.

"Yang digugat mulai dari Presiden, menteri, sampai gubernur, apa yang terjadi? Mereka bukannya melaksanakan putusan itu, malah kasasi. Kalau kasasi berarti memperpanjang lagi. Kalau gugatan publik ya putusannya tinggal dilaksanakan kenapa malah kasasi? Ini kan menunjukkan ketidakseriusan. Jadi dalam hal ini kita melihat memang pemerintah selalu bermain di tataran politik saja," kata Trubus.

Trubus sangat menyayangkan sikap pemerintah melayangkan kasasi karena hal itu menunjukkan bentuk ketidakberpihakan pemerintah pada publik. Pengajuan kasasi diketahui dilakukan pada 13 Januari 2023. Pengajuan kasasi itu hingga saat ini masih berproses, Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (Ibukota) selaku penggugat masih menunggu hasilnya.

Lalu, ketidakseriusan juga terlihat dari adanya kebijakan pemberlakuan uji emisi kendaraan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Beleid yang mengatur itu adalah Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan.

Menurut Trubus, pergub itu sudah cukup komplet sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara, namun tidak direalisasikan.

"Pergub 66/2020, sudah ada di situ, sudah mengatur semua tinggal diterapkan. Selama ini kan tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, akibatnya persoalan polusi muncul seolah-olah ada kebakaran jenggot," tutur Trubus.

Sementara itu, terkait dengan WFH yang diinstruksikan Presiden Jokowi, Trubus mengungkapkan, WFH tidak akan efektif untuk mengendalikan pencemaran udara di Ibu Kota dan wilayah sekitarnya. Kebijakan itu dinilai sulit diterapkan karena dampaknya luas pada produktivitas pekerja dan perusahaan, terlebih pada perusahaan swasta yang sifatnya hanya bisa berupa imbauan.

"Kan kalau swasta, pemerintah juga harus memberikan kompensasi kepada swasta dong. Enggak bisa kebijakan itu seolah kamu harus patuh, yang ada paling cuma surat edaran atau imbauan. Kalau seperti itu ya enggak efektif," tutur Trubus.●

MENANTI NAMA PENJABAT GUBERNUR

Sebanyak 170 kepala daerah akan akan berakhir masa jabatannya pada tahun ini dan digantikan penjabat kepala kepala daerah yang ditunjuk pemerintah. Sebagai penggantinya, perlu diangkat 17 penjabat gubernur, 115 penjabat bupati, dan 38 penjabat wali kota. Jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan 2022, yaitu 101 penjabat kepala daerah.

Sepuluh gubernur yang habis masa jabatannya pada September 2023 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Papua.

Selain 10 gubernur tersebut, ada tujuh gubernur lainnya yang akan diganti dengan penjabat gubernur pada akhir 2023. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor akan habis masa jabatannya pada Oktober 2023.

Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba akan diganti pada Desember 2023. Kelimanya sebenarnya baru akan berakhir masa jabatannya pada 2024, tapi terpaksa harus mengakhiri masa jabatan pada Desember 2023.

Gubernur yang belum menjabat lima tahun tetapi harus berakhir masa jabatannya pada Desember 2023 itu merupakan perintah Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Para gubernur yang harus lengser sebelum menjabat selama lima tahun itu akan mendapatkan kompensasi berupa gaji pokok dikalikan dengan sisa bulan menjabat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, pihaknya sudah menjaring nama-nama pejabat Eselon I struktural yang layak menjadi penjabat gubernur, terutama yang akan berakhir September 2023.

Tito tidak menyebutkan nama-nama

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian

yang masuk dalam daftar kandidat penjabat gubernur. Dia hanya mengatakan bahwa nama-nama yang dijaring merupakan sekretaris daerah provinsi dan pejabat Eselon I struktural dari kementerian/lembaga.

Tito mengungkapkan, nama-nama yang sudah dijaring itu akan diputuskan satu di antaranya untuk menjadi penjabat gubernur dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"TPA dilaksanakan mungkin tergantung waktunya Bapak Presiden, tapi kemungkinan besar pertengahan atau akhir bulan Agustus untuk menentukan (penjabat gubernur karena gubernur definitifnya habis masa jabatan) di bulan September, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan lain-lain," kata Tito di Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan, mengatakan, sesuai dengan Permendagri 4/2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, DPRD provinsi mengajukan usulan tiga nama untuk posisi penjabat gubernur. Begitu pula Mendagri mengusulkan tiga nama. Terkait dengan hal itu, Mendagri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga lain.

Enam usulan nama itu kemudian dibahas Mendagri untuk dikerucutkan menjadi tiga nama. Pembahasan itu dapat melibatkan kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Setelah diputuskan tiga nama, nama-nama itu diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden. Pengangkatan penjabat nantinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).

"Tidak hanya Kemendagri yang bisa mengusulkan, tetapi juga dari kementerian dan lembaga. Ada beberapa kementerian yang akan mengusulkan, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); hingga Perpustakaan Nasional," ujarnya.

Benni menambahkan, semua nama yang diusulkan bakal diproses secara setara, termasuk usulan dari pusat. Dia menegaskan, Kemendagri tidak akan memonopoli usulan di level pusat. "Tidak ada, langsung di bypass Kemendagri," tegasnya.

Benni menjelaskan, semua kementerian/lembaga yang memiliki pejabat yang memenuhi syarat bisa menyampaikan usulan. Nanti, usulan itu ditampung Kemendagri untuk dibicarakan bersama dengan K/L lainnya. Karena itu, dia menampik prasangka sebagian orang yang menganggap Kemendagri akan menentukan sendiri. "Seakan-akan dimonopoli Kemendagri. Enggak," sambungnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi menjanjikan proses pemilihan penjabat gubernur berbagai daerah di Indonesia akan berlangsung transparan.

"Apanya yang enggak akuntabel? Apanya yang enggak transparan? Wong masukannya dari bawah semua, kan dari daerah. Dari daerah, ya, kan. Ke Kemendagri, terus baru ini naik ke kita, (ke) TPA (Tim Penilai Akhir). Semuanya terbuka," kata Presiden Jokowi di Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, 4 Agustus 2023.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan.

Saat ini, DPRD Jawa Barat telah menentukan tiga nama bakal yang akan diusulkan menjadi penjabat gubernur Jabar menggantikan Ridwan Kamil. Ketiga nama itu adalah Dirjen Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM yang juga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Asep Mulyana; Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Keri Lestari; dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Triadi Machmudin.

"Belum sampai ke saya, iya sudah ada (dari DPRD), tapi belum sampai ke saya. Nama-namanya saya belum tahu, yang jelas ada tiga, yang dari DRPD dari bawah, ada tiga," kata Presiden Jokowi tersenyum sambil mengacungkan tiga jari.

Selain Jawa Barat, sejumlah DPRD provinsi juga sudah menentukan tiga nama yang akan diusulkan ke Kemendagri menjadi penjabat gubernur. DPRD NTB telah memutuskan usulan tiga nama calon penjabat gubernur dari enam usulan nama yang telah masuk. Mereka adalah Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD, Lalu Niqman Zahir; Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar Ali; dan Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi.

DPRD Sulawesi Tenggara juga mengusulkan tiga figur calon penjabat gubernur ke Kemendagri, yakni Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Prof Muhammad Zamrun F; Sekjen Kemenkumham yang juga mantan Kapolda Sultra, Komjen Pol Andap Budhi Revianto; dan Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio.

DPRD Sumatera Utara juga sudah menentukan tiga nama yang akan diusulkan menjadi penjabat gubernur Sumut pengganti Edy Rahmayadi. Tiga nama yang diusulkan itu yakni Sekretaris Daerah Sumut, Arief Sudarto Trinugroho; Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon; dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA. •

PEMBANGUNAN DESA SUDAH SESUAI TARGET

Perencanaan pembangunan di desa-desa seluruh Indonesia telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal itu terbukti salah satunya dari pemanfaatan dana desa 2023 yang lebih diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di desa.

Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, tahun ini, dana desa yang dipakai untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 45,7 persen dan SDM sebesar 37,1 persen.

"Artinya ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di desa-desa sudah on track dan itu karena pendamping desa," ungkap Abdul Halim dalam rapat sinergitas dan konsolidasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Banda Aceh, Senin, 7 Agustus 2023.

Gus Halim, sapaannya, mengatakan, besarnya total persentase dana desa 2023 untuk dua aspek tersebut menjadi bukti bahwa perencanaan dalam membangun desa telah sesuai dengan masalah yang dihadapi desa, potensi, dan data yang ada. Dia menekankan, dana desa boleh dimanfaatkan untuk apa saja asalkan berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM.

Menurutnya, keberhasilan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari hasil kerja keras TPP. Sehingga, diharapkan keberadaan tenaga ahli hingga Pendamping Lokal Desa (PLD) dapat dipublikasikan agar masyarakat mengetahuinya.

"Kalau pendamping tidak bisa kerja, pemanfaatan dana desa tidak sesuai aturan. Kalau pendamping tidak bisa kerja, maka saya tidak bisa lihat pembangunan di desa. Kalau pendamping tidak bisa kerja, maka saya tidak tahu apakah perencanaan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan masalah," tutur Gus Halim.

Gus Halim menambahkan, ketika semua desa di Indonesia telah berhasil mencapai status mandiri, maka pendampingan akan semakin berat. Sebab, fokusnya tidak lagi pada infrastruktur, tapi beralih pada pemberdayaan agar SDM semakin berkualitas seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Desa semakin mandiri semakin butuh pendamping. Makanya obsesi saya adalah satu desa satu pendamping. Karena tugasnya semakin berat," ucapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan keberadaan tenaga pendamping desa akan terus dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam pembangunan secara terpadu dan menyeluruh.

"Saya hanya minta agar soliditas di internal pendamping desa dikuatkan. Tujuan saya cuma satu, bagaimana keberadaan tenaga pendamping profesional eksis sampai kapan pun, karena memang desa membutuhkan Tenaga Pendamping Desa," ujarnya.

Dia mengungkapkan, tenaga pendamping desa telah memberikan kontribusi besar dalam memberikan pendampingan intensif kepada individu, masyarakat desa, dan kelembagaan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa secara terpadu dan menyeluruh. Oleh karena itu, dia meminta agar tenaga pendamping desa terus membantu dan memfasilitasi penyusunan dan penetapan ABPBDes di 2024. Sehingga hasilnya bermanfaat bagi terwujudnya iklim ekonomi dan SDM desa yang unggul.

"Tenaga pendamping harus benar-benar mendampingi agar APBDes 2024 proporsinya sebesar-besarnya untuk program-program kegiatan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan SDM desa," kata Gus Halim.

Keberhasilan pendamping desa, kata dia, akan menjadi indikator dan referensi data akurat yang akan dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan Rapat Kabinet Indonesia Maju.

"Dan itu akan saya potret nanti secara nasional, kondisi APBDes dan kita laporkan ke Presiden. Bisa kita tunjukkan bahwa ada progres signifikan dan semua itu tidak bisa terlaksana tanpa adanya pendamping profesional," tuturnya.

Gus Halim juga meminta pemerintah desa untuk lebih melibatkan perempuan dalam pembangunan desa. Dia menilai perempuan memiliki ketelitian lebih tajam yang dapat memberikan pengaruh besar. Salah satunya terhadap pemanfaatan keuangan, sehingga tidak disalahgunakan.

"Libatkan sebanyak-banyaknya perempuan dalam proses pembangunan," ujar Gus Halim.

Menurutnya, pembangunan yang melibatkan perempuan sering kali tertib dan bagus karena cenderung hati-hati dibandingkan laki-laki. Dia juga menilai, peran perempuan dalam pembangunan menjadi hal penting karena masuk sebagai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Global kelima, yakni kesetaraan gender, dan SDGs Desa tujuan kelima yakni keterlibatan perempuan desa.

"Diharapkan tidak ada lagi ketimpangan gender, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi sesuai perannya," tuturnya.

Gus Halim juga menekankan kepada kepala desa soal penggunaan dana desa yang boleh digunakan untuk berbagai hal asalkan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM di desa. Hal ini termasuk penggunaan dana desa untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), pengurangan stunting, maupun bantuan langsung tunai (BLT).

"Prinsipnya begini, dana desa bolehnya dipakai apa saja kecuali yang dilarang. Apa saja boleh dilakukan asal berkaitan langsung dengan dua aspek yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM," tegasnya.

Gus Halim mengingatkan pemerintah desa agar pembangunan di wilayah masing-masing tidak meninggalkan akar budaya. "Selalu saya tekankan, pokoknya bangun desa boleh apa saja, boleh smart digital, bahkan harus, teknologi harus masuk. Digital harus dikembangkan, tapi satu hal yang tidak boleh tercerabut dari akar budaya setempat," ujarnya.

Menurut dia, prinsip itu sesuai praktik tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) Desa ke-18, yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

"Supaya ruh pembangunan di desa itu tidak keluar dari akar budaya," kata dia.

Karena pentingnya mempertahankan akar budaya, Kemendes PDTT tidak akan membuat kebijakan pembangunan yang bersifat holistik dengan menyamaratakan karakter seluruh desa. Menurutnya, masing-masing desa memiliki karakter, budaya, bahkan bahasa lokal yang berbeda dan harus dipertahankan.

"Pembangunan yang bagus selalu kokoh di bumi meskipun kemudian cabangnya, daunnya, bunganya, dan hilirnya itu ke mana-mana, tapi hulunya tetap tertancap di bumi yang diukur dengan berfokus pada akar budaya," kata dia.

Agar pemerintah desa tetap dapat mengelola wilayah masing-masing, termasuk mempertahankan akar budaya, Kemendes PDTT telah menyusun tata wilayah desa. Tata wilayah tersebut nantinya dapat menjadi acuan pemerintah desa dalam menghadapi munculnya perumahan-perumahan baru yang keberadaannya tidak melibatkan desa.

"Saya kemarin dapat keluhan cukup banyak dari desa-desa di wilayah Kendal, Jawa Tengah, karena di pinggiran-pinggiran kota itu banyak perumahan baru yang cenderung tidak melibatkan pemerintah desa," ungkapnya.

Manajemen Dana Desa

Gus Halim juga menekankan pentingnya peningkatan manajemen pengelolaan dana desa yang berpotensi naik menjadi Rp5 miliar per desa mulai 2024. Dengan dana desa yang lebih besar, pembangunan fisik akan lebih cepat rampung.

"Konsekuensi-nya adalah manajemen dana desa harus jauh lebih bagus dari pada yang saat ini," kata Gus Halim.

Menurut Gus Halim, setelah pembangunan infrastruktur selesai, penting untuk memperhatikan pemeliharaan yang juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Untuk itu, pendamping desa diharapkan dapat berperan sebagai jembatan antara kepala desa dan masyarakat, sehingga keduanya bertanggung jawab atas pembangunan desa.

"Maka saya tambahi tugas pendamping desa untuk melakukan gerakan sosialisasi dan konsolidasi pembangunan di desa kepada warga dengan target meningkatkan partisipasi masyarakat agar semakin merasa menjadi bagian dari proses pembangunan di desa," imbuhnya.

Gus Halim menegaskan bahwa penambahan dana desa juga akan berlaku bagi desa yang berstatus mandiri, meskipun infrastrukturnya sudah lebih maju. Hal itu karena pembangunan desa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga berhubungan dengan penyelesaian isu-isu yang semakin kompleks dan abstrak. ●

BANYAK NOLAK JADI CAWAPRESNYA, ANIES BASWEDAN MASIH JOMBLO

Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, hingga kini masih belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya berlaga di Pilpres 2024. Di sisi lain, Partai Demokrat sebagai partai pendukung terus mendesak mantan gubernur DKI Jakarta itu segera mendeklarasikan cawapres kepada publik.

Sejauh ini, beberapa nama telah disebut sebagai calon potensial sebagai pendamping Anies. Mereka mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono; Menko Polhukam, Mahfud MD; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; hingga putri Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid, Yenny Wahid.

Namun, nama-nama tersebut dikabarkan menolak untuk menjadi pasangan Anies di Pilpres 2024. Hanya AHY yang terus disodorkan oleh Partai Demokrat sebagai cawapres Anies. Apalagi, AHY dan Partai Demokrat adalah penentu maju tidaknya Anies di Pilpres 2024.

Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi, menyebut Khofifah Indar Parawansa menolak secara halus tawaran untuk menjadi

cawapres Anies Baswedan. Politikus asal Gresik ini mengatakan Khofifah tidak memberi kepastian terkait tawaran cawapres Anies Baswedan.

"Dengan berbagai jalur mencoba mendekati Khofifah. Intinya tidak ada kepastian, tidak ada progres yang positif dari dia (Khofifah)," ujarnya.

Sementara itu, Yenny Wahid menegaskan tidak pernah menyodorkan diri menjadi cawapres Anies Baswedan meski dianggap cocok mendampingi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Saya nggak pernah nyodorin diri jadi cawapres Mas Anies lho, saya cuma merespons lamaran yang datang," kata Yenny Wahid dalam cuitannya, Kamis, 10 Agustus 2023.

Pernyataan Yenny tersebut untuk merespons cuitan penolakan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, di Twitter. Dalam cuitan itu, Yenny juga mengaku mendukung AHY jadi cawapres Anies. "Justru saya mendukung Mas AHY jadi cawapres Mas Anies," ucapnya.

Di sisi lain, Anies Baswedan juga menerima rekomendasi lima nama bakal cawapres dari kiai NU.

"Ya, tadi siang saya menerima rekomendasi nama yang disampaikan oleh para kiai di Surabaya. Kemudian saya terima itu, saya sampaikan terima kasih bahwa sudah ikut memikirkan, sudah ikut melihat nama-nama yang bisa berjuang bersama," ujar Anies di Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

Lima nama yang diusulkan yaitu Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Muhaimin Iskandar, AHY, dan Mahfud MD. Meski demikian, Anies menyatakan bahwa hal terpenting dari rekomendasi para kiai itu bukanlah nama-nama tokoh, namun sumbangan pemikiran dari mereka.

"Kenyataan bahwa para kiai dan ulama secara serius memikirkan ini, membekali kami dengan doa, membekali kami dengan arahan, bahkan membekali kami dengan pilihan," katanya.

Anies juga meminta masyarakat untuk bersabar karena pada waktu yang tepat, bakal cawapres pendampingnya akan diketahui masyarakat. "Nanti pada saatnya diumumkan," kata Anies.

> **Saya nggak pernah nyodorin diri jadi cawapres Mas Anies lho, saya cuma merespons lamaran yang datang.**

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), blak-blakan mengatakan, mereka butuh kepastian terkait sosok bakal cawapres Anies.

AHY mengatakan, publik sudah tidak sabar ingin tahu siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024. Sementara itu, PKS memandang kontestasi Pilpres 2024 sudah semakin dekat dan konsolidasi perlu segera dilakukan.

"Yang mahal dalam kehidupan itu adalah kejelasan dan kepastian. Saya pikir, semua seperti itu. Makanya, sering kali kita mengatakan bahwa ketidakpastian, ketidakjelasan itu yang sering membuat orang tidak optimal," ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023.

AHY mengatakan, dorongan pada Anies untuk menentukan pendamping selalu dibawa dalam komunikasi Demokrat dengan dua mitranya di koalisi. "Waktu sangat berharga, kita ingin segera melakukan berbagai hal yang efektif, tepat sasaran. Tapi, semua itu tentu membutuhkan kejelasan dan kesatuan komando. Di sinilah sebetulnya kami terus bekerja untuk mencari momentum-momentum yang lebih baik lagi agar bisa ditentukan," ujar AHY.

AHY menekankan, Partai

Demokrat tak ingin sekadar mengikuti Pilpres 2024, tetapi juga mempunyai target untuk kembali memimpin pemerintahan. "Kita juga memahami bahwa dinamika, konstelasi politik terus bergerak. Yang jelas, kami ingin sukses dalam pemilu ini, bukan sekadar ikut-ikutan," katanya.

Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, juga meminta Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapres. Ia menganggap bahwa Pilpres 2024 sudah semakin dekat. Sehingga konsolidasi harus segera dilakukan.

"Keputusan yang cepat akan memberikan kepastian kepada koalisi dan publik," ujar Muzammil.

Dalam pandangannya, Anies mesti memberikan kepastian juga pada tiga partai politik KPP, yaitu, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Selain itu, dengan adanya bakal cawapres maka KPP dinilai bisa mengoptimalkan kinerja di akar rumput.

"Perlu adanya kepastian untuk menggerakan berbagai kelompok masyarakat pendukung Anies," kata Muzammil.

Ia pun khawatir, ada pihak di internal KPP yang pindah haluan mendukung bakal capres lain, jika Anies tak segera memberikan keputusan. "Ini dapat membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak sejalan dengan Anies Baswedan untuk bermanuver," ujarnya.

Terakhir, Muzammil menganggap Agustus menjadi waktu yang tepat untuk mendeklarasikan bakal RI-2 dari KPP. "Sejalan dengan momentum Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus dan Hari Konstitusi pada 18 Agustus," katanya.

Segera Diumumkan

Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, menyebutkan kalau tidak lama lagi akan mengumumkan kandidat cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Dia menyampaikan, koalisi mengapresiasi pandangan berbeda dalam soal waktu deklarasi sekaligus pengumuman calon pendamping Anies Baswedan.

"Ketiga partai KPP punya latar belakang dan konteks internal yang berbeda beda, meski dengan tujuan yang sama yaitu mengusung dan memenangkan pasangan capres dan cawapres koalisi perubahan," kata Sudirman, Minggu, 13 Agustus 2023.

> **Benar ada perbedaan, tetapi kesamaannya adalah seluruh partai sikapnya berdasarkan Piagam Koalisi, yakni memberikan mandat kepada kandidat capres untuk menentukan pasangan.**

Mantan menteri ESDM ini meyakini kalau setiap pandangan memiliki latar belakang dan dasar pemikiran. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pandangan sebaiknya deklarasi cawapres Anies Baswedan menunggu koalisi lain lebih dahulu, bahkan sempat menyebut akan dilakukan di ujung menjelang saat pendaftaran resmi ke KPU.

Sementara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengharapkan ada deklarasi bersama secepatnya dan mengumumkan nama pasangan cawapresnya Anies.

"Benar ada perbedaan, tetapi kesamaannya

adalah seluruh partai sikapnya berdasarkan Piagam Koalisi, yakni memberikan mandat kepada kandidat capres untuk menentukan pasangan," kata dia.

Menurut Sudirman, Anies telah mendapat masukan berbagai nama calon pendampingnya selama beberapa bulan terakhir dari hasil berkonsultasi dengan banyak tokoh masyarakat, baik pemimpin partai maupun non partai.

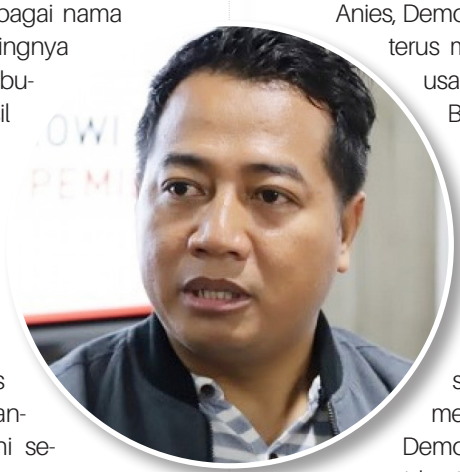

Ia menyebutkan, nama cawapres tersebut telah dikantongi Anies dan kini sedang dalam proses mengomunikasikan keputusan yang telah diambilnya kepada para ketua umum partai KPP dan tokoh masyarakat.

"Nanti setelah komunikasi beres, pada waktunya para pemimpin partai akan menyepakati momentum terbaik untuk deklarasi bersama koalisi dan mengumumkan nama calon pasangan," katanya.

"Kami mohon doa dari berbagai pihak yang menghendaki perbaikan, karena dalam waktu tidak lama lagi KPP akan mendeklarasikan secara resmi pasangan Anies Baswedan untuk Pemilu 2024," sambungnya.

Dikunci Demokrat

Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, menegaskan partainya tidak akan hengkang kecuali Koalisi Perubahan bubar. Andi Arief menjawab anggapan bahwa Demokrat akan hengkang jika Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak dipilih sebagai cawapres Anies Baswedan.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai pernyataan Andi Arief sebagai hal wajar. Dia menyebut pernyataan itu hanya sekadar strategi Partai Demokrat.

"Ini bagian strategi Demokrat supaya dinilai serius di Poros Perubahan. Tentu dengan syarat AHY cawapres harga mati," kata Adi Prayitno.

Adi lantas menyoroti sikap NasDem yang selama ini selalu bermanuver mencari sosok lain yang cocok mendampingi Anies. Namun, kata dia, sosok AHY tidak pernah diusulkan NasDem.

"Meski begitu, Demokrat pakai jurus kesabaran tingkat dewa. Meski AHY tak dianggap penting sebagai pendamping Anies, Demokrat tetap sabar dan terus menunjukkan keseriusannya usung Anies. Buktinya sudah banyak billboard berlogo Demokrat yang memampang foto Anies dan AHY," ucapnya.

Adi juga menyebut NasDem sebetulnya hanya membutuhkan Partai Demokrat sebagai syarat presidential threshold. Dia menilai NasDem tidak butuh sosok AHY.

"Jelas yang dibutuhkan hanya Demokrat sebagai partai untuk menggenapi ambang batas presiden 20 persen, tapi tidak butuh AHY sebagai cawapres. Karena AHY belum mampu meyakinkan Anies dan NasDem bahwa AHY akan menambah suara Anies signifikan di Jatim, Jateng, dan di basis-basis nahdliyin," jelasnya.

Adi juga menyebut Demokrat bersabar berada di Koalisi Perubahan lantaran kunci Anies bisa maju di 2024 adalah partai berlambang mercy itu. Dia menilai sehebat apapun NasDem bermanuver, ujung-ujungnya yang akan diusung jadi cawapres adalah AHY.

"Rumit membayangkan itu. Jikapun AHY jadi cawapres Anies, sepertinya itu pilihan mentok, pilihan terpaksa karena tak ada figur lain. Dan secara politik kunci Anies maju ada di Demokrat," ujar dia.

"Demokrat paham betul bahwa Anies tak bisa maju tanpa Demokrat. Itu kuncinya. Makanya Demokrat cool, sabar tingkat dewa melihat tiap hari muncul nama-nama baru di luar AHY untuk cawapres Anies. Bagi Demokrat, sehebat apapun manuver NasDem dan Anies, ujung-ujungnya mentok ke Demokrat dan mentok pilih AHY jadi wakilnya," tambahnya.

Pengamat politik Refly Harun tampak ragu-ragu Partai Demokrat akan bertahan di Koalisi Perubahan jika Anies Baswedan tidak memilih AHY sebagai cawapres. Pasalnya, Demokrat tetap ngotot memajukan AHY sebagai bakal cawapres 2024. Tapi di sisi lain Anies hingga kini belum mengumumkan AHY sebagai pendampingnya.

"Belakangan nama AHY menguat tetapi kita tidak tahu apakah betul-betul hanya AHY. Artinya dia hanya mau menjadi wakil presiden," kata Refly, Selasa, 15 Agustus 2023.

Jika AHY tidak terpilih, tutur Refly, Demokrat berpotensi memainkan taktik zero sum game. Tetapi taktik ini akan menyulitkan langkah Koalisi Perubahan ke depan.

"Zero sum game itu adalah kalau AHY tidak jadi cawapres maka Demokrat hengkang. Nah itu namanya zero sum game. Kalau zero sum game mestinya dari awal lah ngomong begitu," jelasnya.

Menurutnya, situasi tersebut sangat menarik jika diamati. Terlebih, sepertinya AHY masih tidak disepakati oleh internal Koalisi Perubahan.

"Maksud saya gini, kalau cawapresnya AHY apakah NasDem akan hengkang, kalau cawapresnya bukan AHY apakah Demokratnya yang akan hengkang, ini menarik. Masalahnya adalah sepertinya AHY tidak disepakati. Kalau kita tidak sepakati kan susah," ujarnya.

Meski begitu, pakar hukum tata negara itu menyebut sejumlah figur yang berpeluang menjadi cawapres dari Anies, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Maksudnya adalah kan tidak boleh ada jalan buntu. Kalau AHY tidak disepakati ya mbok ya Khofifah tapi Khofifah misalnya tidak disepakati oleh kubu Demokrat apakah Gatot bisa disepakati," pungkas Refly.●

MOELDOKO DIPUKUL TELAK AHY

Upaya kudeta Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko Kembali berakhir sia-sia. Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu terkait perebutan kepengurusan Partai Demokrat.

Putusan itu makin menguatkan status kepengurusan partai Demokrat yang resmi ialah yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tercatat, MA sudah menolak kasasi yang diajukan Moeldoko terkait Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Ini jadi kegagalan kesekian kalinya yang dialami Moeldoko. Sebelumnya, Moeldoko telah ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding.

Hakim Agung dan Juru Bicara MA, Suharto, menjelaskan pendapat majelis hakim dalam menolak permohonan PK yang dilayangkan Moeldoko terhadap SK Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan Partai Demokrat. Bukti baru atau novum yang diajukan oleh Moeldoko tak cukup untuk menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan yang diajukan permohonan PK-nya.

"Bahwa novum yang diajukan para pemohon peninjauan kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi," kata Suharto pada konferensi pers di Media Center MA RI, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

Putusan yang diajukan PK-nya oleh Moeldoko adalah Putusan Kasasi Nomor 487 K/TUN/2022 tanggal 29 September 2022 yang amarnya adalah menolak kasasi. Adapun kasasi tersebut dimintakan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta Nomor 35/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 26 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Putusan PT TUN itu atas putusan PTUN Jakarta Nomor 150 G/2021/PTUN-JKT tanggal 23 November 2021, gugatan tidak dapat diterima, kewenangan absolut PTUN," ucap Suharto.

Suharto membeberkan, majelis berpendapat bahwa walaupun objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara (TUN), sengketa "a quo" sejatinya merupakan masalah internal Partai Demokrat.

"Pada hakikatnya sengketa 'a quo' merupakan masalah penilaian keabsahan kepengurusan Partai Demokrat antara Penggugat dan Tergugat II intervensi, sehingga merupakan masalah internal Partai Demokrat yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mahkamah Partai Demokrat," jelasnya.

Namun, sampai saat gugatan a quo didaftarkan, mekanisme melalui Mahkamah Partai Demokrat belum ditempuh oleh penggugat yang dalam hal ini adalah kubu Moeldoko. Pendapat majelis tersebut berakhir dengan amar menolak permohonan PK oleh Moeldoko dan menghukum para pemohon PK untuk membayar biaya perkara pada PK sejumlah Rp2.500.000.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut, pertarungan mereka melawan Moeldoko sudah mencapai skor 19-0.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengaku sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memperjuangkan kedaulatan Partai Demokrat. Ia menilai, semua kerja keras itu tidak sia-sia dan telah membuahkan kemenangan.

Ucapan terima kasih turut disampaikan AHY kepada masyarakat di seluruh

> **Putusan PT TUN itu atas putusan PTUN Jakarta Nomor 150 G/2021/PTUN-JKT tanggal 23 November 2021, gugatan tidak dapat diterima, kewenangan absolut PTUN**

Indonesia. Ia merasa, tanpa doa dan dukungan dari segenap masyarakat Indonesia itu Partai Demokrat bisa berjuang tanpa merasa sendirian.

AHY menegaskan, dukungan masyarakat itulah yang membuat Partai Demokrat kuat, menjadi tegar sekaligus semakin berani untuk mencari keadilan dan kebenaran. Ia menilai, ini merupakan kemenangan semua pecinta demokrasi.

"Karena kita yakin tidak ada demokrasi tanpa suara rakyat dan tidak ada Demokrat tanpa rakyat," ujar AHY.

AHY turut mengenang perjuangan dirinya bersama pimpinan, pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat. Bahkan, ia mengingatkan, tidak sedikit jenderal-jenderal dan relawan-relawan datang dalam mimbar demokrasi.

Di DPP Partai Demokrat, ia mengingatkan, hampir tiap hari ada mimbar politik maupun mimbar demokrasi yang didatangi berbagai kalangan. Maka itu, AHY berharap, kader-kader Partai Demokrat tidak melupakan perjuangan itu.

Semua itu, lanjut AHY, menjadi bagian dalam sejarah, bukan hanya bagi Demokrat, tapi sejarah demokrasi di

Indonesia. Bahkan, ada pula cap darah yang dilakukan banyak kalangan untuk menjadi bagian perjuangan.

"Semua kami apresiasi dan tidak bisa membalasnya dengan apapun, selain doa terbaik bagi bapak dan ibu sekalian yang telah berkenan datang dan memberikan dukungan langsung kepada kami," kata AHY.

AHY juga mengaku sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan aksi kubu Moeldoko yang berupaya mengambil alih kepengurusan Partai Demokrat. AHY menyampaikan pertemuan itu, yang tertutup dan saat itu tidak diumumkan ke publik, berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 2021.

"Yang kami lakukan di awal dulu ketika saya menjelaskan kepada beliau (Presiden Jokowi), dan beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa-apa ketika itu. Tetapi, saya menyampaikan bahwa ini telah terjadi dan KSP Moeldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung," kata AHY.

AHY melanjutkan, dia saat itu berharap ada langkah-langkah yang lebih menentukan diambil oleh Presiden manakala jajarannya terbukti melakukan perbuatan tidak etis. "Tetapi, kami tidak masuk ke sana. Itu biarkan, kami juga tidak ingin mengutak-atik hak prerogatif Presiden. Tetapi, rakyat yang berbicara," kata AHY.

AHY juga menyampaikan dua pesan ayahnya, SBY, usai MA menolak PK yang diajukan Moeldoko. Pertama, keputusan MA yang menolak PK dari kubu Moeldoko merupakan kemenangan bagi Partai Demokrat. Namun, keputusan tersebut juga merupakan kemenangan bagi pencari keadilan.

"Kemenangan bagi pencari kebenaran, pencari keadilan, dan pecinta demokrasi. Keputusan ini juga memberikan harapan yang baik bagi penegakan hukum yang adil di Indonesia," ujar AHY.

Pesan kedua disampaikannya kepada seluruh kader Partai Demokrat. SBY menjelaskan, Demokrat lahir lewat sebuah manifesto yang dibuat pada 2001, yang berisikan makna lambang, bendera, hingga mars.

SBY juga mengungkapkan, jatuh dan bangun sudah dirasakannya saat menggagas hingga melahirkan Partai Demokrat. Lewat kerja keras tersebut, partai berlambang bintang mercy tersebut sukses menjadi pemimpin pemerintahan periode 2004-2010.

"Sehingga tentu tiba-tiba ada orang yang ingin merampas Demokrat ini dengan cara-cara ilegal, cara-cara yang di luar nalar dan etika, tentu bukan hanya kader, tetapi beliau juga yang tak bisa menerima," ujar AHY.

"Untuk itu, atas putusan MA, penolakan terhadap PK KSP Moeldoko tadi, beliau merasa bersyukur, lega. Sekaligus juga semakin yakin bahwa Insya Allah perjuangan Demokrat untuk terus menjadi bagian penegak demokrasi," sambungnya.

Kado Istimewa

Putusan MA yang menolak PK yang dilayangkan Moeldoko pada 10 Agustus 2023 bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-45 AHY. Hal ini menjadi kado manis bagi AHY dan Partai Demokrat.

"Kami semua sangat senang, kami bersyukur sekaligus terharu mendengar itu. Secara pribadi, saya juga sangat bersyukur, karena berita baik ini diterima bertepatan pada hari ulang tahun saya, sehingga menjadi kado terindah di usia ke-45 tahun ini," ungkap AHY.

Berita tersebut tak hanya penting bagi Partai Demokrat, tapi juga merupakan bentuk komitmen negara terhadap demokrasi. Apalagi, upaya tersebut dilakukan oleh orang yang notabenenya berasal dari lingkaran kekuasaan.

Selama dua tahun delapan bulan,

> **Untuk itu, atas putusan MA, penolakan terhadap PK KSP Moeldoko tadi, beliau merasa bersyukur, lega. Sekaligus juga semakin yakin bahwa Insya Allah perjuangan Demokrat untuk terus menjadi bagian penegak demokrasi.**

Partai Demokrat dibayang-bayangi oleh upaya pembegalan yang dilakukan oleh kubu Moeldoko. Pada awalnya hal tersebut menimbulkan kekhawatiran, mengingat adanya gerakan-gerakan yang menyusup di internal partainya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, juga mengatakan bahwa putusan MA yang menolak PK yang diajukan Moeldoko merupakan kado istimewa dalam hari lahir AHY.

"Tadi pagi sudah dapat kado istimewa keputusan MA tentang penolakan permohonan PK," ujar Taslim.

Taslim berharap partai berlambang mercy itu lebih fokus pada membangun koalisi yang kuat. Sebab salah satu beban psikologis yang ditanggung AHY telah selesai. "Sekali lagi selamat dan salam hormat buat beliau," katanya.

Akhir Obsesi Moeldoko

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai obsesi Moeldoko merebut Partai Demokrat telah berakhir seusai MA menolak PK yang diajukan mantan panglima TNI itu. Sebab, sudah tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh karena PK sebagai upaya hukum terakhir hanya bisa diajukan satu kali.

"MA sudah menyatakan putusan menolak Peninjauan Kembali Kubu Moeldoko atas kepengurusan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). PK tidak dimungkinkan diajukan dua kali. Artinya kegagalan (gugatan hukum) ini menunjukkan berakhirnya obsesi tinggi dari Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat," kata Efriza, Kamis, 10 Agustus 2023.

Menurut dosen ilmu pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten, ditolaknya PK tersebut seharusnya membuat Moeldoko jera untuk merebut Partai Demokrat. Moeldoko sudah sepatutnya mengakui kepimpinan AHY yang sah.

"Jika Moeldoko mencoba untuk mengganggu Partai Demokrat lagi, sudah selayaknya Jokowi me-reshuffle Moeldoko sebagai kepala staf kepresidenan," ujarnya.

Di sisi lain, kata Efriza, putusan PK tersebut akan memberikan kepercayaan diri yang tinggi kepada AHY dan jajaran pengurus Partai Demokrat. AHY akan dianggap memiliki kepemimpinan tegas karena berhasil menjaga soliditas internal partai di tengah gempuran upaya hukum Moeldoko merebut partai yang didirikan SBY itu.

AHY dan Partai Demokrat, kata dia, kemungkinan juga akan mendapat respons positif dari masyarakat karena berhasil mengalahkan upaya hukum yang diajukan Moeldoko sebanyak belasan kali. "Respons positif ini diyakini turut menguatkan elektabilitas Partai Demokrat, karena simpatik publik," kata Efriza.

Lebih lanjut, Efriza menyebut putusan ini akan membuat Partai Demokrat leluasa memanaskan mesin partai untuk menghadapi Pemilu 2024, terutama pemilihan presiden. AHY dan jajarannya bisa fokus menghadapi pesta demokrasi tanpa lagi disibukkan oleh upaya Moeldoko merebut Demokrat.

Putusan itu juga diyakini bakal memperbesar potensi AHY menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Apalagi, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang merupakan gabungan Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat yang dibentuk guna mengusung Anies sebagai capres hingga saat ini tersebut belum memutuskan sosok cawapres.

Efriza menilai, putusan MA itu membuat AHY semakin yakin bahwa dirinya layak menjadi cawapres pendamping Anies. Sebab, keberhasilan AHY menghadapi upaya Moeldoko merebut Partai Demokrat bakal jadi pertimbangan Anies dalam menentukan sosok cawapres.

Selain itu, lanjut dia, Anies dan partai lain dalam KPP juga akan semakin yakin menetapkan AHY sebagai cawapres karena putra sulung SBY itu tidak lagi berpotensi kehilangan partainya. "Ganjalan selama ini AHY kurang dipercaya (untuk menjadi cawapres Anies) adalah masih bergulirnya kasus PK Moeldoko di MA," kata Efriza. ●

SETELAH GOLKAR DAN PAN MENDUKUNG PRABOWO

Peta koalisi partai-partai politik untuk mengusung calon presiden makin jelas. Toh penentuan kandidat calon wapres adalah proses lanjutan yang harus dilalui. Nama Gibran tetap muncul.

Semakin jelas karena Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan dukungannya terhadap kandidat calon presiden Prabowo Subianto yang berasal dari Partai Gerindra. Menyusul Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra.

Deklarasi dukungan PAN dan Golkar itu berlangsung pada Minggu, 13 Agustus 2023 di Gedung Proklamasi, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengemukakan, dukungan kepada Prabowo merupakan hasil pembahasan secara matang.

"Kenapa PAN mengambil keputusan itu saudara-saudara, kami sudah 10 tahun, bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit kenapa tidak sabar. Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, karena hari ini kita sudah bersama-sama," kata Zulhas, nama ringkas Ketua Umum PAN.

Menurut dia, alasan PAN mendukung Prabowo tentu melihat perjuangan Presiden Joko Widodo dan Prabowo harus dilanjutkan, yakni menjadi negara maju. Peluang Indonesia, sambungnya, tidak besar, namun dengan bonus demografi sasaran ini bisa dicapai. Dengan pemimpin yang tepat, dia yakin visi Indonesia 2024 menjadi negara maju bisa dicapai.

"Semoga kita bersama Gerindra, PAN, Golkar, PKB dan teman-teman

partai lainnya bisa menuntaskan perjuangan kita Februari 14, 2024, Insya Allah Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia," tegasnya.

Sedangkan Airlangga mengemukakan dukungan Golkar kepada Prabowo karena sosoknya lahir dari rahim partai Golkar. "Oleh karena itu, beliau mengikuti kegiatan di partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan dan setujuan dengan partai golkar," kata Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa A Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun PKB hadir di kancah politik, tetapi baru kali ini berkoalisi dengan PAN. "Sudah berpuluh-puluh tahun bersaudara tapi baru ini berkoalisi," katanya.

Ia berharap koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. "Tidak banyak yang saya bisa katakan, bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah selamat dunia akhirat," kata Cak Imin.

Nah, dalam sambutannya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan terharu mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, PKB, dan PAN untuk maju sebagai calon presiden 2024. Prabowo juga merasa terhormat mendapat dukungan ini. "Saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini," kata Prabowo.

Ia pun memuji tiga partai yang mendukungnya di 2024. Prabowo bertekad tidak mengecewakan harapan rakyat dan partai yang mendukungnya. "Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini dan terutama harapan rakyat Indonesia semuanya," kata Prabowo.

Apapun, perkembangan politik itu akan membuat manuver untuk membentuk koalisi baru akan semakin terbatas. Dengan demikian kandidat calon presiden yang akan maju dalam Pilpres 2024 tak akan lebih dari tiga, malah dapat menjadi dua jika terjadi kesepakatan-kesepakatan sebelum pendaftaran pasangan Capres-Cawapres ke KPU pada Oktober-November mendatang.

Tiga kandidat Capres itu adalah Prabowo yang diusung Gerindra PKB dan tambahan dukungan Golkar serta PAN, Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan, serta Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Bagaimana tanggapan kandidat Capres Ganjar Pranowo mengenai perkembangan koalisi? "Dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja dan saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau juga sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana," kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Minggu, 13 Agustus 2023.

Ia menyatakan akan menghormati keputusan semua partai dalam mengambil langkah politiknya pada Pemilu 2024. Terlebih, saat ini partai politik sedang bernegosiasi untuk memperkuat dukungannya di pesta demokrasi nanti.

Jika ada partai merapat ke salah satu titik, sambungnya, itu merupakan hak politik mereka. "Dan buat kita, buat

kami, yang sudah mendeklarasikan tentu ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik, baik yang sudah mendukung maupun yang belum dan suasananya masih sangat cair sekali," sambungnya.

Lebih lanjut, Ganjar teringat dengan kondisi koalisi pada Pilpres 2014 lalu. Saat itu Koalisi Merah Putih pengusung Prabowo-Hatta Rajasa juga didukung Partai Golkar dan PAN, bersama Gerindra, PKS, PPP, serta PBB. Di sisi lain, lawan politiknya yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung PDIP bersama Partai NasDem, PKB, PKP, dan Hanura

menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. "Jadi buat saya, saya ucapkan selamat sudah bergabung (ke koalisi Prabowo), ini proses demokrasi yang biasa saja, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga demokrasi berjalan dengan baik, apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini," ujarnya.

Hal senada dikemukakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. "Kami dari PDI Perjuangan sangat menghormati pilihan dan kedaulatan masing masing partai. Tentu saja hal ini

put terbukti pasangan Jokowi-Jusuf Kalla justru mampu memenangkan Pilpres 2014, dengan perolehan suara 53,15 persen, sedangkan Prabowo Hatta 46,88 persen.

"Karena itu, dalam keyakinan politik kami, kerja cerdas, dan kepedulian tinggi ke akar rumput, kami yakin bisa merebut dukungan rakyat pada Pilpres 2024 lebih besar. Itulah yang akan terus kami pedomani sebagai jalan politik untuk memenangkan Ganjar Pranowo," ucap Said. Said pun menegaskan, PDIP memiliki sejarah panjang sebagai partai yang dididik dan

di Koalisi Indonesia Hebat tetap berhasil memenangi ajang pemilihan lima tahunan itu, yang kemudian terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden periode 2014-2019.

"Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah," ucap Ganjar.

Menurut Ganjar hal paling penting adalah menjaga demokrasi berjalan baik sehingga anak-anak bangsa bisa

mencerminkan tumbuhnya demokrasi dengan baik," kata Said.

Ia mengemukakan, dengan adanya kerja sama politik yang saat ini sudah yang sudah terjalin antara PDI Perjuangan dengan PPP, Partai Hanura dan Perindo, tentu akan makin menguatkan basis dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Said lantas mengungkit Pilpres 2014 terkait pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla yang hanya diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, Hanura dan PKPI.

Meski saat itu dukungan partai di Pilpres kalah jauh, tetapi dengan soliditas dan kerja politik yang kuat di akar rum-

dibesarkan dengan terbiasa dikeroyok secara politik.

Menurut dia, pada masa orde baru mengalami hal itu, dan di masa Jokowi-JK, begitu pula saat ini. Oleh sebab itu, Said mengingatkan PDIP pernah mengalami pahitnya sejarah. Menurut dia, belajar dari pengalaman panjang itu harus memperkuat mental juang.

"Kita harus bisa setegak tegaknya melalui jalan terjal politik, dan dengan begitulah mental juang kita terbentuk. Kita tidak boleh terlena manisnya kekuasaan, dan melupakan jati diri sebagai partai sandal jepit, sebagai partai yang disokong oleh barisan pemberani yang terbiasa nggetih. Dengan

berkaca pada jati diri itulah kita bisa berjalan dan melangkah bersama dengan semangat juang memenangkan Pemilu 2024," ungkap Said.

Bagaimana dengan Anies? "Kami sampaikan selamat kepada partai Golkar, PAN, yang sudah memutuskan untuk bergabung di koalisi. Tapi kami tetap bismillah jalan terus," kata Anies di Museum Wayang Kekayon, Banguntapan, Bantul, Minggu, 13 Agustus 2023.

Dia mengaku tidak khawatir dengan Prabowo yang semakin banyak mendapat dukungan. Lantas Anies mengungkit perjuangannya memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

Kala itu Anies-Sandiaga Uno cuma diusung oleh dua partai politik saja. "Kami pernah punya pengalaman di Jakarta, hanya berdua. Hanya berdua. Tapi apa yang terjadi? Rakyat memberikan pilihannya dengan mempertimbangkan banyak faktor," kata Anies.

Pada putaran pertama Pilgub 2017 lalu, Anies dan Sandiaga Uno maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keduanya diusung oleh Gerindra dan PKS. Pasangan Anies-Sandi dinyatakan menang setelah mengungguli Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada putaran kedua.

Toh ketiga kandidat Capres itu belum memastikan siapa pasangannya sebagai kandidat Cawapres pada Pilpres 2024. Dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan melihat perkembangan peta koalisi ini membuat peluang Sandiaga Uno menjadi kandidat Cawapres Ganjar semakin terbuka.

PPP mendukung Ganjar karena pernah memberikan dukungan serupa pada Ganjar saat pemilihan Gubernur Jateng pada periode 2018-2023. Pada Pilgub itu Ganjar berpasangan dengan kader PPP yaitu Taj Yasin Maimoen.

"Ini juga semakin menjadikan kami (PPP), bersemangat. Karena komposisi ini memperbesar peluang Ketua Bappilu PPP, Pak Sandi, sebagai cawapres

> **Karena itu, dalam keyakinan politik kami, kerja cerdas, dan kepedulian tinggi ke akar rumput, kami yakin bisa merebut dukungan rakyat pada Pilpres 2024 lebih besar.**

mas Ganjar. Juga ini akan melecut semangat koalisi partai-partai pengusung GP untuk all out dengan semangat now or never!" ungkapnya.

Di mata analis politik Ujang Komaruddin dari Universitas Al Azhar Indonesia, PDIP akan tetap mengusung Ganjar Pranowo pada 2024. "Menang atau kalah kelihatannya akan memasukkan Ganjar sebagai capresnya. Karena mencari pihak lain di luar kader PDIP tidak akan mendapatkan efek elektoral," kata Ujang.

Setidaknya, sambung Ujang, jika Ganjar kalah dalam Pilpres 2024, PDIP tetap bisa memenangi kursi legislatif jika mengusung capres sendiri. Ini karena ada efek elektoral dari pencalonan presiden, yang mengikuti kader-kader banteng lainnya dalam pemilu legislatif.

Sedangkan ahli komunikasi politik Tamil Selvan melihat terbuka kemungkinan lain karena masih ada proses politik di Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia minimal Capres-Cawapres 35 tahun. Jika MK memutuskan batas minimal usia Capres-Cawapres 35 tahun, Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi pasangan Prabowo Subianto. Kemungkinan lain, batasan usia itu dapat diubah melalui revisi Undang-Undang Pemilu melalui kesepakatan pemerintah dan DPR.

"Kalaupun instrumen Pak Prabowo bersanding dengan Gibran, satu-satunya cara mengimbangi, Ganjar harus berpasangan dengan Anies," kata Tamil Selvan, Senin, 14 Agustus 2023.

Toh Tamil mengakui, secara kasat mata, menyandingkan Ganjar dengan Anies ibarat menyatukan minyak dengan air. "Tapi tidak ada yang mustahil dalam politik, semua bisa dicari titik temunya, semua bisa dicari lewat lobi-lobi," tandasnya.

Maka, penentuan siapa kandidat Cawapres dari Prabowo, Ganjar, dan Anies, masih merupakan proses yang harus dilalui. Dengan berbagai aktor dan faktor dalam dinamikanya.•

PELUANG TERBUKA INDONESIA MASUK OECD

Indonesia berniat masuk ke OECD. Bagaimana dengan BRICS?

Rombongan itu datang sepekan sebelum Republik memperingati hari ulang tahun ke-78 proklamasi. Presiden Joko Widodo menerima rombongan itu: Delegasi Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi kerja sama pembangunan dan ekonomi yang dipimpin Sekjennya, Mathias Cormann.

Sebelum ke Istana, Cormann dan rombongan lebih dulu membahas proses Indonesia menjadi anggota organisasi yang umumnya berisi negara-negara maju itu bersama tim dari Kementerian Keuangan. Pihak Indonesia tentu saja diketuai oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang didampingi sejumlah pejabat teras Kemenkeu.

Tampak antara lain dalam pertemuan bilateral OECD-Kemenkeu itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Staf Ahli Menkeu Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak, Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

Sejatinya pertemuan itu sudah melalui perjalanan panjang. Sejak 2027 paling tidak, saat Indonesia memulai kerja sama antara lain publikasi studi yang diterbitkan Indonesia-OECD, Technical Assistant: Penempatan Tenaga Ahli Pajak OECD di Indonesia, OECD Secondment Programme khususnya tekait kegiatan capacity building untuk pegawai pemerintah. Selain itu beberapa manfaat yang Indonesia dapatkan melalui kerja sama Indonesia-OECD adalah adanya kegiatan lokakarya/seminar, pertukaran data dan informasi, kegiatan survei, penempatan orang Indonesia yang bekerja di Kantor Pusat OECD Development Centre. Hingga kemudian OECD membuka kantor perwakilan di Jakarta.

Perkembangan semakin intensif di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Gandhinagar India, pada pertengahan Juli 2023. Bu Menkeu saat di India mengemukakan lagi komitmen Pemer-

intah Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD.

Maka pada pertemuan bilateral pada 10 Agustus 2023 ini, Sekretariat Jenderal OECD mendiskusikan dan menjelaskan proses administrasi yang dibutuhkan untuk menjadi anggota penuh OECD. Jadi, Sri Mulyani meminta dukungan OECD dalam proses akses Indonesia termasuk untuk berkoordinasi secara teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Koordinasi di dalam negeri sudah berlangsung. Akhir Juli 2023, misalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan Indonesia akan masuk menjadi anggota baru Organisasi Negara untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Jika lolos, Indonesia bakal menjadi negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pertama yang menjadi anggota OECD.

"Kita terima surat dari OECD yang menyambut Indonesia menjadi negara anggota Asia Tenggara pertama yang masuk dan itu sudah diinformasikan ke seluruh anggota OECD," kata Airlangga di Komplek Istana Negara, Rabu, 27 Juli 2023. Sebagai tindak lanjut surat itu, kata Pak Menko, pemerintah akan membuat peta jalan untuk menjadi anggota OECD.

Nah, beres di tingkat teknis, barulah Corman dan rombongan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana. Dalam pertemuan itu, Jokowi berharap proses keanggotaan dapat berjalan dengan baik dan cepat.

Di Istana, Bu Menkeu menyampaikan bahwa OECD mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam melakukan langkah reformasi pada sejumlah bidang guna memperkuat perekonomian nasional di tengah situasi ketidakpastian global. "Sekretaris Jenderal (OECD) Cormann juga mengapresiasi leadership Bapak Presiden di dalam melakukan langkah-langkah reformasi karena banyak langkah-langkah reformasi di bidang investasi dan juga di bidang perekonomian adalah sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri di dalam memperkuat perekonomiannya," ujar Menkeu.

Menkeu Ani mengungkapkan pula, selain kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama, Indonesia merupakan mitra kerja utama dari OECD. Bahkan, Indonesia bersama OECD telah melakukan sejumlah program kerja sama seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di Tanah Air.

"Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment," lanjutnya.

Mengenai keinginan Presiden agar proses keanggotaan Indonesia di OECD berlangsung cepat, Indonesia sudah banyak melakukan sejumlah reformasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang ternyata sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD, sehingga bukan memulai tanpa persiapan.

"Pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol sama sekali. Namun, sudah banyak bidang-bidang reformasi

yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD," kata Menkeu.

Pada kesempatan sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan guna membahas rencana keanggotaan Indonesia di OECD. Menlu juga mengungkapkan bahwa dukungan dari negara anggota OECD terhadap keanggotaan Indonesia di OECD cukup kuat. "Dalam beberapa hari ini saya sudah menerima surat dari beberapa menteri luar negeri yang menyampaikan dukungan kuat terhadap keanggotaan Indonesia di

OECD," kata Menlu Retno.

OECD merupakan organisasi internasional yang bekerja untuk membangun kebijakan demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Organisasi yang didirikan pada 1961 lalu itu dibentuk dengan tujuan untuk memajukan ekonomi dan perdagangan dunia.

Mayoritas anggota OECD adalah negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi dengan peringkat sangat tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia, dan karena itu sering dianggap sebagai negara industri maju.

Nah, dalam kaitan ini, Indonesia juga mendapat undangan dari negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) untuk bergabung di dalamnya. Terbukti, Menlu Retno berkesempatan menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para Menlu negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, RRT, Afrika Selatan) dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan, Jumat, 2 Juni 2023.

Dalam pernyataannya, Bu Menlu mengajak negara-negara BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme. Menlu Retno menyampaikan bahwa saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan.

Tatanan dunia yang berdasarkan peraturan kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingan masing-masing. Kerja sama internasional gagal mengatasi tantangan-tantangan global, dan kepercayaan terhadap efektivitas multilateralisme makin surut.

"Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini. Dan BRICS berpotensi menjadi kekuatan yang positif untuk itu," kata Bu Retno.

Maka Bu Menlu menyampaikan dua hal yang perlu didorong oleh BRICS. Pertama, memperjuangkan hak pembangunan setiap negara. "Kita semua ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan menjadi negara maju. Tapi kita tidak dapat melakukannya jika hak atas pembangunan terus dilanggar," ujarnya.

Sejarah mencatat negara berkembang banyak mengalami ketidakadilan ekonomi. Negara-negara Global South berhak untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan dan perangkap utang.

Isu ini, kata dia, juga telah diangkat oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT G7 Outreach di Hiroshima beberapa waktu lalu. "Jadi, saya harap BRICS dapat ikut mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi," kata Retno.

Kedua, memperkuat multilateralisme. Agar dapat berfungsi dengan baik, multilateralisme harus inklusif dan sesuai dengan tujuan. Untuk itu, tata kelola global perlu diperkuat dan direformasi. "Reformasi tersebut harus mempertimbangkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang. BRICS dapat menjadi katalis untuk reformasi ini," kata Retno.

Toh Bu Menlu mengapresiasi inisiatif BRICS membentuk Bank Pembangunan Baru. Dalam padangannya, inisiatif itu menghadirkan perspektif segar dalam sistem keuangan global yang sudah kedaluarsa.

Alhasil, Retno menegaskan multilateralisme hanya dapat berkembang jika semua pihak menghormati hukum internasional secara konsisten tanpa standar ganda sebagai fondasi tatanan global. "Mari bekerja bersama untuk membangun masa depan dunia yang lebih cerah," pungkasnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota

BRICS dan 14 negara undangan, yakni Arab Saudi, Argentina, Bangladesh, Burundi, Komoro, Gabon, Guinea-Bissau, Iran, Kazakhstan, Kuba, Mesir, Rep. Demokratik Kongo, Uni Emirat Arab, dan Uruguay. Sepanjang 2023, Indonesia telah diundang pada sejumlah pertemuan BRICS di bawah keketuaan Afrika Selatan.

Jadi, apakah Indonesia harus memilih masuk OECD atau BRICS? Mungkin pertanyaan ini keliru.

Sebagai contoh, Brasil yang menjadi salah satu negara utama dalam BRICS ternyata juga sedang memproses keanggotaannya di OECD sejak 2022.

> **Penguatan hubungan dengan OECD, setelah memuncak dengan masuknya Brasil ke dalam organisasi, akan membantu kami mengatasi kemacetan dan kekurangan kami, Biaya Brasil yang terkenal.**

Pada Oktober 2022 Brasil mengirimkan nota aksesi awal, untuk bergabung dengan organisasi ekonomi paling terindustrialiasasi di dunia.

Memorandum awal berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi keselarasan negara dengan komitmen OECD. Dokumen tersebut merupakan tahapan dalam peta jalan untuk aksesi Brasil ke grup tersebut, yang disetujui oleh OECD pada Juni 2022.

Terlampir dalam surat tertanggal 30 September 2022, memorandum setebal 1.170 halaman itu dirilis secara rinci dalam sebuah upacara di Istana Planalto di Brasilia. Isinya adalah assessment atau penilaian tingkat keselarasan undang-undang, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan standars yang ditetapkan oleh OECD di 32 sektor berbeda.

Di antara bidang yang dianalisis adalah perdagangan, investasi, ekonomi digital. Selain itu, bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, persaingan, pariwisata, dan energi nuklir.

Tingkat kepatuhan terhadap masing-masing dari 230 standar OECD dianalisis, 208 antaranya sangat diperlukan untuk bergabung dengan organisasi itu. Menurut pemerintah Brasil, negara tersebut telah mematuhi 108 standard dan sedang dalam proses untuk mematuhi 45 standar lainnya.

"Memorandum awal akan berfungsi sebagai dasar untuk diskusi teknis masa depan kelompok kerja dengan organisasi. Brasil berusaha untuk bersekutu dengan apa yang paling modern di dunia dan dengan negara maju", kata Kepala Staf Kepresidenan Ciro Nogueira.

"Penguatan hubungan dengan OECD, setelah memuncak dengan masuknya Brasil ke dalam organisasi, akan membantu kami mengatasi kemacetan dan kekurangan kami, Biaya Brasil yang terkenal," jelas Menteri Luar Negeri Carlos França.

Menteri Ekonomi Paulo Guedes berpendapat bahwa bergabung dengan OECD akan membantu Brasil mengkonsolidasikan dirinya sebagai salah satu ekonomi utama di planet ini. Menurutnya, proses tersebut membuka pintu bagi organisasi internasional penting, seperti kursi tetap di Dewan Keamanan PBB.

"Brasil, setelah proses akses berakhir, akan menjadi satu-satunya negara sekaligus di OECD, di G20, dan BRICS. Ini membuka pintu bagi negara untuk mungkin bergabung dengan Dewan Keamanan PBB [secara permanen]," ungkap Guedes.

Pada Januari 2022, Brasil menerima surat undangan untuk memulai proses aksesi OECD. Selain Brasil, organisasi tersebut mengundang lima negara: Argentina, Peru, Rumania, Bulgaria, dan Kroasia.

Negara tersebut mengajukan rencana aksesi, yang disetujui oleh OECD pada Juni 2022. Jadwal perkiraan pengiriman memorandum sebelum akhir 2022. Sedangkan kegiatan menganalisis keselarasan Brasil dengan standar OECD melibatkan 972 teknisi pemerintah federal dari 26 kementerian.

Tanpa tenggat waktu tertentu, proses bergabung dengan OECD akan selesai ketika, setelah tinjauan teknis, Dewan memutuskan untuk menyampaikan undangan resmi ke Brasil untuk bergabung dengan organisasi tersebut.

Melihat pengalaman Brasil, Indonesia yang sudah bergabung dengan G20 tentu saja dapat berhimpun dengan OECD dan BRICS sekaligus.

Persoalan Brasil muncul setelah Presiden Jair Bolsonaro digantikan oleh Presiden Lula da Silva yang memerintah sejak awal 2023. Soal iuran keanggotaan misalnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Biar pemangku kebijakan yang mengurusnya. Jangan lupa pertimbangan geopolitik yang menjadi implikasinya.•

SIAPKAN 7 PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menanggulangi kemiskinan tidak main-main. Penjabat Bupati Muba, Apriyadi Mahmud, tahun ini meluncurkan tujuh program inovasi pengentasan kemiskinan guna menyejahterakan Masyarakat Bumi Serasan Sekate.

Menurut Apriyadi, pengentasan kemiskinan sebagai bentuk perhatian dan peran pemerintah hadir di tengah masyarakat. "Pemerintah hadir memberikan pelayanan prima dan bantuan sosial semata mata demi kesejahteraan Masyarakat Musi Banyuasin," jelas dia.

Agar program ini tepat sasaran, Apriyadi memastikan semua program bantuan menggunakan basis data NIK, by name by address dan tagging.

"Sehingga data penerima jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Saya berharap kemiskinan 2022 yang masih di angka 15,9 persen berdasarkan data BPS dapat turun signifikan. Ini caranya melalui tujuh program pengentasan kemiskinan. Program ini kami siapkan melalui Dinas Sosial di APBD 2023," tegas Apriyadi.

Kepala Dinas Sosial Muba, Ardiansyah, mengatakan pihaknya sesuai arahan bupati fokus pada penanggulangan kemiskinan. Terkait tujuh program yang diluncurkan Apriyadi, Pemkab Muba telah melakukan penguatan program.

Pertama Program Bantu Umak. Bantuan ini berupa bantuan tunai bagi masyarakat miskin. Besarannya Rp325.000 per bulan kepada 16.401 jiwa atau 9.491 KK masyarakat miskin ekstrim berdasarkan data P3KE.

"Bantu Umak dilaksanakan selama enam enam bulan, terhitung Juli sampai Desember 2023. Payung hukum program ini adalah Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan masyarakat miskin ekstrim," ungkap Ardiansyah.

Kedua, Program Pedas Nia (Peduli disabilitas dan lansia). Program ini sebagai bentuk perhatian lebih kepada para disabilitas dan lansia berupa pemberian bantuan 104 alat bantu, 340 paket sembako dan pendampingan agar bisa berdaya di 2023.

Ketiga, Program Bertani (bedah rumah tidak layak huni), yakni bantuan bedah rumah kepada masyarakat pra sejahtera yang sudah tercatat di dalam DTKS dan memiliki rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Dana yang disiapkan Rp30.000.000 per rumah untuk 87 ru-

mah pada 2023.

Keempat, Program Bedecit (bergerak dengan cepat, ikhlas dan tuntas), yakni pelayanan call center dalam penanganan permasalahan sosial di masyarakat sebagai bentuk reaksi cepat penanganan bencana alam maupun sosial berupa pemberian bantuan kebutuhan mendesak dan evakuasi pasca bencana. Hingga Agustus 2023, terdapat 112 bencana sosial dan 45 bencana alam yang telah diberikan bantuan.

Kelima, Program Siaga SOS (Sistem integrasi aplikasi data sosial), yakni berupa aplikasi pengelolaan, penyiapan dan pemetaan (tagging) data untuk 26 PMKS yang dapat diakses secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

Keenam, Muba Sosial Care yang bergerak dalam penyediaan rumah singgah dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Saat ini rumah singgah tidak hanya digunakan sebagai rehabilitas, tapi juga sebagai tempat menginap keluarga pasien RSUD yang sedang berobat. Rumah singgah ini memiliki ruang keluarga dan enam kamar tidur yang dijaga oleh empat petugas secara bergiliran 24 jam.

Ketujuh, Program Jurasik (Jujur masyarakat miskin). Program ini berupa sosialisasi keliling kepada lapisan masyarakat dan Keluarga Penerima Manfaat bersama para PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial) dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai bantuan sosial tepat sasaran di 240 desa/kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

"Mohon doa dan dukungannya agar pelaksanaan program inovasi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat," tuturnya.

Terima Buku Tabungan Langsung

Mengawali Program Bantu Umak yang diluncurkan Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, bulan lalu, kini sejumlah warga telah memegang buku tabungan rekening. Tercatat sejumlah warga miskin di Kecamatan Sekayu dan Lais sudah memegang rekening tabungan ini. Penyerahan buku dilakukan oleh Pemkab Muba, Dinas Sosial, petugas bank, lurah, kepala desa disaksikan kejaksaan.

Menurut Apriyadi, melalui rekening tersebut warga akan menerima masing masing Rp325.000 per jiwa. Total bantuan program ini mencapai Rp31.991.700.000 bersumber dari APBD 2023. Sebanyak 9.491 kepala keluarga atau 16.406 jiwa warga miskin di Muba akan menikmatinya.

Kadinsos Muba Ardiansyah, menjelaskan Pemkab Muba mulai 7 Agustus 2023 telah mendistribusikan Buku Tabungan Program Bantu Umak.

"Dimulai Kecamatan Sekayu dengan jumlah 1.635 buku tabungan. Penyerahan dilakukan di kantor Kelurahan Serasan Jaya. Ikut menyaksikan penyerahan antara lain Camat Sekayu, Lurah Serasan Jaya, kejaksaan, dan petugas bank," beber Ardiansyah.

Penyerahan buku rekening tabungan Bantu Umak akan terus di dilakukan hingga rampung. "Alhamdulillah proses distribusi berjalan lancar. Hari ini di Kecamatan Lais diteruskan ke kecamatan lain sampai dengan 18 Agustus 2023," jelasnya.

Kepala Dinas Kominfo Muba Herryandi Sinulingga menyampaikan program Bantu Umak telah diluncurkan setelah koordinasi lintas sektoral dengan Dinas Sosial dan Bappeda Muba.

Sinulingga menambahkan, Bupati Apriyadi mengupayakan sejumlah program pengentasan kemiskinan ekstrem di Muba, seperti bedah rumah di sejumlah kecamatan yang dilakukan pekan pertama Juli 2023.

Program bantuan sosial tunai untuk warga miskin Bantu Umak ini melengkapi program yang sudah dilakukan yakni bedah rumah. Program Bantu Umak ini menyasar langsung warga kategori miskin ekstrem.

Program Bantu Umak tersebut akan menanggulangi kemiskinan ekstrem di Muba dengan menggunakan Data P3KE Desil 1. Penyaluran dana ini dilakukan melalui transfer ke tabungan milik warga sesuai data.●

IKN NUSANTARA PROYEK TERBESAR DI DUNIA

Presiden Joko Widodo mengklaim proyek terbesar di dunia saat ini hanya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengucurkan dana senilai Rp466 triliun untuk membangun ibu kota baru tersebut.

Dia menegaskan, pemerintah berani memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimatan Timur untuk membuka sentra ekonomi baru di Tanah Air.

"Di dunia sekarang proyek terbesar yang ada itu hanya satu, di Indonesia, namanya Ibu Kota Negara Nusantara," kata Jokowi dalam Munas asosiasi Real Estate Indonesia (REI) 2023 di Sheraton Hotel, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023.

Presiden Jokowi lantas menawarkan kepada para pengusaha untuk ikut mengembangkan pembangunan IKN. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memberbeberkan bahwa Pemerintah Indonesia bertekad kuat untuk mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru melalui pembangunan IKN di Pulau Kalimantan.

Dia juga menyebut, saat ini sudah ada 34.000 hektar lahan di area IKN yang tersedia untuk pembelian. Dia lantas mempersilakan para pengusaha untuk bertanya harga tanah ke jajaran Otorita IKN.

"Ini ada Pak Dhony dari Otorita IKN, per 27 Juli yang lalu, 34 ribu hektare lahan sudah bisa dibeli. Dibeli itu, enggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke otorita, ini peluang," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa IKN Nusantara adalah salah satu solusi untuk mengatasi polusi udara di DKI Jakarta. Caranya dengan menggeser beban yang dipikul Jakarta ke Nusantara.

"Salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta, sehingga sebagian nanti digeser ke Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan masalah polusi udara di Jakarta dan kota sekitarnya merupakan masalah yang sudah dialami selama bertahun-tahun. Selain pengurangan beban di Jakarta dan memindahkannya ke IKN, Jokowi menyebut solusi lain adalah dengan kebijakan pemerintah saat ini yang terus mendorong agar pembangunan transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya bisa segera selesai.

Transportasi massal itu seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) ke seluruh rute yang telah direncanakan, kereta ringan atau Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek yang dalam proses pengerjaan, kereta cepat, hingga peningkatan penggunaan mobil listrik.

"MRT itu harus segera selesai di semua rute, LRT untuk semua rute harus selesai, kereta cepat itu moda-moda transportasi yang mengurangi, akan mengurangi polusi termasuk nantinya pemakaian mobil listrik kenapa kita berikan dorongan karena itu (solusi menghadapi polusi)," kata Jokowi.

Sebelumnya, polusi udara di Jakarta yang disebut semakin tidak sehat ramai diperbincangkan di media sosial.

Berdasarkan data kualitas udara yang dihimpun aplikasi kualitas udara "Nafas Indonesia" dan diunggah di laman twitter @nafasidn, disebutkan hampir seluruh titik sensor nafas di Jakarta dan kota penyangga (Jabodetabek) pada Senin pagi pukul 09.00 WIB, memiliki kualitas udara yang kotor dan mayoritas masuk kategori tidak sehat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merespons perihal solusi Presiden Jokowi yang menangani polusi udara Jakarta dengan pindah Ibu Kota Negara ke Nusantara.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL-KLHK), Sigit Reliantoro, mengatakan, solusi Jokowi tersebut dapat memindahkan sumber emisi dari Jakarta ke IKN.

"Salah satunya kan (Solusi Jokowi soal polusi udara) dengan memindahkan Covid, memindahkan sumber emisi ke sana (IKN)," kata Sigit di Kantor PPKL-KLHK, Jakarta Timur, Jumat, 11 Agustus 2023.

Dia mengatakan saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengencangkan transportasi publik. Tujuannya agar masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan, per awal Agustus 2023, progres pembangunan IKN sudah mencapai 38 persen.

Rinciannya, untuk bendungan sudah hampir 100 persen selesai. Bahkan, Bendungan Sepaku Semoi rencananya pada Oktober akan segera diresmikan. Selain itu, untuk pembangunan jalan tol di IKN pun juga sudah ada progresnya.

"Jalan tol sudah mulai juga progresnya ada yang 30 persen lebih ada juga yang 12 persen. Ini kaitannya dengan masalah pembebasan tanah yang sedang kita upayakan," ungkapnya.

Sementara itu, untuk progres pembangunan Istana Presiden sudah 21 persen dan untuk kantor presiden sudah sekitar 22 persen progresnya.

Untuk pembangunan gedung pemerintahan, yaitu kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1, kantor Kemenko 2, kantor Kemenko 3, dan kantor Kemenko 4 sudah mulai berjalan. Kantor itu untuk Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Kemenko 1 sudah 11,7 persen, Kemenko 3 sudah 8 persen, Kemenko 4 sudah 12,5 persen, Kemenko 2 ini waktu itu memang agak terlambat karena lelangnya, itu (progresnya) baru sekitar 1-2 persen. Kita harapkan itu semua Juni 2024 selesai," paparnya.

Danis mengungkapkan untuk empat kantor Kemenko yang ada, masing-masing akan ada empat gedung di dalamnya. Untuk tahap awal, gedung Kemenko akan digunakan sebagai kantor bersama atau sharing office dengan kementerian yang ada di bawahnya. Adapun, dari semua gedung Kemenko yang ada, diperkirakan dapat menampung 12 ribu

aparatur sipil negara (ASN).

Lalu, ada juga progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM). Per 3 Agustus, progresnya sudah 20,1 persen. Rencananya akan ada 36 RTJM yang dibangun di dua Kawasan, yaitu 12 unit di persil 104 serta 24 unit di persil 105 IKN dan ditargetkan semuanya selesai pada 2024.

RTJM dibangun Direktorat Jenderal Perumahan setinggi dua lantai. Pada lantai basement peruntukkan kamar tidur supir, kamar mandi dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan. Sedangkan, di lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Adapun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1.000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan meubelairnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga

Otorita IKN mengungkapkan Nusantara memiliki potensi kerja sama bisnis yang luas dengan perbankan dalam mendukung ibu kota negara baru melalui kemudahan transaksi keuangan.

"Ibu Kota Nusantara memiliki potensi bisnis yang cukup luas sehingga terbuka peluang skema kerja sama yang dapat dilakukan tidak hanya oleh perbankan seperti BUMN Bank Mandiri, namun termasuk dengan anak usaha Mandiri dalam mendukung pengembangan ibu kota baru," ujar Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos, di Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023.

Achmad mengatakan, OIKN menandatangani nota kesepahaman layanan jasa perbankan dan perjanjian kerja sama dengan Bank Mandiri sebagai salah satu BUMN bidang perbankan dalam rangka untuk mempermudah transaksi keuangan, baik untuk masyarakat ritel dan juga lembaga. Nota kesepahaman yang ditandatangani merupakan landasan awal untuk penyusunan perjanjian kerja sama lebih lanjut.

Nota Kesepahaman ini dapat memayungi berbagai kepentingan di kedua belah pihak. BUMN perbankan dapat bersinergi dengan OIKN dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas bangsa, green economy and energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif sebagai transformasi besar bangsa Indonesia.

Kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah menuju cashless society, di mana penggunaan uang persediaan tidak lagi sepenuhnya menggunakan uang tunai.

"Kami berharap Mandiri bisa menjadi lembaga pemerintah dengan model yang baru, berbeda dan bisa menjadi leading di sektor instansi pemerintahan dari sisi pelayanan, kompetensi, maupun dari sisi performance yang dihasilkan dalam mengelola sebuah ibu kota," ujar Achmad.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan Mandiri Rohan Hafas berharap sinergi tersebut menjadi awal untuk kolaborasi yang baik.

"Kami berharap menjadi awal untuk kolaborasi yang lebih baik dan menjadi komitmen Bank Mandiri untuk memberikan layanan yang terbaik dan prima dalam mendukung kebutuhan layanan perbankan, tidak hanya kepada OIKN sebagai lembaga negara tetapi juga kepada seluruh jajaran pegawai OIKN," kata Rohan Hafas.

Kritik Pegiat Lingkungan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut solusi polusi udara di Jakarta adalah dengan pindah ke IKN.

"Kami menyayangkan pernyataan dangkal yang berusaha menyederhanakan masalah itu keluar dari seorang presiden yang pernah menjadi Gubernur Jakarta," kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitriah Tanjung, Selasa, 8 Agustus 2023.

Suci menyebut proses pengadilan citizen lawsuit pencemaran udara Jakarta (CLS Udara) yang dimenangkan warga hingga tingkat banding sebenarnya sudah menjawab akar persoalan.

"Mulai dari over konsumsi energi kotor untuk kendaraan bermotor, emisi tidak bergerak dari industri dan PLTU di sekitar Jakarta, open burning sampah, dan sebagainya," tutur dia.

Suci menilai, seharusnya Jokowi memahami masalah polusi di Jakarta tidak sesederhana itu. "Presiden kalau mau solutif harusnya perintahkan menterinya untuk melakukan sesuatu yang lebih solutif," ujar dia.

Menurut Suci, solusi apapun tidak akan efektif menangani polusi udara sebelum masalah ini dibicarakan bersama-sama oleh lintas kementerian. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk mengatasi emisi lintas batas.

Hal senada juga disampaikan Greenpeace Indonesia yang menyebut gagasan pindah ke IKN bukan solusi.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas. menyebutkan dua argumentasi. Pertama, puluhan juta penduduk di Jakarta saat ini sudah bergantung pada perekonomian di kota tersebut, namun sudah terjebak dalam situasi lingkungan, terutama polusi udara yang sudah di ambang batas.

"Pemerintah seharusnya melakukan penanganan yang serius dan lebih pro-

gresif terhadap hal itu, bukan langsung main pindah saja ke IKN," tutur Arie.

Menurut Arie, sumber pencemaran dan polusi udara harus ditekan dengan kebijakan yang lebih progresif, termasuk menjalankan putusan pengadilan atas gugatan warga terkait polusi udara di Jakarta.

"Kedua, IKN yang dicirikan sebagai smart forest city belum berarti tidak akan terdampak dari polusi udara," beber Arie.

Jika energi batu bara masih menjadi sumber utama listrik di IKN, maka polusi udara mengancam ibu kota baru. Meskipun sumber polusi dari transportasi dan pabrik bisa ditekan, kebakaran hutan bisa mengancam IKN.

Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan IKN Nusantara menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru bagi ekonomi Kalimantan Timur. Provinsi tersebut menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nyaris 7 persen sepanjang Semester I-2023.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim ini dua kali lebih tinggi dari pertumbuhan tahun lalu dan di atas rata-rata nasional 5,11 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menyebut pembangunan sejumlah infrastruktur IKN dan pembangunan kilang RDMP Balikpapan berkontribusi terhadap kinerja konstruksi. Sektor ini menjadi salah satu yang tumbuh paling tinggi sepanjang semester pertama yakni 19,72 persen. Sektor ini juga menyumbang sekitar 9,6 persen terhadap ekonomi daerah tersebut.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan, IKN akan memberi dampak ekonomi ke Kaltim melalui dua tahap. Tahap pertama yakni dampak yang diberikan selama proses konstruksi. Tahap kedua setelah IKN sudah sepenuhnya terbangun.

Pada tahap awal, pembangunan konstruksi berbagai gedung atau jalan hingga bendungan di IKN membutuhkan berbagai komponen seperti semen dan besi. Selama proses pembangunan, penjualan bahan bangunan konstruksi akan meningkat di Benua Etam.

Sektor konstruksi ini menyumbang 1,5 poin persentase dari pertumbuhan ekonomi Kaltim selama semester pertama yang tercatat 6,8 persen. Sumbangannya hanya lebih rendah dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2,24 poin persentase.

Sumbagan sektor konstruksi itu jauh lebi tinggi dibandingkan tahun lalu."Peningkatan sumbangan pertumbuhan sektor konstruksi itu sebenarnya sudah terlihat sejak kuartal pertama 2023," kata Rendy.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitriah Tanjung

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet

Bukan hanya itu, pembangunan IKN akan berdampak terhadap ekonomi melalui upah pekerja. Upah yang dibayarkan dari pemberi kerja kemudian nanti dibelanjakan kepada beragam komponen lapangan usaha di provinsi di mana proyek itu berlangsung.

Selain itu, IKN juga telah menjadi magnet daya tarik bagi masyarakat umum yang penasaran dengan lokasi calon ibu kota baru itu. Ramainya kunjungan ke IKN juga memberi dampak ekonomi di sekitar wilayah proyek. Ini belum termasuk kunjungan kerja kementerian atau lembaga ke proyek tersebut.

Setelah IKN benar-benar terbangun, ibu kota baru ini akan memberi dampak ekonomi jangka panjang bagi Kaltim melalui diversifikasi sumber pertumbuhan. Selama ini, Kaltim sangat bergantung pada sektor pertambangan sebagai penggerak utama ekonominya. Namun sektor ini tidak berkelanjutan di tengah meningkatnya kepedulian terhadap perubahan iklim.

"Jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat bisa melakukan diversifikasi sektor lapangan usaha, misalnya menjadi industri pengolahan dari pembangunan IKN, maka ini tentu akan berdampak lebih panjang terhadap perekonomian daerah tersebut," kata Rendy.●

ARTIS REBUTAN NYALEG, KEMAMPUAN PAS-PASAN

Sejumlah artis muda Indonesia menyatakan akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. Mereka ingin berebut kursi sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

Beragam nama baru dari dunia hiburan Tanah Air ini telah mendaftarkan diri sebagai caleg 2024, mulai dari artis sinetron hingga pelawak. Sebut saja Ritchie Ismail atau Jeje Govinda, Nisya Ahmad, Verrell Bramasta, Aldi Taher, hingga Al Ghazali.

Sebanyak 18 partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 telah mengajukan berbagai calon yang akan bersaing merebut kursi parlemen.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, menjelaskan, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan berhak menjadi bakal caleg.

"Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk dicalonkan, kecuali ada putusan pengadilan dan ada peraturan perundang-undangan yang melarangnya," ungkap Idham.

Mengenai caleg dari kalangan artis, Idham menegaskan bahwa selama publik figur tersebut adalah warga negara Indonesia dan memenuhi persyaratan hukum, mereka berhak mendaftarkan diri sebagai bakal caleg.

"Artis adalah warga negara, jadi selama memenuhi peraturan perundang-undangan, artis berhak menjadi bakal calon anggota legislatif. KPU meyakini perjalanan penyelenggaraan dari pemilu ke pemilu, literasi elektoral masyarakat Indonesia semakin baik," kata Idham.

Namun, para pengamat politik menganggap keputusan partai politik untuk mengusung artis sebagai caleg pada Pemilu 2024 lebih didasari oleh nafsu untuk meningkatkan jumlah kursi di parlemen daripada memperkuat kerja legislatif.

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menyatakan, tren ini sudah berlangsung sejak pemilu langsung diberlakukan pada 2004. Caleg artis yang sudah populer lebih menarik perhatian daripada kader partai yang kurang dikenal.

"Karena kepopuleran artis ini lebih menarik perhatian dari pada kader partai yang lain," jelasnya.

Karus menambahkan, pemantauan kinerja DPR sepanjang 2019-2023 juga dinilai tidak memuaskan. Contohnya, pada 2022, DPR hanya berhasil mengesahkan tiga RUU dari target 40 RUU yang masuk prolegnas prioritas DPR.

Menurut Karus, partai politik cenderung mengusung artis sebagai caleg untuk mendapatkan suara atau kursi lebih banyak. Hal ini terjadi karena persaingan semakin ketat dengan bertambahnya jumlah partai politik dan kursi yang diperebutkan di DPR.

Kehadiran artis di dunia politik dianggap dapat membantu partai politik mencapai ambang batas parlemen dan meraih suara lebih besar. Namun, Karus menyatakan bahwa kehadiran caleg artis sebetulnya merugikan masyarakat, karena kemampuan mereka sebagai legislator dinilai kurang memadai.

Dalam penilaian Karus, anggota legislatif dari kalangan artis yang sudah duduk di DPR selama ini belum cukup menunjukkan kinerja yang memadai dalam mengemukakan gagasan di parlemen. Meskipun mereka memiliki keahlian di bidang seni, kemampuan dalam bekerja sebagai anggota legislatif tidak bisa dianggap instan. ● IRY

Mengenal Sosok Artis Muda Nyaleg di Pemilu 2024

Jeje Govinda

Ritchie Ismail atau yang memiliki nama panggung Jeje Govinda resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2024.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara formal untuk persiapan Pemilu 2024. Jeje Govinda didampingi oleh Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Patrio; Wakil Ketua Umum PUAN PAN, Putri Zulkifli Hasan; dan Ketua DPP PAN, Zita Anjani.

Di sela-sela pengukuhan afiliasinya dengan PAN, Jeje Govinda membeberkan alasannya terjun ke dunia politik dan bertarung di Pemilu 2024.

"Saya kenal PAN sudah lama, awalnya melalui Raffi. Baru sekarang saya memberanikan diri untuk bergabung. Itu adalah keinginan mendiang ayah saya untuk terjun ke politik yang tidak bisa dia penuhi. Akhirnya, saya memutuskan untuk meneruskan keinginannya," kata Jeje Govinda saat jumpa pers di Kantor Pusat PAN di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 7 Agustus 2023.

Jika terpilih, Jeje Govinda menargetkan menjadi bagian dari Komisi X dan fokus mengadvokasi hak-hak musisi.

"Sebagai seorang musisi, saya ingin mengembangkan skena musik di daerah. Saya ingin memperjuangkan agar musisi mendapatkan perlakuan yang adil, terutama mengingat desas-desus seputar royalti," jelasnya.

Jeje sendiri akan mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Profil Jeje Govinda

Jeje adalah putra dari pasangan Isis Ismail dan Farida Budyarti. Dia lahir di Jakarta pada 22 April 1983. Perjalanan kariernya dalam dunia hiburan Indonesia dimulai pada 2008 ketika ia menjadi pemain drum untuk band lokal Indonesia bernama Govinda. Saat itu, dia memutuskan untuk menggunakan nama panggung Jeje.

Pada 2018, Jeje menikahi kekasihnya, Syahnaz Sadiqah, yang merupakan adik kandung dari artis terkenal di Tanah Air, Raffi Ahmad.

Dalam pernikahannya dengan Syahnaz Sadiqah, Jeje Govinda dikaruniahi anak kembar yang diberi nama Zayn Sadavir Ezhilan Ismail dan Zunaira Alessia Safaraz Ismail.

Melalui kanal YouTube resmi bernama "Jeje & Nanas Official," Jeje secara aktif berbagi kisah-kisah dan momen-momen dari kehidupan sehari-hari bersama keluarganya.

Ia juga menjalin interaksi dengan para penggemarnya melalui akun pribadi di platform media sosial seperti Instagram dan Twitter dengan nama pengguna @ritchieismail.

Walaupun banyak masyarakat mengenal Jeje setelah ia memulai karier sebagai drummer Govinda, sejarah kariernya ternyata sudah dimulai sebelumnya. Jeje sudah memulai langkah pertamanya di industri hiburan Indonesia, terutama di dunia musik, saat ia mengikuti ajang pencarian bakat "The Dream Band."

Kompetisi ini diadakan oleh salah satu stasiun televisi swasta dan menjadi salah satu titik awal dalam perjalanan kariernya menuju popularitas. •

Nisya Ahmad

Nisya Saadia Ifat Ahmad, adik dari Raffi Ahmad, resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI di Dapil Jawa Barat.

Nisya mengatakan alasannya bergabung dengan PAN adalah agar bisa memberikan kontribusi positif bagi kehidupan orang banyak. Ia menyebut PAN bukanlah partai politik yang menakutkan.

"Lagi pula, anggotanya tidak semenyeramkan seperti yang saya pikirkan. Biasanya, ada anggapan bahwa mereka menyeramkan, tapi saya menyadari itu tidak terjadi di sini. Mereka cukup santai. Saya ingin belajar dan ternyata ada hal-hal yang ingin saya pelajari, dan suasana di sini nyaman. Saya merasa sangat diterima di sini. Terima kasih semuanya," kata Nisya.

"Jadi, saya memiliki niat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Saat kita tumbuh, kita secara alami mencari hal-hal baru, keinginan untuk berguna bagi banyak orang. Jadi, insya Allah saya sudah gabung di sini lewat pendekatan ini," ujarnya.

Nisya menegaskan, keputusannya terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai caleg adalah keinginannya sendiri. Dia mengungkapkan aspirasinya untuk membuat dampak positif pada kehidupan banyak orang.

Dia menegaskan fokusnya pada advokasi untuk perempuan dan anak-anak. "Sebagai perempuan, saya sepertinya akan fokus pada isu-isu perempuan, tentunya hak-hak Perempuan atau isu-isu yang berkaitan dengan ibu dan anak, mengingat saya sendiri punya tiga anak. Itu sejalan dengan keseharian saya. rutinitas saya sehari-hari," katanya.

Profil Nisya Ahmad

Nisya Ahmad yang dikenal sebagai artis sekaligus saudara kandung Raffi Ahmad merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Nisya lahir pada 17 Oktober 1990.

Ketenarannya tidak hanya menjadi seorang seniman. Terbukti, Nisya juga merambah di berbagai bidang, termasuk menyanyi. Lagunya "Di Seluruh Dunia" yang dirilis pada 2014 menandai awal karir Nisya Ahmad.

Tapi itu bukan hanya satu lagu. Ia juga menyanyikan tiga lagu lainnya, yakni Terima Kasih Telah Singgah (2019), Wahai Sahabatku (2019), dan Berteduh (2020).

Selain karir musiknya, Nisya Ahmad juga berkecimpung di dunia akting. Dia telah muncul di berbagai serial web dan acara televisi. Dia pernah berakting di dua film, yakni Move On (2015) dan The Secret: Suster Ngesot Urban Legend (2018).

Nisya Ahmad tidak hanya sibuk di dunia entertainment, dia juga aktif di media sosial.

Nisya menikah dengan Andika Rosadi sejak 31 Januari 2009. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai tiga orang anak, yakni Mikaela Atqia Rosadi, Aeshya Balqes Rosadi, dan Munawar At Thareeq Gibran Rosadi.•

Verrell Bramasta

Verrell Bramasta juga resmi menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN). Dia disebut akan maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI pada Pemilu 2024.

Bergabungnya Verrell Bramasta diperkenalkan oleh Wakil Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Putri Zulkifli Hasan; Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Patrio; dan Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, memastikan keanggotaan Verrell Bramasta sebagai kader PAN dan telah menerima pemberkasan. Verrell Bramasta akan berkontestasi di Dapil Jawa Barat.

"Saya udah terima pemberkasan beliau sudah daftar di KPPN, di Komite Pemenangan Pemilu Nasional, kebetulan saya ketuanya. Jadi sudah terdaftar sebagai anggota PAN dan sudah terdaftar sebagai bakal calon legislatif," ujar Yandri di kompleks parlemen, Kamis, 9 Februari 2023.

Verrell mengatakan, ketika di dunia entertainment dirinya tidak bisa membantu banyak orang. Namun, ketika menjadi politisi, jumlah orang yang bisa dibantu akan lebih banyak.

Verrell terjun di politik karena mengikuti jejak kedua orang tuanya, Ivan Fadilla dan Venna Melinda. Sedari kecil, kata Verrell Bramasta, ia sudah melihat bagaimana Venna Melinda berkampanye lalu bertemu dengan banyak orang.

"Kebetulan, Mama di dunia politik sudah 10 tahun dan Papa menjadi orang yang mendukung Mama untuk masuk ke politik," ucap Verrell Bramasta.

Verrell Bramasta menegaskan, dunia politik bisa membantu lebih banyak orang dan bisa membuat kedua orangtua bangga. "Dengan aku di politik, aku akan bisa membantu lebih banyak orang dan aku rasa hal itu yang bisa membuat kedua orang tua aku bangga," tuturnya.

Profil Verrell Bramasta

Verrell Bramasta merupakan aktor dan model kelahiran Jakarta, 11 September 1996. Dia merupakan anak pasangan Ivan Fadila dan Venna Melinda yang juga selebritas Tanah Air. Selain itu, sang ibu juga tercatat pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Sebelumnya, dia tergabung dalam Partai Demokrat. Saat ini, Venna Melinda bergabung dengan Partai Perindo untuk menghadapi pesta politik 2024.

Faktor fisik dan orang tua membuat Verrell tak butuh waktu lama untuk menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Dia kemudian terjun ke dunia hiburan. Sinetron yang pertama kali dia bintangi adalah Bintang di Langit (2014). Setelah itu, wajah Verrell semakin sering terlihat di layar kaca.

Tak hanya di dunia seni peran, Verrell kemudian mengasah bakat seni lain yang dia miliki, seperti musik elektronik (DJ) dan tarik suara. Aku Cinta Padamu adalah lagu pertama yang dilahirkan oleh Verrell. Meski demikian, Verrel ternyata lebih bersinar di dunia seni peran.

Beberapa judul sinetron pernah dibintangi Verrell Bramasta. Setelah Bintang di Langit, dia tampil dalam Penyihir Cantik, Rajawali, 7 Manusia Harimau New Generation, dan Cinta dan Rasa.

Dia juga pernah dipercaya untuk bermain dalam film layar lebar. Beberapa judul film yang pernah dia bintangi adalah LDR, Where is my Romeo, Dubsmash dan ILY From 38.000 Ft.

Tak hanya itu, Verrel juga diketahui pernah bermain dalam sejumlah FTV, seperti Lovedia: Cinta Setengah Sadar, Delivery Cinta Dijalan Cinta No.26, dan Cleaning Service Kesayangan si Bos•

Aldi Taher

Keterlibatan Aldi Taher di dunia politik sempat menghebohkan karena awalnya dia berafiliasi dengan dua partai politik berbeda, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PBB) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Namun, Aldi Taher kini dengan tegas memilih untuk beraliansi dengan Partai Perindo. Ia telah menyatakan kesiapannya untuk bersaing pada Pemilu 2024.

"Tujuannya sama, membangun Indonesia," tegas Aldi Taher.

Aldi Taher memiliki pesan untuk generasi muda. Sebagai seorang seniman yang menjadi politisi dan ayah dari satu anak, dia mendorong kaum muda untuk tidak menghindar dari politik.

"Anak muda jangan malu berpolitik, jangan takut berpolitik. Sebagian besar masih tidak mau terlibat, apa gunanya berpolitik? Persepsi masih miring, itu masalahnya," ujar Aldi Taher.

Menurut Aldi Taher, tak ada salahnya jika anak muda ingin berpolitik. Dia mengenang awal politik presiden pertama Indonesia, Sukarno.

Sebelumnya, Aldi Taher dicoret dari daftar calon anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 karena memiliki afiliasi dwipartai. Dia menegaskan, ke depan, dirinya akan memperebutkan satu kursi di DPR bersama Partai Perindo.

"Ya, pencalonan saya untuk DPRD dibatalkan, dicabut," kata Aldi Taher di kawasan Kebon Jeruk Jakarta belum lama ini.

Aldi Taher memastikan pencopotannya dari daftar calon DPRD DKI Jakarta tidak akan menghalangi kiprah politiknya. Ia tetap berkomitmen memeriahkan Pemilu 2024 sebagai caleg dari Partai Perindo.

Awalnya, nama Aldi Taher diumumkan sebagai caleg dari PBB yang bertujuan untuk memperebutkan kursi di DPRD DKI Jakarta. Pencalonannya didaftarkan ke KPU DKI Jakarta pada 13 Mei 2023.

Namun, baru berselang sehari, Aldi Taher mengungkapkan keputusannya bergabung dengan Partai Perindo. Ia kemudian didaftarkan untuk memperebutkan kursi DPR.

Profil Aldi Taher

Aldi Taher memiliki nama asli Rahmat Aldiansyah. Dia lahir di Jayapura, Papua, 25 Oktober 1983.

Sebelum merambah ke dunia politik, Aldi Taher meraih ketenaran sebagai seorang aktor, pelawak, model, penyanyi, penulis lagu, dan presenter. Selain itu, ia juga sempat merintis bisnis kuliner mi ayam di depan rumahnya.

Aldi Taher memulai kariernya sebagai seorang model dalam majalah Aneka Yess! pada usia 18 tahun. Nama Aldi Taher semakin dikenal berkat partisipasinya sebagai finalis dalam acara MTV VJ Hunt. Dia kemudian tampil dalam video klip lagu Manusia Bodoh yang dinyanyikan oleh Ada Band.

Aldi Taher memulai debutnya dalam dunia sinetron pada 2005. Sementara itu, peran pertamanya dalam layar lebar adalah film Terowongan Casablanca pada 2007.

Pada 2021, film Bisikan Jenazah di mana Aldi Taher tidak hanya berperan sebagai aktor tetapi juga sebagai sutradara, produser, dan penulis skenario, mendapatkan perhatian luas.

Aldi Taher diketahui pernah bergabung dengan beberapa partai politik, termasuk PKS pada 2019, Golkar pada 2020, dan PBB pada 2021. Pada 2023, Aldi Taher memutuskan untuk menjadi bagian dari Partai Perindo.

Aldi Taher pernah menikah dengan penyanyi dangdut Dewi Perssik pada 2008. Namun, pernikahan itu berlangsung singkat, hanya bertahan selama satu tahun.

Pada 2014, ia menikah dengan Georgia Aisyah dan dikaruniai dua anak. Pada masa pernikahan tersebut, Aldi Taher menghadapi tantangan berat dalam bentuk penyakit kanker getah bening.

Meskipun berhasil sembuh dari penyakit tersebut, pernikahan Aldi Taher dan Georgia Aisyah berakhir pada 2018.

Dua tahun setelah perceraian itu, Aldi Taher menikah untuk ketiga kalinya dengan Salsabilih. Pada Agustus 2021, pasangan ini dikaruniai seorang putri cantik. •

Al Ghazali

Al Ghazali secara resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan menandai langkahnya sebagai seorang kader di dalam partai pimpinan Prabowo Subianto. Keputusan ini tidak lepas dari pengaruh ayahnya, Ahmad Dhani, yang telah lama terlibat dalam dunia politik.

Al Ghazali menjelaskan alasan di balik keputusannya tersebut. Ia mengakui bahwa salah satu faktor yang mendorongnya adalah kekagumannya terhadap Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.

Tidak hanya karena kagum pada Prabowo, Al Ghazali juga ingin mengikuti jejak politik ayahnya, Ahmad Dhani, yang merupakan anggota Partai Gerindra. Bahkan, Ahmad Dhani pernah diajukan sebagai calon wakil bupati untuk Kabupaten Bekasi, yang menunjukkan keterlibatan dan dedikasinya dalam dunia politik.

Saat ditanya tentang kontribusinya di masa depan bersama Partai Gerindra, Al Ghazali mengatakan bahwa ia saat ini masih berada dalam tahap pengamatan.

Meskipun bergabung dengan partai tersebut, kakak El Rumi dan Dul Jaelani ini belum memiliki rencana konkret untuk menjadi caleg. Ia nampaknya ingin lebih dulu memahami dinamika politik di dalam partai dan merencanakan langkah-langkahnya secara matang.

Keputusan ini juga menunjukkan peran keluarga dalam membentuk pandangannya terhadap politik dan pengaruh positif dari figur ayahnya, Ahmad Dhani.

Meskipun belum memiliki rencana konkret untuk peran politiknya di masa depan, langkah ini menjadi titik awal dari keterlibatannya dalam arena politik Indonesia.

Profil Al Ghazali

Ahmad Al Ghazali Kohler atau yang lebih dikenal dengan Al Ghazali adalah penyanyi, aktor, sekaligus DJ asal Indonesia. Artis kelahiran Jakarta, 1 September 1997 ini adalah putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Sejak kecil, sosoknya telah dikenal publik setelah memulai karier musiknya dalam band Lucky Laki bersama kedua adiknya, El Rumi dan Dul Jaelani. Band yang debut pada 2009 itupun masih aktif hingga kini.

Single pertama Al Ghazali bersama Lucky Laki yang berjudul Superman berhasil jadi lagu hits kala itu. Pada 2012, Al Ghazali kembali nerilis sebuah single berjudul 'Aku Suka Bersama Orang yang Aku Suka'.

Dua tahun kemudian, single barunya yang berjudul Kurayu Bidadari juga berhasil membuat penggemar terpukau.

Tak hanya jago bermusik, Al Ghazali juga melebarkan sayap ke dunia seni peran. Pada 2010, ia membintangi sebuah film yang berjudul Laskar Cilik. Setelah itu, ia pun mendapatkan berbagi tawaran film, salah satunya Runaway (2014) dan Aku Tahu Kapan Kamu Mati (2020).

Selain film, Al Ghazali juga membintangi sejumlah serial web, seperti Little Mom (2021) di mana dirinya beradu akting dengan Natasha Wilona. Serta berperan sebagai Dafa di Vidio Original Series berjudul Virgin Mom (2022).•

IMIGRASI

Gunawan Effendi

Jika abai terhadap urusan imigrasi, kemungkinan kita bagaikan katak dalam tempurung. Setidaknya terkungkung di lingkungan dalam negeri. Sedangkan batas-batas negara bagaikan sudah menjadi garis khayal yang usang.

Toh lembaga imigrasi justru menjadi penanda bahwa garis khayal itu masih ada. Bukan sebagai garis, melainkan tirai atau tapis yang dapat ditembus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Begitulah awal mula terbongkarnya jaringan donor ginjal, yang praktiknya ternyata mirip jual-beli salah satu organ vital di tubuh manusia itu.

Jadi, pada awal Juli 2023 itu, Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kedatangan dua warga yang hendak membuat paspor. Paspor itu dokumen perjalanan, semacam identitas diri warga negara yang berlaku di luar negeri. Jika datang hendak membuat paspor, maka normalnya ada rencana bepergian ke luar negeri

Nah, muncul sesuatu yang mengherankan petugas imigrasi Ponorogo kala itu. Warga yang mengajukan paspor bukanlah warga Ponorogo. Satu orang memegang kartu tanda penduduk (KTP) Sidoarjo, masih satu provinsi dengan Ponorogo. Yang satu lagi malah memegang KTP Kota Tangerang Selatan, Banten. Keduanya mengaku hendak berlibur di Malaysia. Namun, kecurigaan pembuatan paspor di tempat yang berbeda dengan domisili itu berujung keduanya harus balik kanan dari Kantor Imigrasi Ponorogo.

Eh, rupanya keduanya datang lagi menjelang Kantor Imigrasi tutup menjelang sore. Petugas Imigrasi Ponorogo malah makin curiga sehingga mendalami keduanya dengan berbagai pertanyaan. Alhasil, terungkaplah alasan liburan ke Malaysia hanyalah kepura-puraan. Para petugas Kantor Imigrasi Ponorogo juga berhasil mengungkap bahwa tujuan keduanya membuat paspor adalah hendak menjadi donor ginjal di Kamboja, negeri tetangga yang memiliki banyak kaitan sejarah di masa lalu dan kini sama-sama menjadi anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dengan Indonesia.

Nah, dengan informasi donor ginjal itu, petugas imigrasi Ponorogo berhasil melacak dan mengamankan tiga orang lain yang terkait dengan warga Sidoarjo dan Tangsel tadi. Di Jalan Juanda, petugas mengamankan warga Jakarta, Bogor, Jawa Barat, dan Mojokerto, Jawa Timur. Apakah ada keanehan terkait dengan perbedaan domisili mencakup provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan kejadian di Ponorogo? Sebenarnya tidak, karena jaringan donor ginjal itu berhimpun di dunia maya melalui media sosial facebook.

Kisah selanjutnya, boleh jadi sudah banyak yang mengetahui. Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah di perumahan Villa Mutiara Gading, Setia Asih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 19 Juli 2023. Ini tentu terkait dengan kejadian awal di Ponorogo tadi.

Keesokan harinya, berita penggerebekan itu viral dan tergolong paling banyak dibaca di web berita media terkemuka. Pada hari yang sama, tiga petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo menerima penghargaan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Tetu karena ketiganya berhasil mengamankan lima orang yang diduga terlibat sindikat perdagangan organ internasional pada 4 Juli 2023.

"Berkat kejelian petugas imigrasi saat proses profiling dan pendalaman permohonan paspor, terduga sindikat perdagangan organ itu bisa segera dicegah aksinya. Inilah mengapa proses pendalaman dan pemeriksaan dokumen dilakukan dengan ketat. Kita bisa mencegah perbuatan kriminal atau ilegal dari sini," ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Kamis, 20 Juli 2023

Pak Dirjen Silmy yang sebelumnya menjabat Dirut BUMN Krakatau Steel pun menyerahkan langsung penghargaan itu kepada tiga petugas Kantor Imigrasi Ponorogo. Sebut. saja masing-masing Hendro Tri Kusumo Atmojo, 35; Arief Rachmaddan, 30; dan Iqbal Aly Noor Said, 26. Maksud penyebutan nama ini agar ketiganya menjaga kinerja dan tak tergoda untuk menyimpang saat menghadapi iming-iming penyelewengan di kemudian hari. Apalagi memang ada oknum petugas imigrasi yang terlibat dalam jaringan donor ginjal ini, selain seorang polisi.

O ya, boleh jadi banyak yang bertanya-tanya mengapa Silmy lebih memilih jabatan Dirjen Imigrasi? Itu pun melalui lelang jabatan dan seleksi, dan meninggalkan gaji besar di BUMN. Ringkasnya, hidup adalah pilihan. Tapi, lebih relevan melihat kinerjanya justru saat peringatan proklamasi ke-78 Indonesia merdeka ketika batas-batas negara bagaikan garis khayal usang.●

BUMN KARYA BIKIN RUGI NEGARA

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tak henti-hentinya diterpa angin. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu terus-menerus dihadapkan dengan masalah.

Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mencatat total utang BUMN Karya kepada himpunan bank milik negara (Himbara) mencapai Rp46,21 triliun. Pinjaman tersebut terbagi untuk masing-masing BUMN dengan besaran nilai yang berbeda.

"Menurut catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah sebesar Rp46,21 triliun," katanya saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis, 10 Agustus 2023.

Mahendra tidak merinci bank mana saja dan detail utang BUMN Karya. Sebab, keputusan mengenai penyaluran kredit dilakukan dari masing-masing bank kepada debiturnya, sehingga tidak bisa digeneralisir.

"Kalau kondisi di masing-masing pinjaman bank akan berbeda-beda. Ini tidak menyampaikan laporan secara menyeluruh terhadap hal ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menuturkan, pihaknya terus mengawasi utang perusahaan pelat merah tersebut. Terlebih, sebagian besar kredit kepada debitur BUMN berasal dari Himbara dengan pencadangan yang signifikan untuk memitigasi risiko.

"Hal ini tentunya sejalan dengan kemampuan bank-bank Himbara untuk memberikan kredit kepada perusahaan besar di Indonesia, termasuk BUMN," ujar Dian.

OJK pun mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam bentuk penyaluran kredit kepada para pelaku usaha, termasuk BUMN. Tetapi, Dian mengakui dalam praktiknya perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan mematuhi peraturan perundangan.

"OJK sebagai otoritas pengawasan perbankan selalu memantau perkembangan kredit bank, baik dari sisi agregat secara industri maupun secara individual bank," ungkap Dian.

Berikut rincian deretan utang ke bank sampai dengan Semester I-2023 dari tiga emiten BUMN Karya yang sudah mempublikasikan laporan keuangan:

Menteri BUMN, Erick Thohir

PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

Waskita mencatatkan liabilitas Rp84,31 triliun pada Semester I-2023. Liabilitas perusahaan naik 0,38 persen dibanding dengan Desember 2022 Rp83,98 triliun.

Dari total liabilitas perusahaan, adapun liabilitas jangka pendeknya meningkat 6,24 persen menjadi Rp 22,79 triliun dari sebelum Rp21,45 triliun. Lalu, liabilitas jangka panjang tercatat Rp61,51 triliun, turun 1,62 persen dari akhir Desember 2022 yaitu Rp62,53 triliun.

Terdapat utang bank jangka pendek Rp801,12 miliar pada paruh pertama 2023 dari sebelumnya Rp814,05 miliar. Catatannya, utang bank jangka pendek pihak ketiga dari entitas anak yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) ke PT Bank DKI Tbk yaitu Rp671,12 miliar.

Lalu, utang kepada PT Waskita Karya Realty (WKR) ke PT BPR Bank Jawa Barat dan Banten Tbk yaitu Rp100 miliar. Perusahaan juga memiliki daftar utang bank jangka panjang senilai Rp46,14 triliun pada paruh 2023. Jika dikalkulasikan dari 31 Desember 2022, utang bank jangka panjangnya turun 0,70 persen dari Rp46,47 triliun.

Jika melihat catatan keuangannya, ada sejumlah utang jangka panjang perusahaan yang bernilai jumbo ke beberapa bank. Seperti utang perusahaan ke PT Bank BTPN Tbk dengan total

Rp2,27 triliun, PT Bank Pan Indonesia Tbk senilai Rp1,93 triliun, dan Bank of China Ltd Rp1,14 triliun.

Selanjutnya, utang kepada PT BPR Jabar dan Banten Tbk senilai Rp998,22 miliar, PT Bank Permata Tbk senilai Rp699,59 miliar, PT Maybank Indonesia Tbk senilai Rp500 miliar, dan Bank QNB Indonesia yaitu Rp417,79 miliar.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)

Perusahaan mencatatkan liabilitas Rp56,7 triliun pada Semester I-2023.

Catatannya, utang perusahaan ke bank di segmen pihak berelasi yaitu PT Bank Mandiri Tbk yaitu Rp3,87 triliun. Lalu, PT Bank Negara Indonesia Tbk Rp990 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk senilai Rp504,54 miliar, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu Rp260,09 miliar.

Perusahaan mencatatkan sejumlah utang jangka panjang hingga Rp5,58 triliun hingga kuartal dua 2023. Utang jangka panjang dibagi menjadi dua yaitu pihak berelasi Rp2,72 triliun dan pihak ketiga Rp3 triliun.

Lalu, terdapat utang perusahaan dengan nilai yang besar ke beberapa bank pada segmen pihak ketiga. Seperti utang perusahaan ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dengan total Rp1,47 triliun, PT Bank HCBC Indonesia senilai Rp982,06 miliar, dan PT Pan Indonesia Tbk sejumlah Rp750 miliar

PT PP Tbk (PTPP)

Emiten selanjutnya, PTPP mencat-

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo

Liabilitas perusahaan turun 1,52 persen dibanding dengan Desember 2022 sebesar Rp57,57 triliun. Dari total liabilitas tersebut, liabilitas jangka pendek WIKA turun 3,09 persen menjadi Rp35,01 triliun dari sebelum Rp36,13 triliun. Lalu, liabilitas jangka panjang tercatat Rp21,68 triliun, naik 1,14 persen dari akhir Desember 2022 yaitu Rp21,44 triliun.

Menukil laporan keuangan perusahaan, terdapat utang bank jangka pendek Rp14,66 triliun pada paruh pertama 2023 dari sebelumnya Rp14,78 triliun. Utang bank jangka pendek terdiri dari pihak berelasi Rp9,7 triliun dan pihak ketiga Rp4,96 triliun.

> Menurut catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah sebesar Rp46,21 triliun

atkan liabilitas Rp42,72 triliun pada Semester I-2023, dibanding dengan Desember 2022 Rp42,79 triliun. Dari total liabilitas perusahaan, adapun liabilitas jangka pendeknya Rp24,2 triliun. Lalu, liabilitas jangka panjang tercatat Rp18,41 triliun.

Terdapat utang bank jangka pendek Rp4,45 triliun pada paruh pertama 2023 dari sebelumnya Rp5,33 triliun. Utang bank jangka pendek terdiri dari pihak berelasi Rp2,48 triliun dan pihak ketiga Rp1,96 triliun.

Adapun utang perusahaan ke bank di segmen pihak berelasi dengan nilai jumbo yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu Rp1,27 triliun. Lalu, PT

Bank Mandiri Tbk Rp557,5 miliar, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk senilai Rp371,06 miliar.

Lalu, di segmen pihak ketiga dengan nilai besar yaitu PT BPD Jabar dan Banten Tbk sebesar Rp718,4 miliar, PT Bank HCBC Indonesia Rp450 miliar, dan Bank DKI sejumlah Rp331,31 miliar.

Perusahaan mencatatkan sejumlah utang jangka panjang hingga Rp9,14 triliun hingga kuartal dua 2023, membengkak dari sebelumnya Rp 1,49 triliun. Terdapat utang perusahaan dengan nilai yang besar ke beberapa bank. Seperti utang perusahaan ke PT Bank Mandiri Tbk dengan total Rp4,7 triliun, PT bank Tabungan Negara senilai Rp1,49 triliun, dan PT Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp970 miliar.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan, pemerintah berencana membatasi kredit yang disalurkan Himbara kepada BUMN karya. Ia mengaku rencana ini tengah menjadi pembicaraan antara pimpinan bank pelat merah dan BUMN karya.

Demi membatasi pinjaman BUMN Karya, ke depan pemberian kredit akan dilakukan berdasarkan proyek alias tidak berdasarkan korporasi.

"Kami akan dukung (pinjaman) BUMN Karya lagi, tetapi tidak berdasarkan korporasi, tapi berdasarkan proyek based. Karena (pinjaman) itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kami coba inisiasi," kata Erick Thohir.

Erick menilai langkah tersebut juga dilakukan demi mencegah penyalahgunaan pinjaman seperti yang sudah lama terjadi. Maklum, penyalahgunaan tersebut pada akhirnya membuat kinerja keuangan BUMN Karya buruk.

> **Jangan sampai di aksi korporasi di atas kita bantu, (tapi) nanti ada penyelewengan. Mestinya buat proyek, ini (malah) beli tanah, beli gedung.**

"Jangan sampai di aksi korporasi di atas kita bantu, (tapi) nanti ada penyelewengan. Mestinya buat proyek, ini (malah) beli tanah, beli gedung. Itu problem lho di Karya, dan ini kembali bukan problem hari ini. Ini problem beberapa tahun yang lalu," tuturnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, mengatakan, sejak infrastruktur menjadi sektor andalan pemerintah, BUMN Karya menjadi tulang punggungnya di tataran lapangan. BUMN Karya mendapat misi khusus atau penugasan dari pemerintah untuk membangun berbagai macam infrastruktur.

Masalahnya, tak semua proyek yang ditugaskan oleh pemerintah itu memiliki Return of Investment (ROI) yang baik. Bahkan, boleh jadi sebagian dari proyek-proyek tersebut kurang layak secara bisnis. BUMN Karyanya justru mengalami rugi setelah mengerjakannya.

BUMN Karya hanya mengandalkan dukungan penuh pemerintah dengan asumsi jika terjadi hal-hal di luar perhitungan. Dengan kata lain, jika ada proyek yang membebani keuangan perusahaan, maka pemerintah diasumsikan akan ikut turun tangan membantu.

Tak pelak, perpaduan ketidaklayakan proyek dan asumsi didukung pemerintah juga melahirkan moral hazard. Ronny menilai hal ini sangat berpeluang untuk melahirkan berbagai tindakan

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar

malapraktik, mulai dari perencanaan sampai pengerjaan proyek.

"Walhasil, proyek-proyek yang dikerjakan BUMN-BUMN Karya tersebut memang akhirnya membebani keuangan perusahaan. Bahkan, sebagian malah tak mampu membayar tagihan surat utang yang telah mereka terbitkan," jelas Ronny.

Terkait permasalahan ini, pemerintah tidak boleh diam saja. Menurut Ronny ada tiga cara yang bisa diambil pemerintah agar ke depan utang tak terus membebani BUMN Karya, sehingga perusahaan pelat merah semakin sehat dan bermanfaat bagi negara.

Pertama, mengaudit proyek-proyek BUMN karya yang bermasalah. Lalu, diikuti dengan audit BUMN karya secara keseluruhan. "Jika terjadi malapraktik, tentu harus ditindak," imbuh Ronny.

Kedua, restrukturisasi keuangan perusahaan sampai dianggap oleh perbankan layak untuk bernegosiasi ulang.

"Ketiga, jalan terpahit, pemerintah melakukan intervensi soal utang BUMN Karya alias PMN (Penyertaan Modal Negara) yang disertai komitmen ketat dari BUMN karya," kata Ronny.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna, menilai pemicu penumpukan utang BUMN Karya adalah tata kelola yang tidak baik, manajemen perusahaan yang buruk, ditambah penugasan yang ugal-ugalan serta model bisnis yang buruk.

"BUMN Karya menurut saya harus diprivatisasi, sebab pelaku usaha swasta sudah banyak dan lebih berkualitas, sehingga tidak ada urgensi negara memiliki badan usaha di sektor konstruksi," katanya.

Ariyo berpendapat negara tak butuh BUMN Karya karena di Indonesia sendiri banyak perusahaan swasta di sektor konstruksi yang bagus. Sedangkan, BUMN sendiri memiliki biaya yang tidak besar dan semakin mempersempit ruang fiskal.

Ekonom Indef, Ariyo DP Irhamna

Ia juga menerangkan manajemen BUMN Karya yang buruk itu terlihat dari kinerja perusahaanya. Misal di aspek keuangan, kondisinya rugi terus, bahkan beberapa ditangguhkan di pasar modal.

Ia mencontohkan kasus pada Waskita Karya yang sahamnya ditanggungkan di pasar modal. Bahkan, baru-baru ini pemerintah juga membatalkan PNM Rp3 triliun untuk perusahaan tersebut.

Selanjutnya, ia juga menanggapi pernyataan Erick Thohir yang akan tetap mendukung pinjaman BUMN Karya ke perbankan berdasarkan proyek atau bukan korporasi lagi. Menurutnya, bank BUMN mungkin saja mau asal bunganya tinggi. Sementara, untuk bank swasta mereka mungkin akan berpikir bolak-balik.

"Artinya, penambahan pinjaman itu tidak mengatasi akar masalah. Akar masalahnya apa? Ya yang tadi yang saya sebutkan di awal: tata kelola yang tidak baik, manajemen perusahaan yang buruk, ditambah penugasan yang ugal-ugalan dan model bisnis yang buruk," tegas Ariyo.

"Di sisi lain, BUMN Karya itu tidak relevan. Negara tidak ada urgensi memiliki BUMN karya. Apalagi pekerjaanya itu disubkontraktor ke swasta," pungkasnya.●

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

APBN JANGAN BUAT BAYAR UTANG

Perusahaan BUMN Karya dibayang-bayangi utang menumpuk dan tidak mampu membayar kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Patut ditunggu bagaimana perusahaan-perusahaan pelat konstruksi itu menyelesaikan permasalahannya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mewanti-wanti kepada perusahaan pelat merah agar tidak sembarangan menggunakan dana APBN untuk membayar utang ke himpunan bank milik negara (Himbara). Permintaan itu disampaikan Basuki dalam surat yang diberikan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, menuturkan, Basuki meminta kepada para BUMN Karya memisahkan persoalan restrukturisasi dengan proyek garapannya, khususnya proyek strategis nasional (PSN).

"Pak Menteri (Basuki) sudah surati Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) ada proyek strategis nasional atau proyek-proyek prioritas, jumlahnya hampir Rp118 triliun. Itu yang bersumber dari APBN, termasuk IKN (Ibu Kota Nusantara). Itu yang hanya di BUMN Karya," katanya di Kementerian PUPR, Kamis, 10 Agustus 2023.

Endra menjelaskan, proyek yang bersumber dari APBN harusnya dipisahkan dari persoalan restrukturisasi. Sebab, restrukturisasi tidak semuanya berkaitan dengan APBN secara langsung.

"APBN kan jelas selesai proyeknya kita bayar. Kalau penyebab dari misalkan gagal bayar terhadap bunga kredit atau kewajiban-kewajiban korporasinya, aksi korporasinya itu kan tidak ada kaitannya dengan APBN," bebernya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan jangan sampai ketika progres proyek PSN selesai, kemudian dibayarkan lewat APBN langsung dipisahkan sebagai tanggung

Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata

jawab BUMN terhadap Himbara.

"Jangan seperti itu (dicampur). Nanti proyeknya enggak jadi. Padahal itu prioritas nasional dan itu perintah presiden. PSN kan perintah presiden," katanya.

Sementara terkait dengan proyek IKN Nusantara, dia optimistis tidak akan terganggu. Sebab, seluruh perbankan pelat merah masih seirama dengan pemerintah. Namun, ini menjadi tugas Erick Thohir untuk mengkonsolidasikan kepada BUMN Karya.

"Artinya proses restrukturisasi jalan terus dan program strategis jalan terus. Ini sudah diperintah Pak Presiden, artinya jangan sampai ada masalah di situ (IKN)," imbuhnya.

Kementerian Keuangan sendiri memastikan APBN tidak digunakan untuk membantu BUMN Karya membayar utang ke bank yang jumlahnya mencapai Rp46,21 triliun.

"Pada dasarnya BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan, jadi pembayaran utang-utang sudah pasti tidak langsung dari APBN," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus, Jumat, 11 Agustus 2023.

Isa menjelaskan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dari APBN jika negara memiliki utang ke BUMN tersebut. Maka, itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran.

"Kecuali kalau memang ada utang APBN, utang pemerintah, kepada BUMN tersebut ya itu akan kita bayar sejumlah kewajiban pemerintah kepada BUMN tersebut. Misalnya case di Pertamina dulu tahun lalu PLN dan sebagainya, tetapi kita tidak membayar langsung utang-utang dari BUMN itu dari APBN," jelas dia.

Isa juga mengatakan, pengadaan dana kepada BUMN juga melalui penyertaan modal negara (PMN) itupun sudah dalam penganggaran pada APBN. Ia menegaskan, PMN itupun bukan untuk pembayaran utang yang dimiliki BUMN tersebut.

"Cara lain untuk pengeluaran dari APBN kepada BUMN tentunya lewat PMN. Namun, kita tahu bahwa itu juga ada perencanaan dan schedule yang sudah ditetapkan sejak APBN, dan tahun ini untuk BUMN karya sepanjang pengetahuan kami ini masih Hutama Karya saja dan itu tidak direncanakan untuk pembayaran utang-utang," tegas Isa.

Pengamat BUMN, Hery Gunawan, menilai, jika perusahaan pelat merah tidak mampu memenuhi kewajibannya ke perbankan akan berdampak kepada kas perseroan. Dananya bakal tertahan dan sulit dicairkan.

"Yang masalah memang BUMN Karya itu. Kalau enggak mampu memenuhi kewajibannya ke bank Himbara misalnya, kasnya bisa kering," katanya dikutip dari Tirto, Kamis, 10 Agustus 2023.

Dalam kondisi tersebut, perseroan juga akan kesulitan untuk menerbitkan surat utang. Dia menilai BUMN Karya perlu melakukan restrukturisasi dan perbaikan tata kelola untuk transformasi bisnis.

"Menurut saya, yang paling mungkin ada restrukturisasi besar-besaran di BUMN Karya," katanya.

Ketidakmampuan BUMN Karya dalam membayar surat utang korporasi dinilai akan membuat saham sektor konstruksi secara umum akan semakin tertekan.

Salah satu BUMN Karya yang gagal membayar utang obligasi adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).

Perseroan diketahui tidak mampu membayar bunga dan pokok obligasi berkelanjutan IV senilai Rp135,5 miliar yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

Waskita juga masih memiliki utang senilai Rp941,75 miliar dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri B. Utang yang jatuh tempo pada 28 September mendatang ini memiliki tingkat bunga sebesar 9,75 persen per tahun.

Selain itu, entitas usaha Waskita yakni PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) juga diketahui tidak mampu membayar utang dari empat seri obligasi. Alhasil, perseroan mengadakan rapat umum pemegang obligasi (RUPO) untuk mencari jalan keluar atas gagal bayar tersebut.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina, menyatakan, ketidakmampuan BUMN Karya dalam membayar utang obligasi akan memberikan dampak negatif terhadap saham sektor konstruksi secara umum.

Akibatnya, saham sektor konstruksi akan semakin tertekan lantaran dikelilingi oleh sentimen negatif. Salah satunya adalah meningkatnya risiko kredit dari sektor konstruksi.

"Bagi perusahaan BUMN Karya lainnya yang ingin melakukan refinancing utangnya pun menjadi lebih sulit atau harus memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga dampaknya perusahaan konstruksi akan lebih sulit mencari pembiayaan. Kalaupun ada, biayanya lebih mahal" ujarnya.

Dia pun memperkirakan saham sektor konstruksi dalam jangka pendek masih akan menantang. Sejumlah proyek juga diperkirakan akan direm menjelang Pemilu, sehingga kondisi ini akan memperberat langkah perusahaan untuk melaju optimal.

Kendati demikian, Martha memperkirakan saham sektor konstruksi masih mempunyai peluang untuk bangkit setelah Pemilu 2024 diselenggarakan. Hal itu seiring dengan kebijakan calon presiden terpilih nantinya terkait dengan pembangunan infrastruktur.

Masih Dapat Proyek

Walaupun mencatatkan utang jumbo, PT PP masih dipercaya untuk menggarap proyek strategis pemerintah. Berdasarkan data Perusahaan, PT PP berhasil melakukan perolehan kontrak baru sampai dengan akhir Juni 2023 sebesar Rp11,62 triliun. Tumbuh 6,31 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (yoy) sebesar Rp10,93 triliun.

Beberapa perolehan kontrak baru yang berhasil diraih oleh perseroan hingga Juni 2023, yaitu The North-South Commuter di Filipina Rp1,36 triliun, Bendungan Cibeet Rp937 miliar, East Port Lamongan Phase 1A & 1 B Rp767 miliar, Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Paket 2 Rp683 miliar, Gedung BSI Antara Rp607 miliar.

Kemudian, pembangunan jalan akses menuju masjid di IKN dan dermaga logistik sebesar Rp397 miliar, Universitas Haluoleo Kendari Rp240 miliar, Duplikasi Jembatan PIK Rp205 miliar, Rumah Sakit Amanah Banjarmasin sebesar Rp201 miliar.

Lalu, pada Juni 2023, kontrak baru dari pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru perseroan dengan kontribusi sebesar 45,67 persen, disusul oleh BUMN (SOE) 27,27 persen, dan swasta 27,06 persen. Komposisi perolehan proyek tersebut terdiri dari Induk sebesar 85,10 persen dan anak usaha sebesar 14,90 persen.

Sedangkan, berdasarkan lini bisnis perusahaan komposisi perolehan kontrak baru perusahaan terdiri dari gedung 34,8 persen, jalan dan jembatan 24,6 persen. Kemudian, perkeretaapian 11,7 persen, bendungan 9,7 persen, pelabuhan 8,5 persen. Lalu, industri 7,4 persen, irigasi 2,1 persen, dan minyak dan gas 1,1 persen.

Sementara untuk progres proyek di IKN hingga akhir Juni 2023 perseroan telah menggenggam 8 proyek dengan total nilai kontrak sebesar Rp4,15 triliun.

Kemudian, kedelapan proyek yang

dikerjakan oleh perseroan memiliki kemajuan hingga pekan ketiga Juni 2023 yaitu penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) tahap 1 saat ini progres sudah mencapai 100 persen. Lalu, tahap 2 yaitu 63,09 persen.

Selain itu, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat yaitu 26,27 persen, Jalan Tol IKN Segment 3B Kariangau - Sp. Tempadung 24,55 persen, Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara 13,97. Kemudian, Gedung Kantor Kepresidenan 15,03 persen, Gedung Kementerian Sekretariat Negara RI 8,89 persen, dan Jalan Akses Menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik kontrak baru.

Sementara itu, Waskita Karya juga tengah fokus mengerjakan tujuh paket proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru, dengan porsi yang digarap Waskita Karya senilai Rp4,33 triliun.

"Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah masih percaya dengan menunjuk Waskita untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional," kata SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita.

Beberapa proyek IKN yang digarap Waskita Karya yaitu Proyek Jalan Tol IKN Ruas 5A, Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas gedung penunjang. Lalu, proyek gedung dan kawasan kementerian koordinator paket 3 dan gedung dan kawasan kemenko paket 4, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 1, 2, 3. Terakhir, jalan feeder distrik kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Tidak hanya itu, pada Juni 2023, Waskita berhasil membukukan kontrak senilai Rp7,82 triliun, dan mayoritasnya 66,24 persen berasal dari proyek pemerintah. Nilai kontrak baru itu ada pula yang berasal dari proyek anak perusahaan 18,85 persen, proyek BUMN/BUMD 13,62 persen, dan proyek swasta 1,29 persen.

Belajar dari kesalahan, Direktur Utama Waskita Karya, Mursyid, menuturkan, saat ini perseroan sangat selektif dalam memilih proyek, terutama dalam hal kepastian pembayaran. Minimal terdapat uang muka dan monthly payment serta sudah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi.

"Sehingga, harapannya proyek-proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan," tutur Mursyid.

Selain itu, konsep lean dan digitalisasi juga diusung agar perseroan dalam menjalankan bisnisnya dapat efektif dan efisien. Diharapkan langkah tersebut dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan.

"Perseroan melakukan sentralisasi procurement, engineering dan penerapan lean construction pada proyek-proyek yang sedang berjalan serta melakukan efisiensi beban biaya operasional serta reorganisasi sebagai konsep lean office. Hal ini dilakukan agar proses bisnis Perseroan menjadi lebih efisien dan agile," kata Mursyid.

Sementara itu, PT PP juga akan melakukan beberapa strategi untuk mencapai cash flow yang positif. Pertama, PT PP juga akan selektif dalam mengikuti mengikuti tender proyek swasta yang prospektif.

Kedua, mengoptimalkan burn rate utamanya pada konstruksi bisnis inti. Ketiga, memaksimalkan penagihan piutang usaha. Keempat, memaksimalkan tender dengan proyek yang disertai uang muka dan mengurangi porsi proyek pre-financing atau proyek turn key dan terakhir turn around dan scale down melalui pengurangan stok unit hunian vertikal di segmen properti.

Sementara itu, manajemen PT PP mengklaim rasio keuangan perseroan tetap terkendali. Saat ini, perusahaan tersebut mengklaim belum berencana untuk melakukan aksi korporasi restrukturisasi utang.

"Pada semester I 2023, current ratio PT PP mencapai 29,30 persen. Hal ini menunjukkan PT PP masih mampu memenuhi tanggung jawab jangka pendeknya," kata Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad.

Sebagai upaya penurunan saldo liabilitas, PT PP juga menargetkan asset recycling atau divestasi di sektor gedung, infrastruktur dan alat berat di 2023. ●

Pengamat BUMN, Herry Gunawan

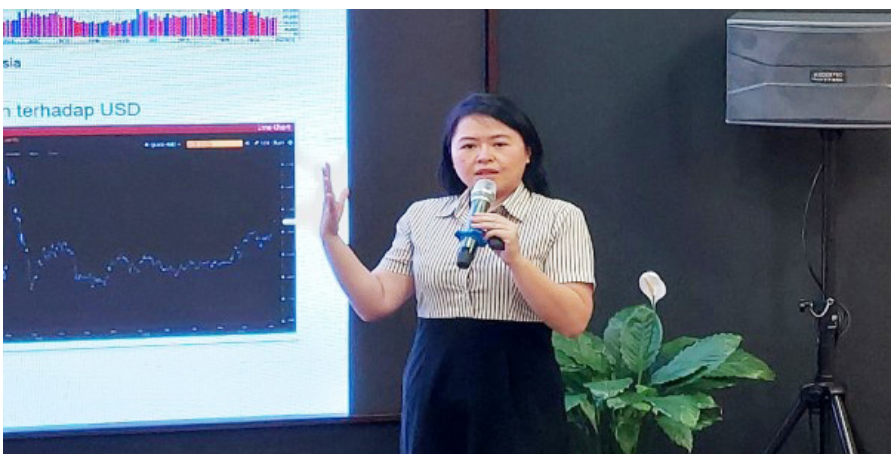

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PENYERTAAN MODAL DIBATALKAN

Kondisi keuangan dua BUMN Karya, PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya, tengah jadi persoalan. Kedua perusahaan pelat merah itu diduga melakukan manipulasi laporan keuangan atas kinerjanya.

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan Wijaya Karya telah membongkar fakta bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) baru sekadar formalitas.

Pengawasan berlapis dari berbagai lembaga dan seabrek aturan GCG tidak ada artinya jika pejabatnya bermental ABS (Asal Bapak Senang) dan korup. Pejabat BUMN yang bermental ABS akan melakukan segala cara untuk menyenangkan bosnya.

Salah satunya dengan memanipulasi laporan keuangan atau membuat laporan keuangan palsu. Laporan keuangan dipoles sedemikian rupa agar terlihat bagus, padahal faktanya buruk. Tindakan tak berakhlak itu dipastikan bakal mewariskan tumpukan masalah kepada pejabat penggantinya.

Kasus perusahaan terbuka BUMN yang mempercantik laporan keuangan ini sudah berulang kali terjadi. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan, laporan keuangan dua BUMN Karya itu tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Laporan keuangannya menyatakan selalu untung, padahal arus kas (cash flow) perusahaan tidak pernah positif.

Berdasarkan laporan Keuangan publikasi Waskita konsolidasian tahun 2022, pendapatan usaha perseroan naik, kerugian tahun berjalan turun. Perseroan membukukan pendapatan usaha tahun 2022 sebesar Rp15,30 triliun atau naik 25,20 persen dibanding pendapatan usaha 2021 sebesar Rp12,22 triliun. Sedangkan kerugian tahun berjalan turun 8,74 persen, yaitu dari Rp1,83 triliun pada 2021 menjadi Rp1,67 triliun di 2022.

Sementara, Wika pada 2022 mencatat rugi bersih konsolidasian sebesar Rp59,6 miliar, dibandingkan laba bersih konsolidasian Rp117,67 miliar di 2021. Sedangkan pendapatan bersih konsolidasian sebesar Rp21,48 triliun atau naik 20,67 persen dibandingkan Rp17,80 triliun di 2021.

Tak hanya merugi, kedua BUMN Karya itu juga disebut sedang kesulitan cash flow, sehingga Kementerian BUMN harus meminta persetujuan

DPR untuk menyuntikkan dana sebesar Rp57,9 triliun guna menambah permodalan di 9 BUMN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dengan adanya kasus manipulasi tersebut, banyak pihak meminta suntikan modal untuk dua BUMN itu ditunda sampai kasusnya jelas. Sebab, tindakan mempercantik laporan keuangan itu bakal meninggalkan bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Sebagai perusahaan terbuka yang berstatus BUMN, Waskita dan Wika sebenarnya sudah mendapatkan pengawasan berlapis-lapis dari berbagai pihak, seperti komite audit, dewan komisaris, akuntan publik, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga BPKP.

Anehnya, manipulasi data yang diduga sudah dilakukan beberapa tahun itu berjalan mulus tanpa ada yang tahu. Bahkan, akuntan publik yang setiap tahun mengaudit laporan keuangannya juga tak mampu mendeteksi adanya rekayasa laporan keuangan.

Kementerian BUMN sedang melakukan penyelidikan. Jika terbukti akuntannya bermasalah, tentu izin operasionalnya sebagai akuntan publik bisa dicabut oleh OJK.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi BEI, Waskita menggunakan jasa kantor akuntan publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2021 dan 2022.

Kantor akuntan publik anggota dari Crowe Indonesia tersebut, terhitung sejak Februari tahun ini telah dibekukan izinnya oleh OJK, karena kliennya PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life terbukti bermasalah dan usahanya sudah dicabut pada 5 Desember 2022.

Terkait Waskita, BUMN konstruksi ini juga punya rekam jejak pernah memanipulasi laporan keuangan. Tahun 2009, manipulasi keuangan Waskita terbongkar, sehingga perseroan direstrukturisasi dan direksinya dipecat.

Saat itu, ditemukan kelebihan pencatatan sebesar Rp400 miliar akibat direksi sejak tahun buku 2004-2008 memalsukan laporan keuangan dengan memasukkan proyeksi pendapatan beberapa tahun ke depan sebagai pendapatan di tahun-tahun sebelumnya.

Selain kasus manipulasi keuangan, beberapa pejabat Waskita, termasuk direktur utamanya juga terjerat kasus korupsi proyek fiktif senilai Rp2,5 triliun yang diduga terjadi pada 2016-2020. Kasus korupsi tersebut saat ini masih dalam proses di Kejaksaan Agung. Belum lagi kasus gugatan hukum dari penyedia barang dan jasa atau vendor yang tidak dibayar tagihannya.

Setali tiga uang dengan Waskita, kasus korupsi proyek dan utang juga mengerogoti kinerja Wika dan anak usahanya. Beberapa kasus yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di antaranya adalah Proyek Multiyear Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis dan korupsi proyek Jembatan Waterfront.

Direktur Utama Waskita Karya, Mursyid

Terkait audit laporan keuangan, Wika berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 12 April 2022 masih menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia).

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai tindak lanjut yang bisa dilakukan dengan adanya audit investigasi, baik melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dugaan manipulasi laporan keuangan Wika perlu ditindaklanjuti. Biasanya BPK melakukan audit investigasi, jika ada laporan yang mencurigakan. Jadi kementerian BUMN bisa meminta BPK melakukan itu," ujar Ronny.

Menurutnya, laporan investigasi itu bisa menjadi rujukan bagi KPK untuk terjun lebih dalam mencari pelaku korupsi. Artinya, setiap kasus hukumnya berpotensi terkuak.

Ronny mencatat, dugaan adanya manipulasi laporan keuangan bukan terjadi saat ini saja. Tapi pernah juga terjadi di lingkungan BUMN lain seperti Garuda Indonesia.

Per 2019, ada dua komisaris yang enggan menandatangani hasil laporan keuangan tahun buku 2018. Setelah ditelusuri, ternyata terbukti ada manipulasi laporan keuangan, dari yang sebelumnya mencatatkan rugi, menjadi mencatatkan keuntungan.

"Akhirnya terbukti Garuda melakukan manipulasi, dengan mamasukan rencana pendapatan di masa depan sebagai pendpatan di tahun itu. Kasus ini menjadi awal terbukanya bobrok Garuda beberapa tahun lalu," ujar dia.

"Jadi memang diperlukan tindaklanjut dari dugaan manipulasi ini, agar terang benderang urusannya. Jika memang telah terjadi manipulasi, harus dibenahi segera," sambung Ronny.

Penyertaan Modal Dibatalkan

Pemerintah memutuskan untuk

membatalkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN kepada Waskita Karya yang sudah telanjur dicairkan. Waskita Karya sendiri mengumumkan telah mengembalikan dana PMN senilai Rp 3 triliun ke rekening kas umum negara.

Direktur Utama Waskita Karya, Mursyid, mengungkapkan permintaan agar PMN dikembalikan ke kas negara tersebut datang dari Komite Privatisasi yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam surat Nomor EK.5/126A/M.EKON/05/2023 pada 10 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Dana PMN Untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Progres selama ini terpantau bagus, memang hanya cash-flow-nya saja. Kelihatan kegiatan-kegiatan yang misalnya penugasan, kan sudah disebutkan dulu ada KCIC dan lain-lain. Biar nanti yang memotret, yang menyampaikan, adalah pemeriksa.

"Komite privatisasi melalui surat tersebut di atas telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara dan proses rights Issue/privatisasi perseroan tidak dilanjutkan," kata Mursyid.

Imbas dari pembatalan dana PMN Tahun Anggaran 2022 tentunya berdampak terhadap Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP), di mana perusahaan harus mencari sumber pendanaan lain untuk penyelesaian beberapa proyek yang tengah dikerjakan maupun akan digarap.

"Atas pembatalan dana PMN TA 2022 berdampak terhadap RKAP, namun perseroan akan terus berkomitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan, serta berkoordinasi dengan para stakeholder dalam mencari sumber pendanaan alternatif penyelesaian proyek, sehingga target kinerja yang ditentukan dapat tercapai," beber Mursyid.

Dua proyek yang paling terdampak dari pembatalan suntikan PMN dari APBN tersebut adalah pembangunan Tol Ciawi - Sukabumi dan Tol Palembang - Betung.

Selain itu, Waskita Karya juga sebelumnya berencana melakukan righ issue di pasar modal karena adanya pencairan PMN dari negara. Rencana ini pun terpaksa dibatalkan sehingga saham publik di perusahaan BUMN tersebut tak jadi terdilusi.

Komisaris Utama WIKA, Jarot Widyoko

Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan akan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian dua ruas tol yang menjadi tujuan penggunaan PMN TA 2022 Waskita, yaitu ruas tol Kayu Agung – Palembang – Betung dan ruas tol Ciawi – Sukabumi.

Komisaris Utama WIKA, Jarot Widyoko, mengungkapkan, saat ini BPKP tengah memeriksa laporan keuangan perusahaan yang diduga telah dimanipulasi.

"Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan dari BPKP. Saya sangat mendukung sehingga nanti biar ketahuan di mana ini masalahnya. Biar kelihatan," ujar Jarot.

Menurut Jarot, saat ini progres dan kinerja perusahaan terpantau bagus dalam beberapa waktu terakhir. Namun, memang terdapat sejumlah hal yang perlu diluruskan terkait urusan alur keuangan perusahaan.

"Progres selama ini terpantau bagus, memang hanya cashflow-nya saja. Kelihatan kegiatan-kegiatan yang misalnya penugasan, kan sudah disebutkan dulu ada KCIC dan lain-lain. Biar nanti yang memotret, yang menyampaikan, adalah pemeriksa. Kami siap dievaluasi," kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan salah satu cara agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali yaitu dengan selalu bertindak tegas terhadap jajaran direksi perusahaan. Ia juga menuturkan kerap kali mengawal dan memperhatikan agar perusahaan mengikuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Jarot menduga, permasalahan yang terjadi saat ini juga didorong karena adanya andil dari rentetan kejadian di masa lalu. Namun demikian, dia tidak memerincikan dugaannya tersebut.

"Dugaan saya, bisa sampai terjadi itu karena ada rentetan kejadian di masa lalu. WIKA ini kan tidak berdiri tahun 2023 ini, sudah lama kan. Jadi ini ada rentetan. Penyebabnya apa? Supaya yang lebih berwenang menjawab, yang melakukan pemeriksaan," ujarnya.●

info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

www.infoindonesia.id

Network

INFO PASANG

ZULFAHMI

+62 813 8019 6507

IKLAN

Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **iNFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

www.infoindonesia.id

facebook @infoindonesia.id twitter : @_infoindonesia

Instagram @info_indonesia.id YouTube : infoindonesiatv

info indonesia
iNOVASI UNTUK NEGERi
https://infoindonesia.id
EDISI #34 AGUSTUS 2023

BANYAK NOLAK JADI CAWAPRESNYA ANIES MASIH JOMBLO